



IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL

(KF)

*(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)*

The Implementation of Functional Literacy (KF) Program

*(A Descriptive Study in Karangpring Village, District of Sukorambi,
Jember Regency)*

SKRIPSI

Oleh:

Laorien Naivalent Masbut

NIM 100910301045

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL

(KF)

*(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)*

The Implementation of Functional Literacy (KF) Program

*(A Descriptive Study in Karangpring Village, District of Sukorambi,
Jember Regency)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh:

Laorien Naovalent Masbut

NIM 100910301045

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mama Endang Sri Umiyati dan Papa R.Muhamad Masbut tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan semangat untuk keberhasilan dan kesuksesan saya
2. Kakak saya, Gerry Zaky Al-Masbut tersayang yang juga selalu memberikan doa, semangat, motivasi serta contoh yang baik untuk keberhasilan dan kesuksesan saya

3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



MOTTO

Siapapun yang berhenti belajar akan menjadi tua, entah usianya dua puluh atau delapan puluh tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap muda. Yang paling dahsyat dalam hidup adalah berusaha agar pikiran kita tetap muda.

(Henry Ford)*)

Kalau mau sukses dalam sesuatu, jangan dulu berpikir gagal. Persiapkan diri kita sebaik mungkin dengan banyak *knowledge*, banyak *skill*, dan jangan takut gagal karena kegagalan justru memperkaya kita dan membuat kita jadi lebih bagus.

Never afraid to fail and try your best. Just never give up.

(Nina Juliana Moran)**)

*) Lola De Julio De Maci.2011.Chicken Soup For The Soul *Menyingkap Rahasia Mewujudkan Cita-cita*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

***) Billy Boen.2013.Top Words 2 (*Kisah Inspiratif dan Sukses Orang-orang Top Indonesia*).Yogyakarta: PT Bentang Pustaka

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laorien Naovalent Masbut

NIM : 100910301045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) (Studi Deskriptif Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Mei 2015

Yang menyatakan,

Laorien Naovalent Masbut
NIM. 100910301045

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL
(KF)**

*(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember)*

Oleh:

Laorien Naivalent Masbut
NIM 100910301045

Pembimbing

Dosen Pembimbing : Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) (*Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*)” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Mei 2015

Tempat : Ruang Sidang Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Budhy Santoso, S.Sos, M.Si
NIP. 197012131997021001

Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos
NIP. 197802142005012002

Penguji II,

Drs. Djoko Wahyudi, M.Si
NIP. 195609011985031004

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) (*Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*); Laorien Naivalent Masbut, 100910301045; 110 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Desa Karangpring menempati posisi pertama untuk jumlah angka buta huruf dibanding dengan desa lain se-Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yaitu 1075 warga buta huruf tahun 2012. Oleh karena itu, penyelenggara mengupayakan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tiap tahun dan berkelanjutan. Pada tahun 2013 penyelenggara, yaitu YPPI Nurul Wajid menyelenggarakan program KF tingkat Dasar pada tanggal 25 Agustus hingga 15 Desember 2013. Yang membedakan dengan desa lain, Desa Karangpring menambah kegiatan pendidikan keterampilan bagi warga belajar yang merupakan salah satu faktor keberhasilan program. Maka dalam hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi program KF tingkat Dasar di Desa Karangpring khususnya program KF tingkat Dasar tahun 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) tingkat Dasar di Desa Karangpring tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* ditemukan tiga jenis informan pokok, yaitu penyelenggara program, tutor dan penerima manfaat program (warga belajar) dan satu jenis informan tambahan yaitu staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan juga staf UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. Pengumpulan data melalui wawancara semiterstruktur, observasi nonpartisipan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan data sementara, triangulasi dan terakhir penyimpulan akhir. Teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring tahun 2013 meliputi tiga tahapan, yaitu (1) tahap persiapan, yaitu; yang *pertama* adalah musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. *Kedua*, mempersiapkan warga belajar dan tutor. *Ketiga*, pendekatan kepada warga belajar. Dan *keempat*, pengajuan proposal. (2) tahap pelaksanaan, yaitu; *pertama* menentukan kelompok belajar, *kedua* penyusunan jadwal belajar, *ketiga* proses pembelajaran dan *keempat* pendidikan latihan keterampilan. (3) tahap penilaian hasil pembelajaran, yaitu; *pertama*, penilaian secara periodik, *kedua*, penilaian akhir, *ketiga*, warga belajar yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Faktor pendorong keberhasilan program adalah rasa keingintahuan warga belajar Desa Karangpring yang dari dirinya sendiri, adanya honor tutor sebagai bentuk penyemangat tutor di sepuluh kelompok di Desa Karangpring, adanya kegiatan tambahan pendidikan keterampilan untuk warga belajar dan penentuan tempat belajar yang strategis dan mudah dijangkau warga belajar serta waktu yang menyesuaikan waktu luang dan memanfaatkan kegiatan rutin muslimatan warga belajar. Kendala yang dihadapi penyelenggara YPPI Nurul Wajid dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar tahun 2013 adalah rasa malas atau perasaan tidak butuh dari warga belajar saat pembelajaran berlangsung. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara beserta tutor saat itu, yaitu tetap sabar dan telaten dalam memberikan pembelajaran kepada warga belajar, menentukan tutor seorang tokoh masyarakat di Desa Karangpring, membawa makanan dan minuman sebagai penambah semangat dan penghilang kebosanan warga belajar saat pembelajaran berlangsung, dan memanfaatkan kegiatan rutin warga belajar di desa, yaitu istigosah dan acara muslimatan lainnya. Maka, dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 cenderung berhasil karena melihat hasil perkembangan nilai warga belajar.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah berupa kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul “**Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)** (*Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*)” sebagai tugas akhir dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember.

Skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik jika tidak ada orang-orang yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi serta banyak berjasa dalam proses penelitian penulisan hasil penelitian. Tanpa mengurangi rasa hormat, rasa terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Kusuma Wulandari S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis sewaktu masa studi;
4. Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang telah selalu sabar membimbing, memberi arahan, nasehat, semangat serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa studi penulis;
6. Kedua orang tuaku, ibunda Endang Sri Umiyati dan ayahanda R.Muhamad Masbut tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa

kepada penulis, yang tak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi dan banyak nasehat serta jasa kepada penulis semata-mata agar penulis dapat meraih keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Terimakasih Ma, Pa. *I really wanna make you proud of me, Ma Pa* ☺

7. Kakakku tercinta, Gerry Zaky Al Masbut yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa sebagai seorang kakak, yang juga tak hentinya memberikan doa, nasehat, semangat, motivasi dan selalu berbagi cerita. Terimakasih pula telah menjadi panutan yang baik buat adikmu ini. *Sometimes, I think my inspiration came from you Genk!* ☺
8. Terimakasih sahabat-sahabatku tersayang Anita Kurniawati (Nito), Yessi Purwaningtyas (Yesung), Friezka Amalia (*my twin*), Riza Rastri (Kak Caa), Anandhita Eka (Dhita), Syahri Banun (Bebek), Devi Savita (Depi), Raras (Yayas), Surya (Sur) yang tak hentinya memberikan waktunya, kebahagiaan, keceriaan, semangat, dukungan, doa, cerita suka dan duka bersama, dan yang paling penting terimakasih telah menyadarkanku mana prioritas dalam hidupku. Kalian semua luar biasa! Semoga kita semua dapat meraih mimpi kita masing-masing.☺
9. Hai *Wuerfel*-ku si friez, sur, gian, baiu dan tri terimakasih menjadi sahabat sejak SMA dan selalu saling mendukung, memberikan semangat dan doa! ☺
10. Hai *Alengleng* Mbak Icha, Yesung, Nito, Mbak Bella, Mbak Sheby, Mbak Mala, Yova, Galih terimakasih telah memberikan cerita baru, keseruan, kebahagiaan, keceriaan, keramaian kalian dan selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir supaya bisa jalan-jalan lagi haha. *Keep travelling!* ☺
11. Terimakasih pula untuk teman-temanku angkatan 2010 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak memberikan pengalaman baru selama masa studi. ☺
12. Terimakasih kepada Bapak Nur Ali S.Pd selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) Nurul Wajid yang telah memberikan penulis untuk meneliti program KF di Desa Karangpring dan telah banyak

membantu proses penelitian penulis hingga selesai dengan baik dan juga kepada staf Dinas Pendidikan Jember, para tutor dan warga Desa Karangpring yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis.

Semoga dengan adanya skripsi ini mampu memberikan motivasi serta dapat bermanfaat bagi khalayak umum. Penulis juga berlapang dada menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi. Harapan penulis selanjutnya adalah pembaca dapat memahami apa yang telah disampaikan dan dituliskan oleh penulis dalam skripsi ini.

Jember, Mei 2015

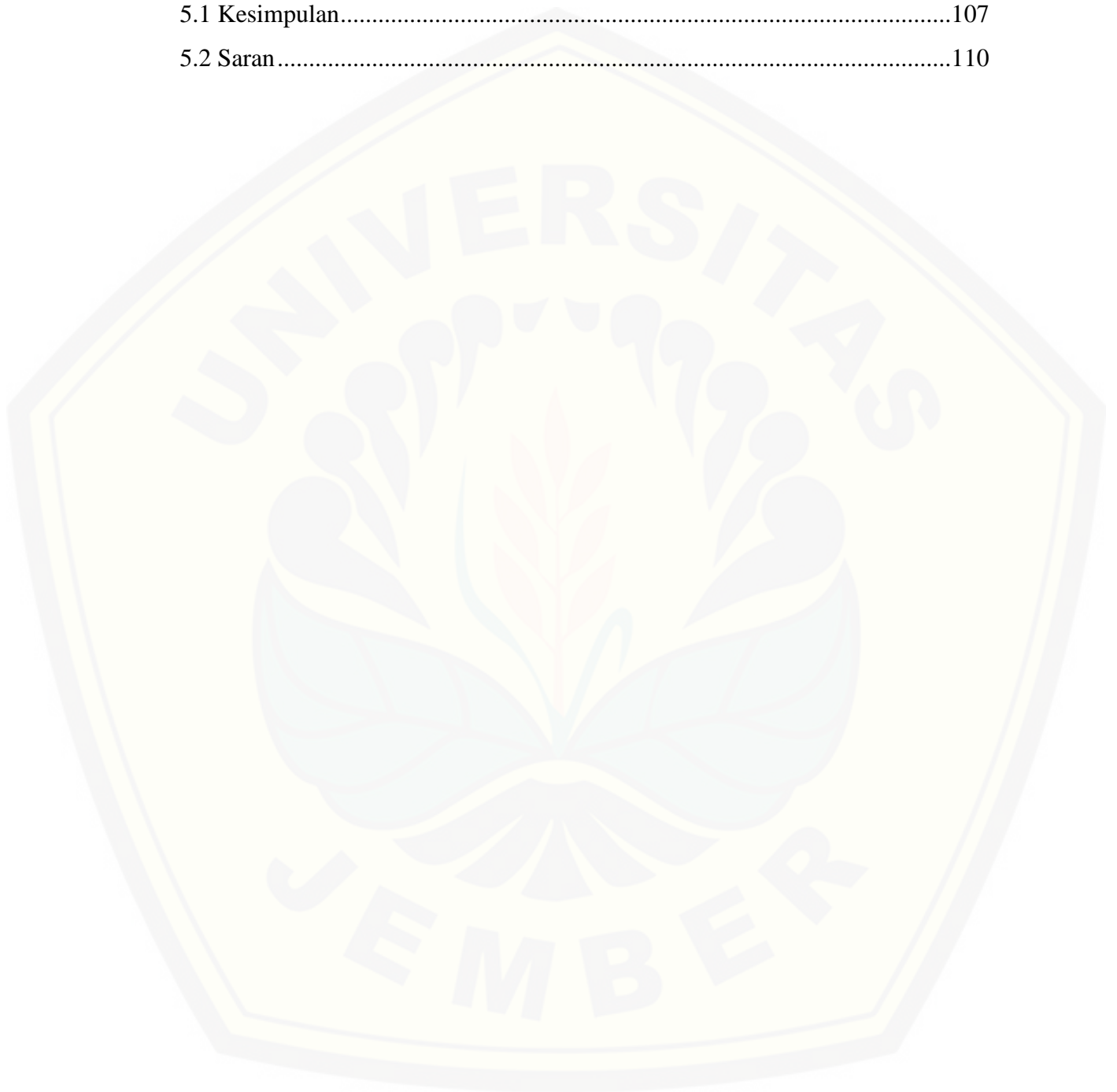
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Program Keaksaraan Fungsional dan Kesejahteraan Sosial.....	12
2.1.1 Keaksaraan Fungsional	12
2.1.2 Kesejahteraan Sosial	18
2.2 Definisi Keaksaraan Dasar	20
2.2.1 Tujuan Program Keaksaraan Dasar.....	20
2.2.2 Hasil yang Diharapkan dari Keaksaraan Dasar.....	21
2.2.3 Deskripsi Kegiatan Keaksaraan Dasar.....	21
2.3 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	23
2.4 Keaksaraan Fungsional sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat	27

2.5 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)	28
2.5.1 Tahap-tahap Implementasi	30
2.5.2 Komponen-komponen Implementasi Program Keaksaraan Fungsional	32
2.6 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu	36
2.7 Alur Pikir Konsep Penelitian	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	40
3.4 Teknik Penentuan Informan	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi	48
3.6 Teknik Analisis Data	48
3.7 Keabsahan Data.....	51
BAB 4. PEMBAHASAN	53
4.1 Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Desa Karangpring.....	53
4.2 Program Keaksaraan Fungsional.....	56
4.2.1 Penyelenggara Program	57
4.2.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program	60
4.3 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional	64
4.3.1 Tahap Persiapan	64
4.3.2 Tahap Pelaksanaan.....	78
4.3.3 Tahap Penilaian Hasil Pembelajaran.....	95
4.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada Tahun 2013	100
4.4.1 Rasa Keingintahuan Warga Belajar Desa Karangpring	100
4.4.2 Honor Tutor sebagai Penyemangat Tutor	101
4.4.3 Kegiatan Tambahan Pendidikan Keterampilan.....	102
4.4.4 Tempat Belajar yang Dekat dengan Rumah Warga Belajar dan Waktu Belajar yang Menyesuaikan Kondisi Warga Belajar.....	103

4.5 Kendala YPPI Nurul Wajid dalam Program Keaksaraan Fungsional (KF) dan Upaya Mengatasinya	103
BAB 5. PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	110



DAFTAR TABEL

1.1	Hasil validasi jumlah buta huruf di Kecamatan Sukorambi pada tahun 2012	7
1.2	Rekap Hasil Evaluasi dan Perkembangan Warga Belajar tahun 2013...	9
3.1	<i>Theoretical Sampling</i> Penelitian	41
4.1	Nama Dusun dan Jumlah RT, RW	53
4.2	Data Pendidikan Penduduk Desa Karangpring	54
4.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpring.....	55
4.4	Daftar Calon Tutor Program KF Di Desa Karangpring Tahun 2013	71
4.5	Jadwal Belajar KF Tingkat Dasar Desa Karangpring Tahun 2013	84
4.6	Hasil Penilaian Secara Periodik Warga Belajar Kelompok Duku 1 Bulan Agustus dan Oktober 2013.....	97

DAFTAR BAGAN

2.1 Alur pikir konsep penelitian 38



DAFTAR GAMBAR

4.1	Salah satu Mushola tempat kegiatan belajar mengajar program KF di Desa Karangpring	63
4.2	Gudang Penyimpanan yang Bersebelahan dengan Rumah Informan Tutor KH di Dusun Gendir Desa Karangpring	75
4.3	Buku Tematik Warga Belajar Desa Karangpring 2013	86
4.4	Kegiatan Pendidikan Latihan Keterampilan Membuat <i>Grunjung</i> atau Keranjang dan Membuat Pupuk Kompos	93
4.5	Kegiatan Pendidikan Latihan Keterampilan Membuat Onde-onde, Kripik Singkong dan Kripik Talas	94

DAFTAR LAMPIRAN

1. Telaah Penelitian Terdahulu
2. Pedoman Wawancara
3. Taksonomi
4. Susunan Pengurus YPPI Nurul Wajid
5. Data Warga Belajar Desa Karangpring 2013
6. Perkembangan Warga Belajar
7. Contoh SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara)
8. Dokumentasi
9. Surat Penelitian
10. Transkrip Reduksi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan saat ini harus bersifat wajib yakni wajib belajar sembilan tahun terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pendidikan formal yang bersifat umum dapat diberikan di sekolah atau universitas yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Namun, pendidikan-pendidikan alternatif bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang cacat, lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil (KAT), anak jalanan bisa diselenggarakan bersama oleh Departemen Sosial, Depdiknas dan lembaga-lembaga sukarela (Suharto. 2011:18).

Dalam kesejahteraan sosial, pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan manusia itu sendiri. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial menurut Paul Spicker dalam Isbandi (2005:123) menggambarkan usaha kesejahteraan sosial, dalam kaitan dengan kebijakan sosial itu sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan “*big five*”, yaitu: (1) Bidang Kesehatan, (2) Bidang Pendidikan, (3) Bidang Perumahan, (4) Bidang Jaminan Sosial dan (5) Bidang Pekerjaan Sosial. Dalam suatu negara bila masyarakatnya belum berpendidikan atau berpendidikan rendah maka dapat dikatakan masyarakat tersebut memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah.

Namun, pada fenomena yang terjadi di negara-negara berkembang sekaligus di negara Indonesia ini masih ada masyarakat yang belum mengenyam pendidikan. Terutama pendidikan dasar seperti belajar membaca, menulis dan berhitung. Masalah tersebut disebut penderita buta huruf atau buta aksara. Buta huruf atau buta aksara termasuk masalah sosial yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di Negara-negara berkembang lainnya yang juga masih ditemukan masalah buta huruf itu sendiri. Faktanya, satu di antara lima orang di dunia masih buta huruf. Maka, sejak tahun 1965 untuk membagi kesadaran tentang eksistensi masyarakat yang masih buta huruf di seluruh dunia setiap tanggal 8 September diperingati Hari Aksara Internasional atau *International Literacy Day* (Farichah. 2011:11).

Indonesia adalah negara berkembang yang masih terbelakang memiliki angka buta huruf yang tinggi. Menurut Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2012 masih ada sekitar 6,02 juta jiwa yang berusia lebih dari 10 tahun, 6,75 juta jiwa yang berusia lebih dari 15 tahun, 2 juta jiwa yang berusia antara 15 sampai 44 tahun, dan 17,2 juta jiwa yang berusia lebih dari 45 tahun masih mengalami buta huruf. (www.bps.go.id). Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusia lanjut adalah yang terbanyak menyandang buta huruf. Ini salah satu fakta yang memprihatinkan karena masyarakat usia lanjut tersebut artinya selama hidupnya belum mendapatkan pendidikan yang merupakan hak mereka. Padahal, telah ada UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Namun, ternyata hak tersebut belum diterima oleh sebagian masyarakat.

Masyarakat dengan buta huruf mengakibatkan mereka tertinggal akan pengetahuannya dan juga keterampilannya. Akibat lainnya adalah timbul kemiskinan. Menurut Kusnadi (2005:37) penyebab utama kemiskinan penduduk disebabkan oleh dua hal yakni ketimpangan sosial ekonomi, dan kebutaaksaraan penduduk yang bersangkutan. Pada saat bersamaan, yang namanya kemiskinan senantiasa bergandengan dan saling terkait dengan kebutaaksaraan penduduk. Kemiskinan tak jauh-jauh dari kebutaaksaraan, kebutaaksaraan tak jauh-jauh dari ketertinggalan. Kemiskinan, kebutaaksaraan, ketertinggalan dan keterbelakangan, serta ketidakberdayaan masyarakat, memang sudah ditahbiskan sebagai masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Jika persoalan ini terus dibiarkan tentunya dapat menimbulkan krisis sosial yang berkepanjangan.

Masyarakat buta huruf belum bisa dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Menurut Kusnadi, (2005:246) bahwa perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja haruslah menjadi fokus utama pemerintahan sekarang. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab,

berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Tergambar jelas bahwa seseorang yang berpendidikan berpengaruh besar dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan hidup seseorang. Pada tahun 2006 juga dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Dengan salah satu tujuan yakni, menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurang-kurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009 (Pemerintah Kabupaten Jember:2012). Dengan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar terbebas dari kebutaaksaraan yang menyebabkan ketertinggalan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu kebijakan untuk memberdayakan masyarakat dari kebutaaksaraan. Kebijakan sosial yang dibangun oleh pemerintah adalah kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial. Jenis pelayanan sosial yang dibangun ialah pelayanan sosial pendidikan. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat diperlukan oleh dunia kerja, melainkan pula untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan (Suharto. 2011:18).

Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Program pembelajaran keaksaraan fungsional harus berpusat pada masalah, minat dan kebutuhan warga belajar. Materi belajarnya didasarkan pada hal-hal tersebut, serta mencakup kegiatan yang dapat membantu mereka para warga belajar (Kusnadi.2005:192). Program Keaksaraan Fungsional (KF) adalah salah satu pelayanan sosial pendidikan yang telah memberdayakan masyarakat buta huruf yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terlaksananya program Keaksaraan Fungsional ini memiliki harapan besar bagi bangsa agar Indonesia terbebas dari buta huruf dan dapat memberdayakan masyarakat agar membentuk kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

Sejauh ini angka buta huruf di Indonesia sedikit demi sedikit mencapai penurunan. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS pada tahun 2010 jumlah buta huruf di Jawa Timur sebanyak 1,9 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2012 jumlah buta huruf di Jawa Timur sebanyak 1,2 juta jiwa. Ini berarti buta huruf di Jawa Timur mengalami penurunan sebanyak 700 ribu jiwa dalam kurun waktu dua tahun. Selain itu, pada tahun 2012, dari 17 kabupaten di Jatim yang masuk zona merah, kini sudah berkurang 4 kabupaten. Berarti tersisa 13 kabupaten zona merah, yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi (bappeda.jatimprov.go.id). Dari informasi di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang tergabung dalam kategori zona merah dengan angka buta huruf yang tinggi.

Di lain pihak, menurunnya angka buta huruf tersebut juga salah satu proses menuju berhasilnya tujuan Pembangunan Milenium Indonesia atau biasa disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah sebuah komitmen bersama masyarakat internasional untuk mempercepat pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Dalam “Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011”

Capaian tujuan MDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau sebelum tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Menurunnya angka buta huruf di Indonesia termasuk salah satu tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015, yakni APM (Angka Partisipasi Murni) SD (Sekolah Dasar), proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, serta angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki yang semuanya sudah mendekati 100 persen.

Pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Jember telah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Masyarakat buta huruf pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Jember. Salah satu desa yang telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional adalah Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Desa Karangpring terletak di sebelah Timur Kecamatan Sukorambi. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagian besar wilayahnya adalah sektor pertanian. Desa tersebut juga terdapat lahan perkebunan tepatnya sebelah utara Desa Karangpring salah satunya adalah kebun kopi yang berada di kaki gunung Argopuro.

Desa Karangpring telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional sejak tahun 2006. Namun tidak setiap tahun dapat dilaksanakan. Berikut informasi lebih lengkap yang di dapat dari sebuah kunjungan kepada selaku ketua penyelenggara program KF di Desa Karangpring yang sekaligus salah satu pengajar di YPPI Nurul Wajid dan juga implementator program KF sejak tahun 2006 informan NA, ia mengemukakan bahwa:

“Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring sudah sejak tahun 2006 dilaksanakan. Setiap tahunnya saya mengajukan sebuah proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur untuk permohonan dana hibah agar dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring. Namun tidak setiap tahun Desa Karangpring mendapat dana tersebut. Karena bergantian dengan Desa lainnya. Seperti di Desa Dukuhmencek dengan masih satu Kecamatan Sukorambi.”

Sejak tahun 2006 di Desa Karangpring melakukan kegiatan program Keaksaraan Fungsional. Namun, tidak setiap tahun melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena tergantung dari proposal yang dikirim oleh penyelenggara kepada Bapak Gubernur Jawa Timur. Jika proposal permohonan dana hibah tersebut ditolak maka penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di desa Karangpring tidak melakukan kegiatan program tersebut. Tetapi, setiap tahunnya penyelenggara di Desa Karangpring ini rajin mengirimkan proposal. Ini juga disampaikan oleh informan SG sebagai staf bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) saat peneliti berkunjung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Ia mengatakan bahwa penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring setiap tahunnya mengajukan proposal pengajuan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2012 ada ketetapan baru tentang pelaksanaan program KF, yaitu kegiatan dilakukan dengan menentukan warga belajar harus sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada. Berikut informasi yang di dapat dari sebuah kunjungan kepada selaku ketua penyelenggara program KF di Desa Karangpring yang sekaligus salah satu pengajar di YPPI Nurul Wajid informan NA pada tanggal 17 Maret 2014, ia mengemukakan bahwa:

“Mulai tahun 2012 sebelum melaksanakan program harus sesuai data BPS terlebih dahulu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, warga belajar saya tentukan sendiri. Dengan mencari warga buta huruf di Desa Karangpring.”

Berikut beberapa informasi dari informan SG sebagai staf bidang Keaksaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 11 April 2014:

“Dalam melaksanakan program KF, sejak 2012 ada ketentuan yang baru dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seperti: sebelum melaksanakan program KF calon warga belajar ditentukan sesuai data BPS yang ada, sebelum 2012 waktu belajar ditentukan berdasarkan bulan yakni selama 6 bulan namun sesudah 2012 ditentukan berdasarkan jam yaitu minimal 114 jam melaksanakan kegiatan belajar mengajar KF tersebut.”

Informasi tersebut dikuatkan dengan data dari Kecamatan Sukorambi tentang hasil validasi jumlah warga buta huruf Kecamatan Sukorambi pada tahun 2012:

Tabel 1.1 Hasil validasi jumlah buta huruf di Kecamatan Sukorambi pada tahun 2012

No	Desa	Jumlah buta huruf versi BPS	HASIL VALIDASI							Jumlah
			Tidak buta huruf dan meninggal	Buta Huruf Usia 15-60			Buta Huruf Usia 60 ke atas			
				L	P	JML	L	P	JML	
1	Sukorambi	1,068	284	143	255	398	117	269	386	784
2	Dukuhmencek	812	233	45	154	199	105	275	380	579
3	Jubung	310	51	25	100	125	27	107	134	259
4	Karangpring	1,436	361	121	321	442	196	437	633	1,075
5	Klungkung	1,285	238	160	441	601	125	321	446	1,047
Jumlah		4,911								

Sumber : Data BPS tahun 2012

Data di atas digunakan untuk mendata warga yang akan menjadi calon warga belajar program Keaksaraan Fungsional di seluruh Desa yang berada di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Khususnya untuk Desa Karangpring sendiri, data tersebut digunakan untuk pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional pada bulan Agustus sampai Desember pada tahun 2013. Dari data menunjukkan bahwa Desa Karangpring menempati posisi pertama untuk jumlah angka buta huruf se Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dengan masih banyaknya warga buta huruf di Desa Karangpring, YPPI Nurul Wajid melanjutkan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar pada tahun 2013. Pelaksanaan program tersebut, penyelenggara memiliki strategi tersendiri yang berbeda dari Desa lainnya agar berkurangnya angka buta huruf di Desa Karangpring. Strategi tersebut adalah berupa kegiatan keterampilan agar warga belajar mempraktekan langsung hasil belajar calistung mereka. Kegiatan keterampilan berupa membuat makanan dan kerajinan tangan, diantaranya membuat keripik singkong, keripik talas, onde-onde, keranjang dan pupuk kompos. Dan juga program tersebut selesai dilaksanakan dengan berhasil. Indikator keberhasilan dilihat pada perkembangan nilai hasil pembelajaran warga belajar. Artinya terdapat peningkatan kemampuan calistung warga belajar dalam

bahasa Indonesia yang baik. Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik mengangkat fokus kajian penelitian yang akan dikaji adalah “Implementasi Program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah disampaikan oleh informan NA sebagai ketua penyelenggara program saat observasi bahwa pada bulan Agustus hingga Desember tahun 2013, Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Tingkat Keaksaraan yang diberikan adalah Pendidikan Keaksaraan Dasar yang diperuntukkan bagi masyarakatnya yang buta huruf yang berusia 15 tahun keatas dengan prioritas usia 15-59 tahun. Pendidikan Keaksaraan Dasar, yakni keaksaraan yang diharapkan nantinya mempunyai kemampuan mendengar, berbicara, membaca, menulis dan berhitung untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia yang benar.

Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tersebut adalah Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) “Nurul Wajid” dengan ketua penyelenggara, yaitu informan NA sendiri. Ia salah satu pengajar di YPPI Nurul Wajid tersebut. Awal mula berjalannya program KF di desa tersebut karena perintah dari Pemerintah Kabupaten Jember lalu NA berinisiatif menjalankan perintah tersebut yang memang seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember dianjurkan untuk melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Atas nama Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) Nurul Wajid, informan NA membuat sebuah proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur untuk permohonan dana hibah agar dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring. Tetapi, sebelum itu harus terdapat data jumlah warga Buta Huruf sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS) di Desa tersebut. Lalu, pembuatan proposal dikerjakan sampai akhirnya menerima dana hibah dari Gubernur Jawa Timur dan kegiatan Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring berlangsung pada 25 Agustus hingga 15 Desember 2013

Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring yang dilaksanakan selama empat bulan dapat dikatakan berhasil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Keberhasilan suatu program Keaksaraan Fungsional dilihat pada banyaknya warga belajar yang berhasil lulus. Lulus tersebut artinya terdapat tingkat pencapaian hasil pembelajaran warga belajar dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara, sehingga mereka dapat dikatakan melek aksara. Berikut pencapaian hasil akhir selama 120 jam atau sekitar empat bulan dalam bidang berbicara, mendengarkan dan calistung adalah sebagai mana data hasil Rekap Hasil Evaluasi dan Perkembangan Warga Belajar.

Tabel 1.2 Rekap Hasil Evaluasi dan Perkembangan Warga Belajar tahun 2013

No	Nilai	Predikat	Aspek Penilaian									
			Berbicara		Mendengar		Membaca		Menulis		Berhitung	
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	A	Baik Sekali	52	52	54	54	50	50	52	52	56	56
2	B	Baik	26	26	27	27	26	26	26	26	26	26
3	C	Cukup	10	10	10	10	14	14	10	10	10	10
4	D	Kurang	12	12	9	9	10	10	12	12	8	8
JUMLAH			100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%

(Sumber: Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban dana bantuan program pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2013)

Data di atas menunjukkan sekurang-kurangnya 80% warga belajar telah mampu berbicara, mendengar, membaca, menulis dan berhitung. Hanya beberapa saja dengan nilai D. Karena keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi program tersebut. Maka fokus kajian penelitian mengarah pada implementasi program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013. Durasi waktu dipilih pada tahun 2013 karena adanya ketetapan baru program Keaksaraan Fungsional pada tahun 2012. Dengan adanya ketetapan baru tersebut berdampak pada pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional selanjutnya. Selain itu juga, karena dokumen-dokumen yang dimiliki penyelenggara program berupa dokumen pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional pada tahun sebelum-sebelumnya hilang. Penyelenggara sempat

kehilangan laptop yang berisi dokumen-dokumen pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelum 2013.

Jenis keaksaraan yang digunakan di Desa Karangpring adalah jenis Keaksaraan Dasar. Keaksaraan Dasar adalah kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. Berikut informasi dari informan NA dalam sebuah kunjungan, ia mengemukakan bahwa:

“Macam-macam keaksaraan banyak, namun yang telah berjalan di Desa Karangpring adalah Keaksaraan Dasar. Tetapi untuk kedepannya saya ingin menjalankan tentang Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Namun saya belum sempat membuat proposal jadi belum tahu kapan kepastian program tersebut bisa berjalan.”

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 dengan Keaksaraan Fungsional jenis Keaksaraan Dasar. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF), Studi Deskriptif Pemberdayaan Keaksaraan di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember” diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut;

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat di daerah atau desa lain yang melaksanakan program KF juga tentang Implementasi

Program Keaksaraan Fungsional (KF) yang berada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

2. Penelitian ini dapat membantu dan menambah pengetahuan dan wacana pelaksana program bagi perkembangan program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) khususnya yang berada di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2014:41) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Maka dari itu, tinjauan pustaka atau teori dalam bab ini peneliti berupaya memperkuat fenomena sosial yang diangkat ke dalam permasalahan penelitian ini.

2.1 Program Keaksaraan Fungsional dan Kesejahteraan Sosial

Terdapat keterkaitan antara program Keaksaraan Fungsional dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut adalah bentuk usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Menurut Friedlander dalam Adi (2013:36) Kesejahteraan Sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan. Sedangkan, program Keaksaraan Fungsional merupakan kegiatan salah satu bentuk usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang berbentuk suatu program dengan tujuan memberantas buta aksara. Masyarakat dengan buta aksara atau buta huruf merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Karena timbul dampak yang mereka rasakan seperti kemiskinan, ketertinggalan hingga ketidakberdayaan. Dan lebih mendalam dijelaskan kembali pada sub bab Keaksaraan Fungsional dan Kesejahteraan Sosial berikut ini.

2.1.1 Keaksaraan Fungsional

Program Keaksaraan Fungsional merupakan perwujudan dari suatu kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2011:10-11), secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial

lainnya. Menurut Midgley dalam Suharto (2011:11) dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dari ketiga kategori tersebut, program Keaksaraan Fungsional termasuk kategori program pelayanan sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas (Suharto, 2011:13).

Seperti halnya masyarakat yang buta huruf bila dibiarkan mengakibatkan kebodohan. Kebodohan mengakibatkan mereka tertinggal dalam perkembangan yang ada di kehidupan masyarakat. Masyarakat yang tertinggal dapat dikatakan mereka tidak berdaya. Maka dari itu, masyarakat buta huruf banyak yang mengalami kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dan di sini pemerintah berperan dalam memberdayakan mereka dengan membuat suatu kebijakan. Yang disebut kebijakan sosial berupa pelayanan sosial dengan tujuan memberantas dan mengurangi masyarakat yang buta huruf. Agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dan berdaya.

Di Negara-negara industri maju, seperti AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru, secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan atau perawatan sosial personal (Suharto, 2011:14). Lima bidang cakupan pelayanan sosial yang diuraikan oleh Edi Suharto tersebut dapat dipahami bahwa program Keaksaraan Fungsional termasuk pelayanan sosial yang menangani di bidang pendidikan.

Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Program pembelajaran keaksaraan fungsional harus berpusat pada masalah, minat dan kebutuhan warga belajar. Materi belajarnya didasarkan pada

hal-hal tersebut, serta mencakup kegiatan yang dapat membantu mereka para warga belajar (Kusnadi.2005:192). Untuk lebih lanjut Kusnadi menjelaskan tentang tujuan dan prinsip-prinsip dari program Keaksaraan Fungsional adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Program Keaksaraan Fungsional

Adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) sendiri untuk membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan keterampilan fungsional sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca, menulis dan berhitung saja, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Baca Masyarakat) mencari buku yang diminatinya dan memberikan bekal keterampilan fungsional. Dan tujuan akhirnya adalah bagaimana membuat setiap warga belajar dapat memotivasi dan memberdayakan dirinya, meningkatkan taraf hidupnya dan mandiri, serta bagaimana menciptakan masyarakat yang gemar belajar (*learning society*) (Kusnadi.2005:192).

b. Prinsip-prinsip Program Keaksaraan Fungsional

Dalam menyusun program pendidikan keaksaraan harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan keaksaraan fungsional sebagai berikut (Kusnadi.2005:192-197):

- a) Konteks Lokal, yaitu Keaksaraan Fungsional harus mengacu pada bagaimana memanfaatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung (calistung) setiap individu, guna memecahkan masalah serta melaksanakan tugas-tugas atau kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi Keaksaraan Fungsional ini, tentunya tidak bisa secara keseluruhan mencakup standar keberhasilan yang universal, artinya tergantung situasi dan kondisi di mana individu warga belajar berada. Keaksaraan Fungsional hanya dapat didefinisikan secara utuh, jika mengacu pada konteks sosial lokal dan kebutuhan khusus dari setiap warga belajar.

b) Desain Lokal, yaitu proses pembelajaran yang merupakan respon (tanggapan) minat dan kebutuhan warga belajar yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok. Unsur utama dari rancangan program ini menyangkut: tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, kegiatan belajar, waktu dan tempat pertemuan, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu, perlu dirancang agar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar. Selain itu, desain lokal keaksaraan juga menyangkut kesepakatan belajar yang dibuat oleh kelompok belajar, rencana pembelajaran yang dilakukan, pemilihan kegiatan belajar oleh kelompok belajar dan sebagainya. Sebagai contoh:

1. Besarnya kelompok sebaiknya lebih didasarkan pada jumlah warga belajar pada suatu desa dan jarak antar rumah, daripada hanya mengejar target yang telah ditentukan. Idealnya satu Kejar berjumlah tidak lebih dari 10 orang. Jumlah dan sasaran ini sangat mempengaruhi keberhasilan kelompok, karena semakin banyak jumlah warga belajar dalam satu kelompok belajar, maka akan semakin sulit untuk mengelolanya, terutama dalam hal kesamaan minat dan kebutuhan belajar yang dimiliki setiap warga belajar.
 2. Waktu dan jadwal pertemuan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh penentu kebijakan atau pemberi dana saja, namun harus sedapat mungkin disesuaikan dengan cara kerja dan waktu luang warga belajar dan tempat pertemuan sebaiknya yang dapat menyenangkan warga belajar untuk belajar. Bahan-bahan belajar juga harus relevan dengan kebutuhan dan minat warga belajar.
 3. Dan yang paling penting, kegiatan belajarnya harus mencerminkan keadaan geografis, kebudayaan, kondisi sosial masyarakat, agama dan bahasa setempat, termasuk juga masalah-masalah kesehatan, pertanian, kesempatan kerja dan kendala-kendala lainnya.
- c) Proses Partisipatif, yaitu proses pembelajaran yang melibatkan warga belajar secara aktif dengan memanfaatkan keterampilan keaksaraan yang sudah mereka miliki. Tutor keaksaraan fungsional dan petugas lapangan lainnya

bersama-sama warga belajar, perlu melakukan identifikasi kebutuhan dan minat para warga belajar. Kemudian mereka bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan sumber-sumber, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat belajar tersebut di atas. Selain itu, mereka juga perlu menerapkan serangkaian strategi partisipatif dengan melibatkan para warga belajar. Mereka harus dilibatkan secara aktif dan berkesinambungan dalam semua aspek pembuatan desain lokal dan implementasi program tersebut, dengan cara melibatkan warga belajar dalam pembuatan bahan-bahan belajar; membuat rencana belajar yang didasarkan pada topik-topik yang diminati warga belajar; mencari dan memperoleh serta menggunakan bahan-bahan belajar (yang berasal dari kehidupan sehari-hari) dalam kegiatan membaca, menulis dan berhitung; dan membantu warga belajar membuat sendiri rencana dan proposal mereka, untuk kegiatan-kegiatan belajar dan kegiatan pengembangan selanjutnya.

- d) Fungsionalisasi Hasil Belajar, yaitu hasil belajarnya dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan sikap positif dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup warga belajar. Kriteria utama dalam menentukan hasil suatu program keaksaraan fungsional adalah dengan cara meningkatkan kemampuan setiap warga belajar dalam memanfaatkan keterampilan keaksaraan mereka, untuk kegiatan mereka sehari-hari. Dari hasil proses belajarnya, mereka diharapkan dapat menganalisis dan memecahkan masalah, untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

c. Konsepsi Belajar Orang Dewasa

Telah diketahui bahwa penerima manfaat atau sasaran program Keaksaraan Fungsional terdiri dari masyarakat orang dewasa, untuk itu pembelajaran mereka harus memperhatikan konsep belajar orang dewasa. Konsep belajar orang dewasa disebut konsep andragogi. Menurut Knowles dalam Kusnadi (2005:103) beberapa hal penting dalam konsep andragogi, yaitu;

1. Orang dewasa berbeda dengan anak-anak dalam hal sikap hidup, pandangan terhadap nilai-nilai hidup, minat, kebutuhan, ide/gagasan, hasrat-hasrat dan dorongan-dorongan untuk melakukan suatu perbuatan;

2. Orang dewasa sudah banyak memiliki pengalaman-pengalaman hidup (lebih banyak daripada anak-anak) maka mereka pada umumnya tidak mudah diubah sikap hidupnya;
3. Orang dewasa mempunyai konsep diri yang kuat dan mempunyai kebutuhan untuk mengatur dirinya, oleh karena itu mereka cenderung menolak apabila dibawa ke dalam situasi yang digurui atau diperlakukan seperti anak-anak;
4. Pengalaman merupakan sumber yang paling kaya dalam proses belajar orang dewasa, oleh karena itu inti metodologi proses belajar orang dewasa adalah menganalisis pengalaman;
5. Pada umumnya tidak ada perbedaan pada tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar antara orang dewasa dan anak-anak, apabila ada perbedaan hanya terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya;
6. Orang akan lebih cepat dan lebih mudah menerima dan memahami isi pembelajaran atau pendidikan apabila ia telah dapat menyadari dan menginsafi manfaat dan pentingnya pelajaran dan pendidikan itu bagi kehidupan; dan
7. Orang akan lebih mudah memahami suatu hal apabila dapat diterapkannya melalui berbagai jenis panca indera (penglihatan, pendengaran, perasaan dan lain-lain), jadi agar seseorang mengerti, kepadanya tidak hanya diperdengarkan dan diperlihatkan tetapi juga di demonstrasikan dan diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri.

Penjelasan tersebut penting dipahami bagi penyelenggara program Keaksaraan Fungsional yang sasarannya para orang dewasa. Penjelasan tentang konsep andragogi di atas adalah orang dewasa berbeda dengan anak-anak dan pembelajaran untuk orang dewasa juga berbeda dengan pembelajaran untuk anak-anak karena dari sikap, pemikiran dan pengalaman mereka yang sudah berbeda pula. Semakin tumbuh dan berkembangnya seseorang semakin bertambah pula pemikiran, gagasan, sikap dan pengalaman orang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, orang dewasa belajar sepanjang hidupnya, meskipun jenis

yang dipelajari dan cara belajarnya selalu berubah seiring dengan bertambahnya usia. Orang dewasa senang belajar bila aktivitas belajarnya dapat memecahkan masalahnya, menjadi bermakna bagi situasi kehidupannya. Mereka juga menginginkan hasil belajar segera dapat diterapkan. Oleh karena itu, menurut Kusnadi (2005:106) ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran program Keaksaraan Fungsional, yaitu:

1. Warga belajar akan termotivasi untuk belajar jika sesuai dengan pengalaman, minat dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pengalaman, minat dan kebutuhan merupakan titik awal dalam pengorganisasian aktivitas pembelajaran di kelompok belajar;
2. Orientasi belajar berhubungan erat dengan kehidupannya, oleh karena itu unit yang tepat untuk pembelajaran program KF adalah situasi kehidupannya bukan mata pelajaran;
3. Pengalaman adalah sumber yang paling kaya yang harus diakui keberadaannya bagi pembelajaran program Keaksaraan Fungsional. Oleh karena itu, metode utama dalam pembelajaran adalah menganalisis pengalaman warga belajar;
4. Setiap warga belajar memiliki kebutuhan untuk mengarahkan diri, oleh karena itu, peran tutor adalah meningkatkan proses saling memberi dan menerima dan bukannya mentransfer atau memindahkan pengetahuan kepada mereka dan kemudian mengevaluasi seberapa jauh mereka menguasai pengetahuan yang diberikan;
5. Perbedaan individual di antara warga belajar meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Atas dasar itu, pola pembelajaran harus menghargai secara penuh adanya perbedaan gaya, waktu, tempat dan bentuk penyampaian materi belajar.

2.1.2 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat

hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Rumusan Undang-undang tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai kondisi atau keadaan di mana terciptanya tata kehidupan yang baik dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak hanya baik atau memadai dari segi material saja tetapi spiritual dan sosial masyarakatnya juga. Maka terciptanya keseimbangan hidup dalam masyarakat tersebut yang disebut masyarakat sejahtera. Jika melihat pada suatu kondisi kesejahteraan sosial, menurut Midgley (2005:21) kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen. *Pertama*, sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur. *Kedua*, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan *ketiga*, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial.

Untuk memenuhi tujuan Kesejahteraan Sosial tersebut diperlukan suatu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya Kesejahteraan Sosial biasa disebut dengan usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial adalah bentuk kegiatan kesejahteraan sosial demi pengembangan masyarakat semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan kualitas hidupnya. Dalam artian kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem pelayanan (kegiatan) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.” (Suharto,2005:1-2)

Kesejahteraan sosial merupakan suatu bentuk kegiatan yang memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok hingga masyarakat yang dirancang guna untuk meningkatkan taraf hidup warga negara. Target dari kegiatan tersebut pastinya baik dari individu, kelompok dan seluruh masyarakat

yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan sosial memiliki indikator-indikator penting dalam mengukur kesejahteraan manusia itu sendiri. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial dibagi oleh Paul Spicker dalam Adi (Bab 1, halaman 1) yang menggambarkan lima bidang utama usaha kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan sosial yang disebut “*big five*”, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial. Dalam hal ini menyebutkan pendidikan adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Karena pendidikan adalah salah satu pondasi kuat penunjang kualitas hidup seseorang.

2.2 Definisi Keaksaraan Dasar

Keaksaraan dasar merupakan salah satu jenis dari Program Keaksaraan Fungsional. Keaksaraan dasar adalah salah satu jenis Program Keaksaraan Fungsional yang digunakan di Desa Karangpring. Dalam buku “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012” oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:5) yang peneliti dapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Keaksaraan Dasar adalah:

- a. Kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
- b. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59.

Sasaran atau penerima manfaat layanan Keaksaraan Dasar adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara parsial).

2.2.1 Tujuan Program Keaksaraan Dasar

Menurut buku “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012” oleh Direktorat

Pembinaan Pendidikan Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:6), tujuan Keaksaraan Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan.
- b. Memberikan kemampuan keaksaraan bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah atau melek aksara parsial dan cenderung buta aksara agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
- c. Membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk secara nasional.

2.2.2 Hasil yang Diharapkan dari Keaksaraan Dasar

Dalam suatu program pastilah memiliki pencapaian yang diharapkan. Berikut hasil yang diharapkan dari program Keaksaraan Fungsional dalam Keaksaraan Dasar menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dkk (2012:6-7) :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kegiatan keaksaraan dasar,
- b. Meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia oleh peserta didik sesuai dengan standar kompetensi keaksaraan (SKK).
- c. Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.

Indikator Keberhasilan Keaksaraan Dasar adalah minimal 80% peserta didik memperoleh SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara).

2.2.3 Deskripsi Kegiatan Keaksaraan Dasar

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:7-9), pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Dasar dilaksanakan pada tahun anggaran 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga

penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/fasilitator/narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) tempat pembelajaran.

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja.

a. Persiapan

Kegiatan ini meliputi antara lain:

- 1) Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan Kegiatan.
- 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

b. Pelaksanaan

1) Standar Kompetensi Keaksaraan

Pembelajaran keaksaraan dasar dilakukan berdasarkan konteks pembelajaran (latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar) dengan mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar setara 114 jam @60 menit).

2) Kegiatan Pembelajaran

- a) Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok/administrasi belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. Dalam praktik pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subkelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 7 orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subkelompok belajar tersebut.
- b) Penyelenggara bersama tutor dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib.
- c) Tutor dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan andragogis, fungsional dan tematik; metode-metode pembelajaran yang sesuai; dan

memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan hasil identifikasi.

- d) Kegiatan pembelajaran praktis berupa latihan praktik membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
- e) Tutor dapat memfungsikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat dan lingkungan sekitar.
- f) Metode-metode lain dapat dipergunakan sepanjang relevan dan dikuasai oleh tutor dan dianggap efektif untuk mencapai kompetensi minimal.

c. Penilaian Hasil Pembelajaran

- 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan.
- 2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi keaksaraan dasar yang harus diselesaikan selama mengikuti program.
- 3) Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

2.3 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Ife dalam Adi (2013:207) “pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged people*) atas pilihan pribadi dan kehidupan mereka (*personal choices and life*); kesempatan (*chances*); definisi kebutuhan (*need definition*); gagasan (*ideas*); institusi (*institutions*); sumber-sumber daya (*resources*); aktivitas ekonomi (*economic activity*) dan reproduksi (*reproduction*) dengan melakukan intervensi

melalui pembuatan perencanaan dan kebijakan (*policy and planning*); aksi politik dan sosial (*social and political action*); serta pendidikan (*education*).” Pengertian pemberdayaan di atas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan suatu pemberdayaan masyarakat harus melihat dari seluruh kondisi sasaran penerima manfaat pemberdayaan, dari melihat kebutuhannya hingga hasil yang diharapkan (*output*). Pemberdayaan dilakukan dengan sasaran kelompok masyarakat dan tujuan yang berbeda-beda sesuai bidang permasalahan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Misal, tujuan pemberdayaan bidang pendidikan dan bidang sosial berbeda. Tujuan bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat pendidikan dan sedangkan sosial contohnya membantu para penyandang cacat menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Namun, bila dikaitkan dengan program Keaksaraan Fungsional sebagai program pemberdayaan dibidang pendidikan orang dewasa ini memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi karena dengan berhasilnya kelompok sasaran (warga belajar) belajar calistung diharapkan pula mereka dapat memotivasi dan memberdayakan dirinya, meningkatkan taraf hidupnya dan mandiri.

Di samping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu dianggap selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan (Adi, 2008:83-84).

Sedangkan pemberdayaan sebagai proses sebagaimana menurut Hogan dalam Adi (2008:85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*);
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*);

3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Program Keaksaraan Fungsional adalah salah satu bentuk pemberdayaan sebagai program di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang sudah ditentukan jangka waktunya. Pembentukan program Keaksaraan Fungsional memiliki tujuan utama yaitu, memberantas buta huruf yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para buta huruf tersebut. Program tersebut sudah memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang telah direncanakan dan sasaran lokasi daerah-daerah yang memiliki angka buta huruf. Serta telah menentukan jangka waktu pelaksanaan program. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi di Kabupaten Jember di Kecamatan Sukorambi di Desa Karangpring.

Menurut Adi (2013:213) keberadaan pandangan yang melihat pemberdayaan sebagai suatu program dan sebagai suatu proses memberikan sumbangan tersendiri terhadap pemahaman tentang pemberdayaan, terutama dalam kaitannya dengan diskursus komunitas. Dalam diskursus komunitas, peran yang harus dijalankan oleh pelaku perubahan adalah sebagai pemercepat perubahan ataupun fasilitator. Sebagai fasilitator, keberadaan agen pengubah tidak mutlak harus hadir terus-menerus pada suatu kelompok sasaran. Fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih pandai sehingga nantinya mengembangkan kelompok mereka sendiri bila sudah tiba masanya program selesai.

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring itu sendiri, penyelenggara program yaitu, YPPI Nurul Wajid adalah sebagai pelaku perubahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat buta huruf di Desa Karangpring. Namun, di sini penyelenggara beserta tutor program Keaksaraan Fungsional lebih terus hadir dalam kelompok

sasaran karena kegiatan program yang berupa mengajarkan belajar calistung, maka mereka terus berada hadir dalam kegiatan rutin belajar mengajar tetapi selanjutnya juga harus menciptakan masyarakat yang mandiri.

Partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat. Makna dari partisipasi banyak namun di sini peneliti memfokuskan arti dari konsep partisipasi adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mereka sendiri agar terciptanya keaktifan dari masyarakat atau penerima manfaat program itu sendiri sehingga program berjalan sesuai tujuan hasilnya. Uphoff dan Cohen dalam Ife (2008:296) “menekankan pada rakyat memiliki peran dalam pembuatan keputusan”. Menurut Oakley dalam Ife (2008:296):

“Partisipasi merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek. Tujuannya untuk berupaya memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti dan menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.”

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program. Program Keaksaraan Fungsional melibatkan masyarakat (warga belajar) dalam pengambilan keputusan. Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen dalam Adi (2013:228) biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut:

1. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*Participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*); dan
2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri (*Participation is involvement in people's development of themselves, their lives, their environment*).

2.4 Keaksaraan Fungsional sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kusnadi (2005:221) proses pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional, maksudnya adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu/ kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik, sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional, sesungguhnya adalah sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan demikian, pusat aktivitas seharusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri, dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan manfaatnya untuk masyarakat. Dalam kaitan ini, menurut Yunus dalam Kusnadi (2005:221) ada lima prinsip sikap dasar yang patut diperhatikan: (1) kepedulian terhadap masalah, kebutuhan, dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan peran serta semua komponen lembaga atau individu terutama warga belajar dalam proses kegiatan; dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapainya. Berpedoman pada kelima prinsip dasar tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan fungsional akan lebih mudah tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pembelajaran dalam program KF, harus diarahkan untuk memberi kesempatan luas kepada masyarakat dan warga belajar yang bersangkutan, guna menganalisis masalah kehidupan mereka dan untuk mengembangkan keterampilan yang mereka kehendaki dalam mengubah keadaan ekonomi, status sosialnya, mutu serta taraf hidupnya. Ciri-ciri yang dapat dilakukan dalam pembelajaran agar terjadi proses pemberdayaan, menurut Kindervatter (1979) dalam Kusnadi (2005:221), adalah:

- 1) *Need oriented*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga belajar;

- 2) *Endegenious*, adalah pendekatan yang berorientasi dan mengutamakan kesesuaian nilai-nilai keaslian lokal, dengan cara menggali dan menggunakan potensi yang dimiliki warga belajar;
- 3) *Self-reliant*, ialah pendekatan yang membangun rasa percaya diri atau sikap mandiri pada setiap warga belajar;
- 4) *Ecologically sound*, ialah pendekatan yang berorientasi, memperhatikan dan mempertimbangkan aspek perubahan lingkungan;
- 5) *Based on structural transformation*, ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada perubahan struktur sistem, baik yang menyangkut hubungan sosial, kegiatan ekonomi, penyebaran keuangan, sistem manajemen maupun partisipasi masyarakat setempat.

2.5 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Lalu, implementasi juga merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Dan implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian (Winarno. 2012:147).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis

keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya-uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Akhirnya*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*,” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Menurut Terry dalam Tachjan (2006:32), program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar, dan budget. Menurut Siagian dalam Tachjan (2006:33), program tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang hendak dicapai,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

2.5.1 Tahap-tahap Implementasi

Program merupakan implementasi dari suatu kebijakan. Maka, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program (Winarno,2012:147). Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2004:36) dalam implementasi terdapat tiga tahapan, yaitu:

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Menurut Soenarko (2003:187) untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan (*policy implementation*) itu ada tiga kegiatan pokok yang penting, yaitu:

1) Interpretasi (*Interpretation*)

Berusaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir (*goal*) itu harus diwujudkan, harus direalisasikan. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijakan.

2) Organisasi (*Organization*)

Sistem koordinasi dan pengendalian (*control*) disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Di dalam pengambilan kebijakan (*policy making*), proses pelaksanaan kebijakan ini merupakan proses yang tidak hanya kompleks, akan tetapi juga yang sangat menentukan. Tidak sedikit kebijaksanaan pemerintah yang sudah dirumuskan dengan sempurna, namun gagal dalam pelaksanaan mencapai tujuannya. Hal itu terutama sekali, disamping faktor-faktor objektif yang telah disebutkan, disebabkan pula oleh faktor-faktor subjektif pada pelaksana-pelaksananya, dan masyarakat yang berkepentingan, yaitu kualitas dari pelaksana dan tingkat ketidaktahuan dan ketidakpedulian dari masyarakat, sehingga sama sekali tidak muncul partisipasinya.

Maka, untuk keberhasilan pelaksanaan setiap program itu sangat tergantung pada *the man behind the gun*, yaitu pelaksana-pelaksananya disamping tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan atau kebijakan pemerintah.

3) Aplikasi (*Application*)

Tahap ketiga, yang dimaksud dengan *application* adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisirnya tujuan kebijakan itu. Pelaksanaan kegiatan dalam *application* haruslah mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

2.5.2 Komponen-komponen Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Agar pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional berlangsung efektif, maka implementasinya harus menyangkut komponen-komponen berikut (Kusnadi, 2005:217) :

a. Perencanaan Strategis

Agar program Keaksaraan Fungsional tidak seperti program-program pendahulunya dan dapat menjawab tantangan zaman, maka diperlukan adanya suatu perencanaan strategis (*strategic planning*) untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat di masa depan. Penerapan kebijakan program Keaksaraan Fungsional dengan sendirinya memerlukan model perencanaan strategis tersebut yang berlainan dengan model perencanaan yang biasa digunakan pada masa lalu. Jadi, perencanaan strategis adalah alat pengubah dan pengendali perubahan, sesuai tujuan yang diharapkan, agar program Keaksaraan Fungsional menjadi lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan bermanfaat langsung pada masyarakat.

b. Kerjasama yang Efektif

Kerjasama ini meliputi berbagai komponen seperti pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan program, dukungan (*support system*) terhadap keberhasilan program dan pelaksanaan evaluasi program.

c. Pelatihan yang Efektif

Untuk suksesnya sebuah program perlu dipikirkan dan dipersiapkan berbagai perangkat pendukungnya. Salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia pelaksana program tersebut melalui pelatihan. Apabila kita berkeinginan kuat untuk mengembangkan dan mensosialisasikan program Keaksaraan Fungsional, kiranya tidak salah jika kita meningkatkan dulu mutu unsur-unsur pelaksanaannya. Karena syarat pertama dalam pengembangan program membutuhkan sumber daya manusia yang selain cukup dan cakap, juga mempunyai kualitas yang memadai. Untuk itu diperlukan pelatihan yang

selain efektif, juga hasil akhirnya dapat mengembangkan dan mensosialisasikan program Keaksaraan Fungsional di masyarakat.

d. Dukungan Birokrasi dan Masyarakat

Agar pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional dapat maksimal, paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama* adanya dukungan dari sistem birokrasi, dan *kedua* dukungan dari masyarakat atau warga belajar itu sendiri.

e. Pengelolaan Kelompok Belajar

Secara umum dapat dikemukakan tentang konsep pengelolaan kelompok belajar Keaksaraan Fungsional yang dapat digunakan oleh penyelenggara kelompok belajar. *Pertama*, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang dirasakan dan dinyatakan masyarakat sasaran program. *Kedua*, mengidentifikasi semua potensi sumberdaya baik manusia maupun non manusia, dan kendala yang terdapat dalam diri calon warga belajar, lembaga, dan masyarakat sekitarnya. *Ketiga*, identifikasi penyusunan program yang efektif dan efisien meliputi masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses, keluaran dan pengaruh.

Agar pengelolaan kelompok belajar Keaksaraan Fungsional, dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, paling tidak ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, seperti karakteristik warga belajar, jadwal pertemuan, kegiatan belajar, bahan belajar, dan kelangsungan kelompok.

1.) Karakteristik Warga Belajar

Pada situasi krisis seperti sekarang ini, sasaran program KF dapat dipastikan akan lebih mengutamakan perut daripada belajar calistung (keaksaraan). Banyak contoh yang bisa diamati, bahwa lembaga atau program yang dapat bertahan adalah lembaga yang memelihara hubungannya dengan sasaran program. Dengan demikian Direktorat Pendidikan Masyarakat perlu menyadari bahwa salah satu kunci untuk memenangkan persaingan (perut vs belajar) adalah perlakuan atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sasaran program.

Kesadaran untuk peduli terhadap masyarakat sasaran program perlu diperlihatkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, dalam bentuk memasukan kepuasan sasaran dalam formulasi sasaran Dikmas, dan menjadikannya sebagai nilai atau budaya kerja aparat Dikmas baik di pusat maupun di daerah. Artinya harus benar-benar memperhatikan minat dan kebutuhan belajar mereka, agar terpuaskan apa yang mereka inginkan.

Secara lebih spesifik sasaran penyelenggaraan program KF adalah warga belajar yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Warga masyarakat buta aksara (khususnya perempuan), dan miskin dengan prioritas 15-59 tahun; (2) Anak jalanan dan putus sekolah dasar (SD) kelas I-III; (3) Masyarakat di daerah kumuh yang buta aksara; (4) Para Napi buta aksara; dan (5) Para pekerja buta aksara yang ada di perusahaan-perusahaan. Dalam penelitian ini sasaran program atau penerima manfaat dari program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring adalah warga masyarakat buta aksara (khususnya perempuan), dan miskin dengan prioritas usia 15-59 tahun. Karena dapat dilihat dari lingkungan yang pedesaan dan banyak warga miskin yang masih buta huruf di Desa Karangpring. (Kusnadi, 2005:211)

Berdasarkan pengalaman, sebagian besar tingkat keaksaraan warga belajar dalam satu kelompok belajar terdiri atas multi level, yang berarti bahwa warga belajar buta aksara murni bercampur dengan mereka yang telah mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan dan sudah sedikit bisa baca-tulis.

2.) Rencana Belajar

Kelompok belajar berkewajiban memilih dan mengelola pertemuan belajar mereka sendiri melalui pembuatan kesepakatan belajar secara bersama-sama. Mereka diberikan kebebasan dalam mengurangi dan mengubah jam pertemuan sesuai situasi dan kondisinya misalnya pada saat musim tanam, panen atau lainnya. Namun demikian semuanya tergantung pada kesepakatan belajar yang telah dibuat, guna meneruskan pertemuan secara rutin dan teratur berdasarkan kesepakatan tersebut.

3.) Kegiatan Belajar

Secara garis besar kegiatan belajar mengajar pada program KF terdiri atas lima langkah kegiatan yaitu, menulis, membaca, berhitung, diskusi dan aksi. Langkah-langkah tersebut bukan berarti langkah yang harus berurutan, tetapi bisa saja dilakukan secara acak, misalnya dimulai dari diskusi, kemudian belajar membaca atau menulis dan seterusnya. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi serta kesepakatan di dalam kelompok belajar. Dan efektifitas kegiatan belajar, sangat tergantung dari kemampuan tutor dalam mengarahkan, dan membimbing warga belajar di dalam kegiatan belajarnya.

4.) Bahan Belajar

Dalam hal ini tutor tidak hanya tergantung dari bahan belajar Buku Tematik Keaksaraan Fungsional saja, warga belajar juga dapat dilibatkan dalam pembuatan berbagai bahan belajar yang mereka buat sendiri baik melalui gambar atau penulisan tentang pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri.

f. Penilaian yang Komprehensif

Kemampuan warga belajar pada awal masuk kelompok belajar tidak sama, untuk itu tutor perlu menilai kemampuan awal setiap warga belajar. Penilaian pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keterampilan calistung (baca tulis berhitung) dasar, dan minat serta kebutuhan fungsionalnya. Hasilnya akan memudahkan tutor dalam mengelompokkan warga belajar berdasarkan tingkat kemampuannya, dan menetapkan isi belajar serta metode/teknik pembelajarannya.

g. Dukungan yang Pro-aktif

Dukungan dan bantuan pro-aktif dari penyelenggara atau instansi lembaga yang terkait sangat penting untuk kelangsungan kegiatan belajar. Petugas-petugas yang mempunyai wewenang juga perlu memonitor, memotivasi dan membenahi administrasi kegiatan belajar. Di samping itu pada saat mereka

melakukan supervisi atau monitoring, perlu juga sekaligus memberikan *in-service training* teknik-teknik pembelajaran dan pengelolaan kelompok belajar.

2.6 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi-informasi pendukung sebuah penelitian maka seorang peneliti harus melakukan penelaah kepustakaan yang termasuk di dalamnya adalah tinjauan penelitian terdahulu. Oleh karena itu adanya tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan.

Dalam kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti memilih tiga penelitian yang terkait dengan konteks penelitian. Hasil lebih lengkap terkait dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam *Lampiran (2)*. Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Deni Candra Irawan (2013) “*Efektivitas Program Keaksaraan Fungsional Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*”. Ditemukan bahwa, program Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat miskin yang berada di Desa Sukowono tidak berjalan efektif. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terdapat beberapa kegiatan yang tidak berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku.

Penelitian *kedua*, oleh Rina Kartina (2012) “*Implementasi Pembelajaran Keaksaraan terhadap Pendidikan Orang Dewasa (Penelitian tentang Keaksaraan di PKBM Hidayah)*”. Dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, dalam penelitian tersebut menggunakan perhitungan angka persentase dikemukakan bahwa respon hampir seluruh warga belajar menyenangi adanya keaksaraan PKBM Hidayah (90%). Program yang digunakan adalah program setara SD dan program keterampilan bekal hidup. Program pendidikan keaksaraan terhadap orang dewasa di PKBM Hidayah dapat dikatakan berhasil.

Dan penelitian ketiga, oleh Latifah Sulton (2008) “*Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional (KF) (Kasus: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Damai*

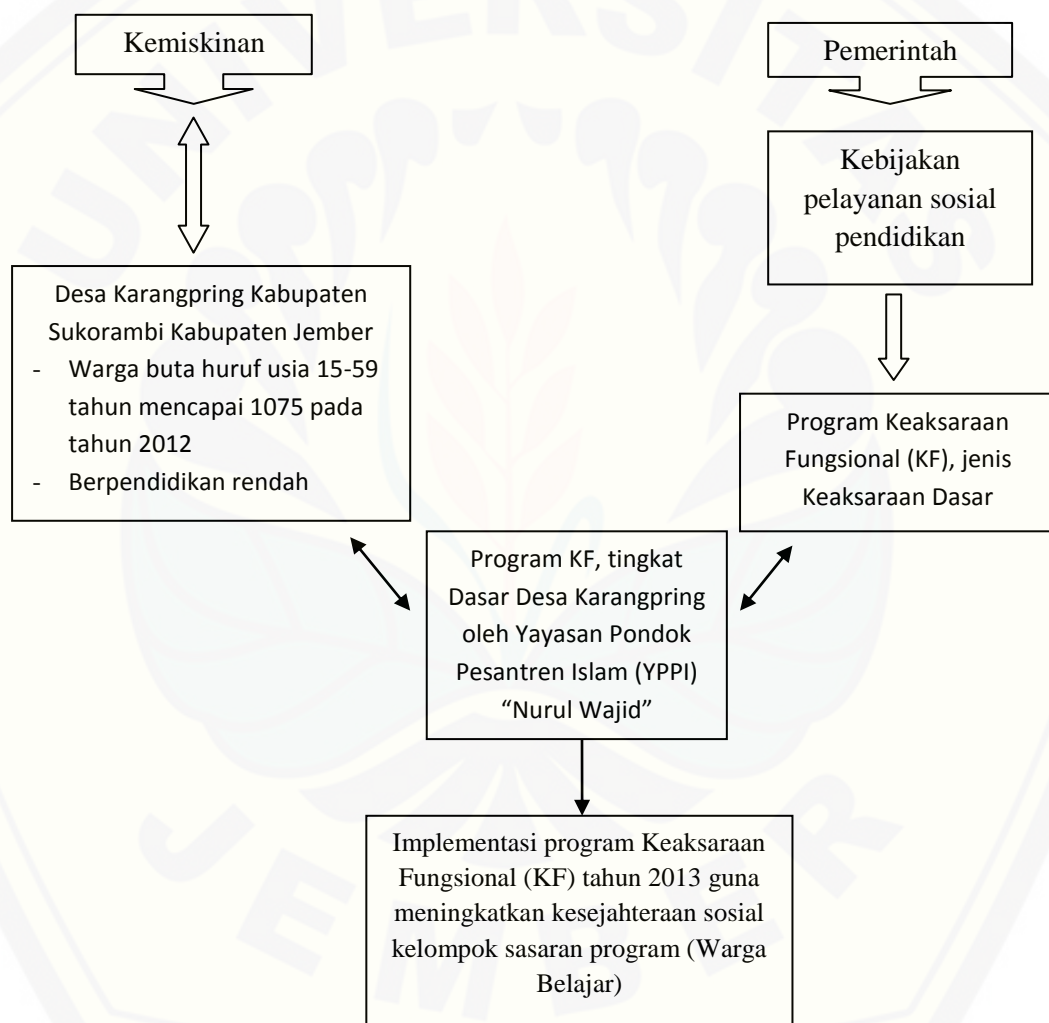
Mekar, Kelurahan Sukadamai, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor)”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan dari penyebab keberhasilan program tersebut hingga dampak yang diterima oleh warga belajar di Damai Mekar. Perbedaannya, penyelenggara program dilaksanakan oleh PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Yang menarik ditemukannya warga belajar di sana yang memiliki motivasi tinggi untuk tetap belajar keaksaraan meski program tersebut selesai dilaksanakan. Dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi pada warga belajar di Damai Mekar yang dipengaruhi dari lingkungannya. Hasil lebih lengkap terkait dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam *Lampiran (2)*

2.7 Alur Pikir Konsep Penelitian

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) diberikannya kebijakan dengan bentuk program keaksaraan yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Program pembelajaran keaksaraan fungsional harus berpusat pada masalah, minat dan kebutuhan warga belajar. Materi belajarnya didasarkan pada hal-hal tersebut, serta mencakup kegiatan yang dapat membantu mereka para warga belajar (Kusnadi.2005:192).

Kemiskinan dan buta huruf pada masyarakat merupakan masalah sosial yang sangat berkaitan. Seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember masih banyak yang berpendidikan rendah terutama buta huruf. Pendidikan rendah juga menyebabkan masyarakat tersebut berekonomi rendah, begitu pula sebaliknya efek ekonomi rendah adalah pendidikan mereka rendah. Pada tahun 2012 saja tercatat 1075 warga buta huruf di Desa Karangpring. Di satu sisi, pemerintah membuat kebijakan khususnya pelayanan sosial pendidikan untuk mengatasi masalah masyarakat buta huruf

tersebut sehingga program Keaksaraan Fungsional-pun dijalankan. Dengan dijalankannya program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring membantu warga buta huruf di Desa Karangpring berkurang, warga dapat calistung sehingga dapat meningkatkan keterampilan, kecerdasan dan kesejahteraan hidup mereka. Maka, peneliti di sini ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar di Desa Karangpring yang dilaksanakan pada tahun 2013. Berikut alur pikir konsep penelitiannya pada bagan (2.1) :



Bagan 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diolah oleh penulis,

2014

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Metode penelitian merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran dari objek yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu rancangan, langkah-langkah agar peneliti tidak ‘tersesat’ saat melakukan sebuah penelitian. Sehingga, suatu fenomena atau masalah yang diteliti memiliki hasil yang optimal dengan data-data yang lengkap serta rinci dan terbukti kebenarannya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berfokus pada implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam Meleong (2004:5), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus”. Dalam mengimplementasi suatu program, peneliti harus mengkaji tahapan pelaksanaan program juga aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut baik pelaksana maupun penerima manfaat program tersebut. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data harus secara mendalam sehingga menghasilkan suatu penelitian yang memiliki makna. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:3), metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Dengan pendekatan ini akan tergambar tujuan penelitiannya.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring

Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Maka, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Taylor dan Bodgan dalam Suyanto dan Sutinah (2008:166), penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sehingga, searah dengan hal tersebut maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian, penentuan lokasi penelitian adalah salah satu hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Fungsinya adalah memperjelas fokus penelitian tersebut, seperti penuturan Suyanto dan Sutinah (2008:171) dalam penelitian kualitatif, “*setting* penelitian akan mencerminkan lokasi penelitian yang langsung ‘melekat’ pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. *Setting* penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka”. Maka, dengan berfokus pada implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF), peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Peneliti memiliki alasan mengapa tertarik memilih di Desa Karangpring. Di sini peneliti melihat dari aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang diberikan penyelenggara program tersebut. Dari aspek tempat dikarenakan program KF di Desa Karangpring pada tahun 2013 dikatakan berhasil. Lalu dari aspek pelaku atau aktor adalah karena penyelenggara program KF di Desa tersebut adalah seorang yang profesional sekaligus salah satu tokoh masyarakat di Desa Karangpring. Dan dari aspek aktivitas program, yakni penyelenggara program di Desa Karangpring dalam melaksanakan kegiatan program tersebut menambahkan kegiatan tambahan seperti kegiatan keterampilan. Kegiatan tersebut bertujuan memacu semangat belajar warga belajar yang juga menjadi salah satu faktor keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada Tahun 2013.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut Meleong (2004:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. *Theoretical Sampling* adalah proses yang berguna sebagai pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperoleh pengertian secara mendalam dari suatu konsep penelitian tersebut. *Theoretical Sampling* tentang implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Tabel 3.1 *Theoretical Sampling* Penelitian

Jenis Informan	Informan
Implementasi program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	Penyelenggara program KF di Karangpring
	Penerima manfaat program
	Dinas Pendidikan Kab. Jember
	UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi

(Sumber data oleh penulis, 2014)

Berdasarkan pada karakteristik informan dapat dengan jelas diidentifikasi maka dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis informan, yaitu informan pokok dan informan tambahan. Berikut pembagiannya:

a. Informan pokok

Informan pokok adalah informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok sebagai data utama yang diperlukan dalam penelitian. Informan pokok dalam penelitian ini adalah implementor program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013, maka syarat informan pokok tersebut adalah mereka yang mengetahui, paham dan terlibat dalam seluruh tahapan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di desa Karangpring tahun 2013. Maka, disini peneliti menentukan informan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Penyelenggara program KF di Desa Karangpring pada tahun 2013

Penyelenggara program yang telah terlibat dan mengetahui betul proses dari awal hingga akhir program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 dan yang bersedia untuk dijadikan informan. Terdiri dari 2 penyelenggara utama program KF di Desa Karangpring pada tahun 2013, yaitu informan NA dan NM

2. Tutor-tutor saat pelaksanaan program pada tahun 2013. Maka, informan yang masuk dalam kriteria dalam penelitian ini, yaitu SK, SJ, AA, SY, KH

3. Penerima manfaat program

Penerima manfaat program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring yang disebut warga belajar. Warga Belajar saat mengikuti program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 dan yang bersedia untuk dijadikan informan. Maka, informan yang masuk dalam kriteria yaitu, SH, SM, TR, AR, TY.

b. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Peneliti telah menetapkan informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, karena program Keaksaraan Fungsional merupakan bentuk kebijakan dari Dinas Pendidikan. Sekaligus sebagai staf UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, yaitu informan SG.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian adalah mengumpulkan informasi-informasi atau data yang membantu jalannya penelitian tersebut. Semakin baik data yang digali semakin matang penelitian yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar penelitian menemukan titik kebenaran dan keberhasilannya memerlukan teknik pengumpulan data yang baik dan benar. Berikut ini adalah langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Menurut Creswell (2010:267), observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) –aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi nonpartisipan. Peneliti secara langsung turun ke lapangan, berbaur dan berkumpul bersama informan, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan tentang pelaksanaan program yang diteliti. Namun peneliti tidak dalam suatu pelaksanaan program tersebut karena program tersebut sudah terjadi.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu (Moleong, 2008:186). Pengumpulan data melalui wawancara, peneliti melakukan dengan teknik wawancara secara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan atau data penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Teknik yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014:73) wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Di sini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (semiterstruktur). Pedoman wawancara digunakan agar data yang didapat lebih terstruktur dan tidak keluar dari fokus kajian yang telah ditetapkan, namun dengan santai agar data yang didapat ‘mengembang’. Dalam melakukan wawancara peneliti membawa alat bantu berupa alat perekam (*tape recorder*) agar informasi yang didapat lengkap tak ada yang terlupakan, selain itu buku catatan dan sebuah kamera untuk dokumentasi peneliti. Dengan adanya alat bantu tersebut memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara lengkap, akurat dan pasti kebenarannya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, wawancara dilakukan menyesuaikan tempat informan saat itu berada. Rata-rata dilakukan di rumah tempat tinggal informan selain menyesuaikan bisa tidaknya informan melakukan wawancara, juga agar wawancara berlangsung santai sehingga tidak ada kegugupan dari informan tersebut dan pertanyaan peneliti dapat terjawab seluruhnya dengan lengkap. Wawancara mendalam tidak dilakukan sekali saja ada beberapa dilakukan berulang kali. Ini dilakukan karena memastikan konsistensi jawaban yang diberikan oleh informan. Namun, ada juga wawancara mendalam yang dilakukan sekali, seperti informan tutor dan warga belajar, karena kondisi mereka yang rata-rata sibuk bertani dan ketersediaan mereka untuk diwawancarai.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang wawancara di atas, maka berikut proses wawancara dan penjelasan singkat hasil wawancara dengan informan pokok maupun tambahan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan NA

Wawancara dengan informan NA dilakukan pada hari Sabtu 16 Agustus 2014 pada pukul 08:30 WIB di tempat pembayaran listrik Gebang (usaha milik informan NA), Minggu 31 Agustus 2014 pada pukul 14:00 WIB di rumah tempat tinggal informan NA. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi saat wawancara yang pertama diiringi suara kendaraan yang lalu lalang karena lokasi tempat pembayaran listrik informan NA terletak di pinggir jalan ramai dan saat wawancara sesekali informan melayani orang yang hendak membayar tagihan listrik karena saat itu tidak ada pegawai lain namun tidak mengganggu proses wawancara, informan selalu menjawab panjang lebar setiap pertanyaan peneliti. Situasi wawancara kedua berlangsung tenang karena suasana rumah informan NA saat itu sepi dan terdapat dua anak informan NA bermain di halaman. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara diantaranya tentang proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 dari tahap awal hingga akhir, siapa, kapan dan di mana tepatnya pelaksanaan program tersebut, keberhasilan program, faktor pendorong keberhasilan program, hambatan dan solusi mengatasi hambatan program KF di Desa Karangpring tahun 2013. Hasil wawancara informan menceritakan proses program KF di Desa Karangpring sejak awal hingga tahap penilaian akhir warga belajar, juga faktor dan hambatan program. Wawancara berlangsung sekitar 1,5 jam lebih.

b. Informan NM

Wawancara dengan informan NM dilakukan pada hari Selasa 22 Juli 2014 pukul 20:00 WIB di Mushola As Syafiq Desa Karangpring dan hari Kamis 4 September pukul 14:30 WIB di rumah informan NM. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi saat wawancara pertama adalah wawancara bersama para informan warga belajar sesekali bergurau dengan warga belajar dengan bahasa madura dan wawancara kedua

berlangsung tenang karena suasana rumah terlihat sepi. Pertanyaan yang diajukan adalah tahapan proses pelaksanaan program KF di Desa Karangpring tahun 2013, siapa, kapan dan di mana tepatnya pelaksanaan program tersebut, keberhasilan program, faktor pendorong keberhasilan program, hambatan dan solusi mengatasi hambatan, dan dampak bagi warga belajar setelah program KF di Desa Karangpring tahun 2013. Hasil dari wawancara adalah informan NM menceritakan proses program sepengetahuan informan NM dari persiapan, pelaksanaan dan tahap penilaian warga belajar, cerita menjadi tutor saat program, hingga dampak bagi warga belajar setelah mengikuti program. Wawancara berlangsung selama 1 jam.

c. Informan SK, SJ, SY, AA

Wawancara dengan informan SK, SJ, SY, AA dilakukan hari Minggu 7 Desember 2014 pada pukul 19:30 WIB di rumah informan NA. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Waktu dan tempat memanfaatkan waktu rapat para informan tutor dengan informan NA di rumah informan NA, oleh karena itu peneliti saat itu melakukan wawancara bersama dengan cara bergantian informan tutor satu dengan yang lain. Pertanyaan yang diajukan peneliti diantaranya proses awal hingga akhir menjadi tutor program KF di Desa Karangpring tahun 2013, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan, dampak bagi warga belajar. Hasil dari wawancara adalah informan SK bercerita proses yang dialami ketika program, informan SJ, SY dan AA lebih sedikit dalam menjawab dan menceritakan proses pelaksanaan belajar mengajar KF. Wawancara berlangsung selama 2 jam.

d. Informan KH

Wawancara dengan KH dilakukan pada hari Senin 8 Desember 2014 pukul 15:00 WIB di rumah tempat tinggal informan KH. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi saat wawancara sangat tenang dan sambil ditemani istri dari informan KH. Informan KH adalah salah satu tutor yang tidak bisa hadir dalam rapat di rumah informan NA pada hari sebelumnya, oleh karena itu peneliti mewawancarai keesokan hari di rumah informan KH sendiri. Pertanyaan yang diajukan tentang proses awal hingga

akhir menjadi tutor dalam pelaksanaan program KF di Desa Karangpring tahun 2013, hambatan dan solusi saat program, dan dampak bagi warga belajar. Hasil wawancara informan KH menceritakan proses menjadi tutor dari awal hingga akhir. Informan KH juga menceritakan warga belajar yang dia ajarkan hingga lancar dalam calistung, ialah informan TY, hambatan dan solusi sampai dampak bagi warga belajar yang ia ajarkan. Wawancara berlangsung selama 1,5 jam.

e. Informan SM, SH, TR, AR

Wawancara dengan informan SM, SH, TR dan AR dilakukan pada hari Selasa 22 Juli 2014 di Mushola As Syafiq Desa Karangpring dan wawancara hanya dengan informan SM lagi pada hari Minggu 7 September 2014 di rumah informan NA. Situasi saat wawancara tenang dan menyenangkan, wawancara dilakukan bersama, para informan saling bergantian menjawab dengan sambil malu-malu dan tak terbiasa berbahasa Indonesia. Wawancara kedua dengan informan SM berlangsung tenang, kebetulan informan SM sedang bertamu di rumah informan NA dan bersedia untuk diwawancarai kembali. Pertanyaan yang diajukan diantaranya dari awal mula menjadi warga belajar, bagaimana pembelajaran, alasan menerima untuk belajar Keaksaraan Dasar, hingga akhir program serta mengajak membaca, menulis dan berhitung untuk mengetahui hasil dan dampak dari program.

f. Informan SG

Wawancara dengan informan SG dilakukan pada hari 11 April 2014 di Kantor bagian PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan pada hari 11 September di salah satu ruangan kerja UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. Situasi saat wawancara sedang terlihat karyawan lain bekerja di meja masing-masing, begitu pula dengan informan SG, wawancara berlangsung ketika informan SG sedang senggang. Pertanyaan yang diajukan diantaranya bagaimana program Keaksaraan Fungsional dilaksanakan di Kabupaten Jember, bagaimana program Keaksaraan Fungsional berjalan di Desa Karangpring dan perbandingan dengan Desa lain di Kecamatan Sukorambi. Hasil dari wawancara adalah informan SG menceritakan seluruh pertanyaan peneliti,

bahwa di Desa Karangpring melaksanakan program dengan memiliki pendekatan dan strategi yang menarik sehingga beralan dengan baik dan berkelanjutan.

3.5.3 Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti mengumpulkan dokumen dari laporan hasil program yang didapat saat turun lapang. Dan juga menggunakan data atau dokumen penguat dari foto-foto saat kegiatan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tahun 2013 di Desa Karangpring dan saat peneliti melakukan observasi turun ke lokasi penelitian saat melakukan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell, Rossman dan Rallis dalam Creswell (2010:274), mendeskripsikan analisis data sebagai berikut:

1. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, misalnya, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara ini, menulis catatan-catatan kecil yang dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan laporan akhir.
2. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.
3. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan. Dalam model analisis tersebut, peneliti mengumpulkan data kualitatif, menganalisisnya berdasarkan tema-tema atau perspektif-perspektif tertentu, dan melaporkan 4-5 tema.

Maka, analisis data adalah proses setelah data telah terkumpul lalu dianalisis sesuai fokus kajian penelitian. Data yang telah terkumpul berupa data hasil wawancara peneliti (transkrip wawancara), catatan di lapangan saat observasi dan

dokumen-dokumen penguat penelitian. Menurut Irawan (2006:76-80), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Yang pertama, peneliti melakukan observasi nonpartisipan yaitu, dengan turun ke lapangan menggali informasi dari para informan yang telah bersedia memberikan informasi yang terkait dengan implementasi program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013. Di sini peneliti tidak secara langsung berada dalam pelaksanaan program karena program telah selesai dilaksanakan. Peneliti juga mencatat kondisi lingkungan Desa Karangpring. Observasi dilakukan di beberapa tempat seperti di kediaman para informan, baik informan pokok maupun tambahan.

Kedua, peneliti melakukan wawancara secara semiterstruktur terhadap semua informan pokok maupun informan tambahan. Dalam wawancara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang sudah dibuat. Akan tetapi pedoman wawancara digunakan sebagai formalitas saja selebihnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Namun, adanya pedoman wawancara tetap mempermudah jalannya proses wawancara tersebut. Di sini peneliti membutuhkan alat bantu seperti alat perekam, buku catatan dan kamera. Alat-alat tersebut sangat dibutuhkan agar data yang didapat lengkap, terinci, dan pasti kebenarannya. Sehingga, tidak ada pengurangan dan penambahan data yang tidak pasti.

Dan ketiga, peneliti melakukan dokumentasi. Dokumentasi tersebut berupa dokumen, foto-foto dan juga kajian pustaka. Dokumen yang peneliti dapat ialah berupa laporan hasil pelaksanaan program, foto-foto dokumentasi yang didapat ialah foto-foto saat program berlangsung yang peneliti dapat dari informan dan foto-foto saat peneliti melakukan wawancara dengan informan, dan kajian pustaka.

2. Transkrip Data

Hasil wawancara yang telah terekam pada alat perekam (*tape recorder*) diketik kembali seluruhnya tanpa ada yang kurang dan ditambahkan. Dan juga seluruh hasil catatan saat observasi di lapangan diubah dalam bentuk tulisan yang telah diketik. Peneliti tidak menambahkan pendapat dan asumsi didalamnya maka hasil data tersebut murni dari hasil pengumpulan data saat wawancara dan catatan di lapangan.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Dengan membaca pelan-pelan dan sangat teliti. Ada bagian-bagian penting dalam transkrip data yang menunjukkan jawaban fokus penelitian maka bagian-bagian penting tersebut diambil kata kuncinya dan diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini peneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep atau kata-kata kunci dalam satu besaran yang disebut “kategorisasi”. Kategori yang digunakan sebagai satu besaran utama dikelompokkan dalam: Program Keaksaraan Fungsional, Implementasi Program Keaksaraan Fungsional, Faktor Pendorong Keberhasilan Program, Hambatan dan Upaya mengatasi hambatan dalam Program. Kelima domain tersebut masih terdapat domain-domain yang lebih kecil lagi dan dalam sub domain tersebut masih ada sub domain yang lebih kecil lagi dan begitu seterusnya tergantung pada kejenuhan dan terincinya data yang diperoleh saat pengumpulan data.

5. Penyimpulan Data Sementara

Sampai di sini peneliti mulai menyimpulkan dari seluruh data yang ada, entah dari wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Penyimpulan ini masih sementara dan dalam penyimpulan ini peneliti tidak mencampur aduk dengan pikiran dan penafsiran peneliti sendiri.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa

terjadi. Sesuai dengan tujuan penelitian triangulasi dilakukan kepada penyelenggara program KF, penerima manfaat program KF (Warga Belajar), dan tutor dalam pelaksanaan program KF di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data hasil penelitian melalui ketiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dari berbagai informan, data dokumen, dan hasil observasi serta foto dengan metode yang sama.

7. Penyimpulan Akhir

Langkah ini dilakukan karena data telah dianggap sudah cukup, dimana ketika dilakukan penambahan data baru justru akan membuat tumpang tindih. Terakhir berbagai data dan temuan, dikaji kembali secara berulang dan diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya sampai pada kesimpulan terakhir.

3.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono, 2014:119). Dalam triangulasi dibagi beberapa teknik, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber data yang ada. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan

kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber data yang didapat tadi (Sugiyono, 2014:127)

2. Triangulasi metode

Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2004:331).

3. Triangulasi peneliti

Memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya dalam keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan peneliti atau pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data (Moleong, 2004:331).

4. Triangulasi teori

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*) (Moleong, 2004:331).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dalam menggunakan triangulasi sumber peneliti menggabungkan data yang didapat saat wawancara, observasi dan dokumentasi. Ini membantu peneliti mengkoscek kembali kebenaran data dari wawancara dengan informan pokok maupun tambahan juga dari observasi dan dokumentasi lalu menganalisis hasil temuan lapangan dengan memadukan hasil penelitian dengan teori yang dipergunakan dalam bab dua.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Desa Karangpring

Desa Karangpring terletak di Kecamatan Sukorambi. Desa Karangpring berada pada bagian Utara wilayah Kabupaten Jember. Secara umum letak geografis Desa Karangpring terletak pada wilayah dataran sedang yang luas dan merupakan lembah yang subur. Desa Karangpring memiliki luas wilayah 1.259.435 Ha. Dari luas desa yang ada, Desa Karangpring terdiri dari 4 dusun yaitu:

Tabel 4.1 Nama Dusun dan Jumlah RT, RW

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Krajan	2 RW	9 RT
2	Dusun Durjo	4 RW	14 RT
3	Dusun Karangpring	2 RW	8 RT
4	Dusun Gendir	4 RW	13 RT
Jumlah		12 RW	44 RT

(Sumber data: Profil Desa Karangpring tahun 2013)

Secara umum Desa Karangpring mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli desa dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Karangpring terdapat dua suku yaitu Jawa dan Madura juga sebagian kecil suku lain. Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2013 jumlah penduduk Desa Karangpring sebanyak 9120 jiwa yang terdiri dari:

Laki-laki : 4043 orang (44,3%)

Perempuan : 5077 orang (55,7%)

Jumlah jiwa : 9120 jiwa

Jumlah KK : 2236 KK

Data tersebut menjelaskan bahwa penduduk di Desa Karangpring lebih banyak penduduk perempuan (55,7%) dari pada penduduk laki-laki (44,3%) dengan jumlah 2236 Kartu Keluarga. Dan berikut penemuan peneliti tentang bidang pendidikan penduduk Desa Karangpring.

Tabel 4.2 Data Pendidikan Penduduk Desa Karangpring

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah penduduk	Persentase %
1	2	3	4
	Buta huruf usia 10 tahun keatas	2954	32,4%
	Usia pra sekolah	786	8,6%
1.	Tidak tamat SD	750	8,2%
2.	SD sederajat	2314	25,4%
3.	SLTP sederajat	1059	11,6%
4.	SLTA sederajat	1027	11,3%
5.	Diploma	119	1,3%
6.	Sarjana (S1)	86	0,9%
7.	Pasca Sarjana	25	0,3%
	Jumlah	9120	100%

(Sumber data : Profil Desa Karangpring tahun 2013)

Pada tabel 4.3 diketahui bahwa penduduk di Desa Karangpring dapat dikatakan masih berpendidikan rendah. Tercatat hanya 230 dari 9120 penduduk yang dapat meneruskan pendidikan mereka hingga keperguruan tinggi maka hanya 2,5% dari total seluruh warga Desa Karangpring. Bahkan, menurut tabel di atas penduduk dengan buta huruf usia 10 tahun diatas masih terbilang cukup banyak dan tepatnya terbanyak 32,4% dari 100% penduduk Desa Karangpring buta huruf. Penduduk tersebut mayoritas penduduk dengan usia dewasa. Berarti dapat dikatakan mereka dulunya tidak mengenyam pendidikan sama sekali dan bisa jadi mereka putus sekolah dulunya. Ini salah satu yang membuat peneliti tertarik meneliti pada bidang pendidikan masyarakat di Desa Karangpring khususnya pada pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di mana program tersebut bertujuan memberantas kebutaaksaraan atau angka buta huruf. Karena penduduknya yang masih memiliki angka tinggi dalam buta huruf.

Desa Karangpring dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup prospektif bagi perkembangan perekonomian wilayah tingkat desa. Sesuai

dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Karangpring masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai: penyedia bahan pangan, bahan baku produk olahan, peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Sumberdaya yang ada saat ini merupakan tolak ukur bagi desa untuk dilestarikan, sehingga menjadi potensi ekonomi yang unggul khususnya dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan meliputi: bunga mawar, padi, jagung, rambutan, lombok dan tanaman palawija lainnya.

Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Karangpring dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang yaitu sesuai dengan tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangpring

No	Uraian	Jumlah penduduk	Persentase
1	2	3	4
1.	Pertanian	1750 orang	19,2%
2.	Industri Pengolahan	143 orang	1,6%
3.	Konstruksi/Bangunan dan Perbengkelan	246 orang	2,7%
4.	Perdagangan, Rumah Makan,	169 orang	1,8%
5.	Jasa Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	174 orang	1,9%
6.	PNS, TNI, POLRI	8 orang	0,1%
7.	Buruh Tani dan lain-lain	5228 orang	57,3%
8.	WIRASWASTA	1402 orang	15,4%
	Jumlah	9120 Ng	100%

(Sumber data: Profil Desa Karangpring pada tahun 2013)

Dalam tabel tersebut dilihat bahwa masyarakat Desa Karangpring mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan terbanyak dari mereka bekerja sebagai buruh

tani. Masyarakat Desa Karangpring yang menjadi Warga Belajar kebanyakan juga bekerja sebagai buruh tani.

4.2 Program Keaksaraan Fungsional

Desa Karangpring adalah salah satu desa di Kabupaten Jember yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui program Keaksaraan Fungsional. Desa Karangpring telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional sejak tahun 2006. Hampir setiap tahun melaksanakan program tersebut melalui dana hibah yang diterima dari pengajuan proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur. Pengajuan dana berupa proposal tersebut dilakukan setiap tahun oleh penyelenggara program setiap tahunnya. Tetapi tidak setiap tahun dapat rutin dilaksanakan. Dikarenakan tergantung dari hasil pengajuan proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur dengan permohonan dana hibah program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar. Berikut informasi yang peneliti dapatkan dari oleh informan SG sebagai staf bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember:

“Iya, di Desa Karangpring dilaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Bapak NA yang memberi pengaruhnya. Tiap tahun mengakses program KF. Karena masyarakat buta huruf murni rawan buta huruf kembali.”

Selanjutnya informan NA selaku ketua penyelenggara program KF di Desa Karangpring yang sekaligus salah satu pengajar di YPPI Nurul Wajid menambahkan dan mendukung pernyataan dari informan SG, yaitu:

“Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring sudah sejak tahun 2006 dilaksanakan. Setiap tahunnya saya mengajukan sebuah proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur untuk permohonan dana hibah agar dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring. Namun tidak setiap tahun Desa Karangpring mendapat dana tersebut. Karena bergantian dengan Desa lainnya. Seperti di Desa Dukuhmencek dengan masih satu Kecamatan Sukorambi.”

Di Kecamatan Sukorambi ini terdapat dua desa lain yang juga melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Yaitu Desa Dukuhmencek dan Desa Klungkung. Sehingga, jika proposal permohonan dana hibah tersebut tidak membuahkan hasil itu artinya dana dialihkan kepada desa lain yang masih satu Kecamatan di Kecamatan Sukorambi. Dan juga penyelenggara program Keaksaraan Fungsional

di desa Karangpring tidak melakukan kegiatan program tersebut. Sehingga dampaknya tidak dapat melaksanakan kegiatan program tersebut. Namun, setiap tahunnya penyelenggara di Desa Karangpring ini selalu mengirimkan proposal. Informan NA sebagai ketua penyelenggara setiap tahunnya menyusun dan mengirimkan proposal untuk pengajuan dana hibah agar program tersebut dapat dilaksanakan. Pernyataan tersebut didukung oleh informan SG pada tanggal 11 April 2014 sebagai pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi yang juga staf Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Jember saat peneliti melakukan wawancara di UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, berikut ia mengatakan:

“Penyelenggara NA di Desa Karangpring setiap tahunnya selalu rajin mengajukan proposal pengajuan dana kepada Dinas Pendidikan Pusat Jawa Timur. Ya karena juga masyarakat buta huruf rawan buta huruf kembali jika tidak berlanjut”

Masyarakat buta huruf memang mudah buta huruf kembali karena disebabkan usia mereka yang umumnya sudah dewasa dan lanjut usia yang memiliki daya ingat lebih rendah daripada masa-masa sebelumnya (anak-anak dan remaja) khususnya usia lanjut (orang tua). Selain itu juga dikarenakan para orang dewasa telah memiliki prioritas lain yaitu berkeluarga dan bekerja, maka pendidikan dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan program Keaksaraan Fungsional lebih baik dilaksanakan berkelanjutan dan Desa Karangpring seperti yang diungkapkan para informan, bahwa telah melaksanakan hamper tiap tahunnya tergantung keputusan dana hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada sub-bab selanjutnya akan menjelaskan tentang penyelenggara program dan tempat dan waktu program KF di Desa Karangpring pada tahun 2013.

4.2.1 Penyelenggara Program

Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional disebut dengan pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional di tingkat desa dan kecamatan. Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring adalah salah satu yayasan pondok pesantren yang ada di Desa Karangpring yaitu,

Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) “Nurul Wajid”. Berikut penuturan hasil wawancara peneliti kepada informan NA sebagai ketua yayasan Nurul Wajid dan Ketua penyelenggara program KF pada tanggal 31 Agustus 2014:

“Ya saya ini sebagai ketua juga tutor. Terus adik saya Pak Nur Muniri sebagai bendahara dalam yayasan, tutor juga. Ada Herwan Lili sekretaris tetapi sekarang sudah pindah kerja di Jakarta, makanya untuk program kedepannya saya tidak memakai Pak Herwan lagi. Terus yang lain ada Bu Kholifah, Pak Taufik, dsb.. Jadi penyelenggara adalah pengurus yayasan Nurul Wajid ”

Dan pernyataan dari informan NM pada tanggal 4 September 2014:

“Pak NA dan saya penyelenggara dan juga merangkap jadi tutor Dek. Lebih jelasnya penyelenggara yayasan ponpes Islam Nurul Wajid. Yang diketuai oleh kakak saya Pak NA”

Lalu diperkuat oleh pernyataan dari informan SG sebagai staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang juga ditugaskan di UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi pada tanggal 11 September 2014:

“Penyelenggara di Desa Karangpring adalah yayasan pondok pesantren Nurul Wajid yang merupakan PKBM di desa tersebut. Karena bapak NA ia ketua penyelenggara adalah seseorang yang professional atau sebagai tokoh masyarakat di Desa tersebut. Ia mengetuai sebuah yayasan pondok pesantren, Nurul Wajid.”

Sesuai dengan penuturan informan NA dan NM, serta SG, penyelenggara program adalah pengurus yayasan, YPPI Nurul Wajid. Di dalamnya YPPI Nurul Wajid mengelolah pondok pesantren, MTs (Madrasah Tsanawiyah), Madrasah Diniyah, Masjid Nurul Wajid dan juga melaksanakan program Kejar (Kelompok Belajar) dan Keaksaraan Fungsional. Program Kejar atau Kelompok Belajar adalah jalur pendidikan nonformal yang difasilitasi oleh pemerintah yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Kejar memiliki tiga jenis, yaitu paket A (setara dengan SD), paket B (setara dengan SMP) dan paket C (setara dengan SMA). YPPI Nurul Wajid telah melaksanakan ketiga jenis Kejar tersebut beberapa kali dan meluluskan beberapa murid yang ada di Desa Karangpring.

Penyelenggara program merupakan pelaku perubahan pada masyarakat. Perubahan tersebut adalah perubahan menuju yang lebih baik, meningkatkan

kualitas hidup dan perkembangan masyarakat. Pelaku perubahan adalah orang atau badan yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka penyelenggara program di sini adalah pelaku pemberdayaan masyarakat. Seperti pada Bab 2 halaman 22 pelaku perubahan adalah sebagai pemercepat perubahan ataupun fasilitator. Sebagai fasilitator. Fasilitator lebih berfungsi untuk membuat agar kelompok sasaran menjadi lebih pandai sehingga nantinya mengembangkan kelompok mereka sendiri bila sudah tiba masanya program selesai. Maka, penyelenggara program Yayasan Pondok Pesantren Islam Nurul Wajid bisa juga disebut sebagai fasilitator pendidikan di Desa Karangpring.

Setiap yayasan memiliki susunan pengurus dan setiap pengurus memiliki tugasnya masing-masing dalam mengurus sebuah yayasan tersebut. Berikut susunan pengurus dan tugas-tugas pokok dari masing-masing bagian pengurus YPPI Nurul Wajid di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember:

1. Dewan Pembina
 - a. Melakukan pembinaan kepada pengurus
 - b. Menentukan dan mengangkat penguas dan pengurus
 - c. Melakukan perubahan ADART
 - d. Memberikan petunjuk kepada pengurus
 - e. Membubarkan yayasan
2. Dewan Penasehat
 - a. Memberikan nasehat atau pertimbangan kepada dewan pengurus
 - b. Memberikan pengawasan terhadap kinerja pengurus
 - c. Memberikan masukan serta nasehat kepada pengurus
3. Panitia Pelaksana
 - a. Ketua : Menentukan kebijakan yayasan dan membentuk perangkat yayasan
 - b. Sekretaris : Merekomendasikan segala bentuk keputusan, melaporkan kepada dewan Pembina, mengelolah yayasan dan program-program yayasan

- c. Bendahara : Mengelolah keuangan yayasan dan mencatat pemasukan dan pengeluaran kebutuhan yayasan
4. Sie. Pendidikan
 - a. Mengelolah bidang pendidikan
5. Sie. Koperasi dan Usaha
 - a. Mengelolah kegiatan usaha yayasan yang berupa koperasi dan usaha lain.
6. Sie. Perlengkapan
 - a. Mengelolah kesertaadaan dan kebutuhan perlengkapan yayasan khususnya kesekretariatan
7. Sie. Humas
 - a. Melakukan komunikasi dengan pihak luar atau masyarakat kaitannya dengan program yayasan

Untuk susunan nama-nama pengurus lebih lengkapnya pada *lampiran 4*.

4.2.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program

Ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional adalah (Bab 2, halaman 14) bahwa waktu dan jadwal pertemuan sebaiknya tidak hanya ditentukan oleh penentu kebijakan atau pemberi dana saja, namun harus sedapat mungkin disesuaikan dengan cara kerja dan waktu luang warga belajar dan tempat pertemuan sebaiknya yang dapat menyenangkan warga belajar untuk belajar. Tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring adalah mushola-mushola terdekat. Lokasinya berada di tengah-tengah para warga belajar, sehingga memudahkan para warga belajar untuk datang ke tempat pembelajaran. Mushola yang digunakan total berjumlah sepuluh mushola yang berada di Desa Karangpring. Berikut penjelasan dari informan NA dan NM tentang tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Keaksaraan Dasar tahun 2013:

Informan NA pada tanggal 31 Agustus 2014 :

“Tempatnya kalau tahun 2013 kemarin ada di 10 tempat. Yang pertama di Mushola As-Syafiq ini kebetulan di mushola saya ini, terus ada mushola As-Sabil, ada mushola An-Nur, dsb.. Ada 10 mushola dan 10 tutor. Dan tiap kelompok berbeda tempatnya. Ya sesuai kebutuhan warga belajar di mana

yang paling tengah, paling dekat dan paling enak bagi warga belajar itu. Rata-rata kita ada di mushola.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan NM pada tanggal 4 September 2014 di kediaman NM sendiri, yaitu:

“Berhubung ada sepuluh kelompok itu rata-rata di mushola semua. Kan kalau di sini itu kebanyakan dari dulu di mushola. Kebetulan kalau di desa itu di setiap halaman rumah itu ada mushola. Di sini aja itu di sebelah ada mushola karena itu juga sebagai tempat untuk kegiatan hataman, yasinan, kalau ada orang meninggal juga tahlilan. Kalau di jalan sebelah barat ini kira-kira 1 km jalan itu sudah ada sepuluh mushola hehe. Ada satu apa dua kelompok itu di masjid karena dekat masjid, di emperan masjidnya itu.”

Lalu diperkuat oleh pernyataan informan SM sebagai salah satu warga belajar pada tanggal 7 September 2014:

“Ya dulu, setahun yang lalu. Di mushola sana dekat rumah.”

Dari penjelasan ketiga informan pokok tersebut dijelaskan bahwa tempat kegiatan belajar mengajar program Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada Tahun 2013 dilaksanakan di sepuluh mushola yang terpencar di Desa tersebut. Setiap mushola hanya digunakan oleh satu kelompok saja. Mushola di desa tersebut biasa digunakan warga Desa Karangpring untuk berkumpul dalam sebuah kegiatan rutin seperti pengajian, hataman Al-Qur'an dan lain sebagainya. Dan juga letaknya yang dekat dengan rumah warga Desa Karangpring sehingga memudahkan para warga belajar untuk datang belajar. Penentuan tempat kegiatan program yang ditentukan di mushola-mushola di Desa Karangpring ini merupakan strategi yang tepat dikarenakan mementingkan jarak rumah warga belajar dengan mushola yang dekat. Selain agar memudahkan warga belajar ketika datang belajar juga dapat disaksikan oleh warga lainnya agar warga belajar lebih termotivasi belajar karena telah mendapat dukungan dari warga lainnya. Adanya semangat dan motivasi para warga belajar mempengaruhi keberhasilan pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring.

Penentuan tempat untuk melaksanakan pembelajaran Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring tersebut sesuai dengan prinsip pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (pada Bab 2 halaman 14) yaitu desain lokal. Desain lokal

merupakan proses pembelajaran yang melibatkan minat dan kebutuhan warga belajar yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok. Dalam memilih tempat pada mushola-mushola terdekat tersebut penyelenggara berhasil menarik minat dan menyesuaikan kebutuhan warga belajar di Desa Karangpring. Suatu program pemberdayaan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan sasaran program tersebut. Sesuai dengan penuturan Kusnadi (pada Bab 2 halaman 24), salah satu cirri-ciri yang dapat dilakukan dalam pembelajaran agar terjadi proses pemberdayaan dalam program Keaksaraan Fungsional adalah *need oriented*, yaitu pendekatan yang berorientasi dan didasarkan pada kebutuhan warga belajar. Maka kegiatan pembelajaran berjalan sesuai harapan program, yaitu tempat belajar sebaiknya yang dapat menyenangkan warga belajar untuk belajar dan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. Mushola juga sebagai tempat kegiatan rutin seperti istigosah oleh warga desa Karangpring sehingga penyelenggara juga memanfaatkan tempat tersebut agar warga belajar di Desa tersebut senang dan semangat belajar Calistung. Seperti yang diungkapkan informan SH sebagai salah satu warga belajar di Desa Karangpring pada tahun 2013 yang merasa nyaman dan baik belajar di mushola merasa sudah terbiasa di mushola tersebut sehingga merasa dapat belajar dengan baik. Berikut pernyataan informan SH:

“Iya sekolah di mushola sini. Di mushola baik dan nyaman. Sudah tempat biasa kumpul jadi nyaman”

Waktu pelaksanaan program Keaksaraan Dasar tahun 2013 di Desa Karangpring tepatnya dimulai pada tanggal 25 Agustus hingga 15 Desember 2013. Maka, pelaksanaan belajar mengajar berkisar tiga bulan setengah dengan total 60 kali pertemuan atau setara dengan 120 jam. Sedangkan waktu pembelajaran berlangsung pada malam hari sesuai kesepakatan warga belajar dengan tutor, karena pada siang harinya para warga belajar banyak yang bekerja di sawah, ladang dan tempat-tempat lain, sehingga tidak memungkinkan proses belajar mengajar dilaksanakan pada siang hari. Kegiatan belajar mengajar dilakukan empat kali dalam seminggu. Berikut pernyataan oleh informan NA

sebagai ketua penyelenggara program dalam sebuah wawancara pada tanggal 31 Agustus 2014:

“Kalau kemarin itu acuannya bukan selama 6 bulan tetapi 120 jam pertemuan. Sekali pertemuan itu 2 jam. Seminggu biasanya ada 4 kali atau 3 kali. Itu terhitung dari 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 harus 120 jam. Itu ketentuan sejak 2012 lalu.”

Dari pernyataan informan NA diketahui bahwa program Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari informan SG selaku staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang juga staf UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. Berikut informasi dari informan SG pada tanggal 11 September 2014:

“Untuk jam belajar mulai tahun 2012 proses pembelajaran tidak lagi selama 6 bulan akan tetapi menggunakan jumlah jam minimal 114 jam. Seluruhnya di Kecamatan Sukorambi dan khususnya di Desa Karangpring telah mengikuti perosedur tersebut dengan minimal 114 jam pada tahun 2013 lalu.”

Pernyataan dari informan SG tersebut sesuai dengan standar kompetensi Keaksaraan Dasar (pada Bab 2) yaitu, pembelajaran keaksaraan dasar dilakukan berdasarkan konteks pembelajaran (latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar) dengan mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar setara 114 jam @60 menit).

Gambar 4.1

Salah satu Mushola tempat kegiatan belajar mengajar program KF di Desa Karangpring



Sumber : data penulis, 2014.

4.3 Implementasi Program Keaksaraan Fungsional

Peneliti telah mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan. Data tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan. Kesimpulan yang didapat dari kedua bentuk data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian hasil pembelajaran.

4.3.1 Tahap Persiapan

Dalam memulai suatu program agar program tersebut berjalan sesuai yang diharapkan dan tercapai tujuannya maka perlu adanya persiapan dan perencanaan yang matang strategis dari penyelenggara program tersebut. Sama halnya dengan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring yang dilaksanakan sejak tahun 2006. Peneliti telah mengumpulkan dari data dan fakta yang telah di dapat bahwa dalam tahap persiapan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring telah dilakukan sejak tahun 2006. Peneliti mendapatkan data melalui wawancara dengan informan NA sebagai penyelenggara sejak 2006 di Desa Karangpring dan SG sebagai informan tambahan yang memperkuat pernyataan informan NA. Hal ini informan NA pada mengatakan bahwa

“Program KF atau Keaksaraan Fungsional itu kita Yayasan Nurul Wajid melaksanakan sejak tahun 2006 berawal dari orang UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorambi untuk melaksanakan program ini, akhirnya dari desa lalu desa menunjuk ke yayasan ini. Artinya bukan menunjuk tapi cuma memberi tahu bahwa di situ ada yayasan pondok pesantren. Lalu akhirnya bertemulah dengan saya. Setelah ketemu bahwa saya disuruh membuat proposal diajukan kepada dinas pendidikan kabupaten. Akhirnya kami hampir setiap tahun diberi amanah atau tugas untuk melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintahan terkait. Entah dari pemerintah desa maupun UPT Pendidikan Sukorambi. Dan itu saya tidak sendirian tapi ada empat penyelenggara di Kecamatan Sukorambi, penyelenggara yang pertama yaitu Yayasan Nurul Wajid, yang kedua Yayasan Wali Songo Desa Dukumencek terus yang ketiga Yayasan Nurul Jadid Desa Klungkung, keempat Yayasan Al-Multakam di Desa Klungkung juga. Tapi mulai tahun 2013 kemarin bertambah lagi penyelenggaranya yaitu, Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukorambi yang diketuai langsung oleh Bu Camat. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang jelas kami yang awalnya tidak

tahu lalu kami diberi tahu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari tingkat Kabupaten sampai provinsi bahkan pusat. Kita selalu diikuti, bahkan lebih dari itu kami juga diberi bagian melaksanakan program yang lain. Contohnya, Kesetaraan. Kesetaraan itu mulai paket A, paket B, paket C kita bisa melaksanakan itu semua. Dan Alhamdulillah selama ini sudah meluluskan beberapa orang siswa untuk di Yayasan Nurul Wajid. Ya begitu ceritanya.”

Lalu diperkuat dengan informan SG sebagai staf Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan juga sebagai staf UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi pada tanggal 11 September 2014:

“Awal mula pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring karena adanya sosialisasi petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi dalam hal ini adalah penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan Tenaga Lapangan Dinas (TLD). Program yang disosialisasikan antara lain program Keaksaraan Fungsional, program pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C), pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan program TBM (Taman Baca Masyarakat). Dari sosialisasi tersebut mengingat banyaknya buta huruf yang ada di wilayah Desa Karangpring maka YPPI Nurul Wajid yang dalam hal ini ketuanya adalah Bapak Nur Ali menindak lanjuti sosialisasi tersebut kepada UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi untuk memberi laporan dan konsultasi tentang pelaksanaan program KF dari situlah maka dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi lembaga tersebut maka sejak tahun 2006 yayasan melaksanakan program KF tersebut.”

Menurut pernyataan dari kedua informan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan program KF di Desa Karangpring telah dilakukan sejak tahun 2006. Hampir tiap tahun dapat terlaksana. Di Kecamatan Sukorambi telah melaksanakan program KF pada tiga desa, yaitu Desa Karangpring, Desa Dukuhmencek dan Desa Klungkung. Penjelasan tersebut juga menjelaskan bahwa petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi tepatnya petugas PLS (Pendidikan Luar Sekolah) mensosialisasikan beberapa program. Di Desa Karangpring tepatnya Yayasan Nurul Wajid telah melaksanakan program Kesetaraan juga, yakni pendidikan paket A, B dan C, namun hingga sekarang Yayasan belum melaksanakan pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan TBM (Taman Baca Masyarakat).

Kegiatan persiapan yang dilakukan YPPI Nurul Wajid yang diketuai oleh informan NA dimulai dari yang *pertama*, yaitu musyawarah dengan UPT

Pendidikan Kecamatan Sukorambi. *Kedua*, mempersiapkan Warga Belajar dan tutor. *Ketiga*, pendekatan kepada warga belajar. Dan *keempat*, pengajuan proposal. Ini seperti yang telah Ketua Penyelenggara katakan saat proses wawancara dengan peneliti pada tanggal 16 Agustus 2014, informan NA mengatakan bahwa:

“Yang pertama dilakukan mengumpulkan Warga Belajar itu dengan mengajak siapa saja warga yang masih buta huruf. Lalu setelah terkumpul dan di data ada berapa yang mau menjadi calon Warga Belajar, kita membuat proposal untuk pengajuan dana anggaran program ke Dinas Pendidikan provinsi. Setelah mendapatkan dana tersebut kita laksanakan program tersebut.”

Selanjutnya, informan NA melanjutkan pernyataannya pada tanggal 31 Agustus 2014, bahwa:

“Dari awal kalau kemarin yang tahun 2013 kita laksanakan sebagaimana biasanya. Pertama adalah kita bermusyawarah bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah UPT Pendidikan Sukorambi bersama dengan para pengurus Yayasan bahwa kita laksanakan program KF akhirnya disitu diadakan identifikasi warga belajar. Artinya siapa saja yang belum bisa membaca menulis. Termasuk identifikasi kita itu kepada tutor. Artinya siapa saja tutor yang mengajar dan siap. Setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan sebagaimana identifikasi sebelumnya soal warga belajar, tutor, juga anggarannya. Karena pendidikan ini memang harus bermusyawarah dengan warga belajar tanpa dengan WB kita bakal kesulitan. Ya karena muridnya para orang tua, maka musyawarah dimana, waktunya kapan, jam berapa dsb. Dan selanjutnya mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Provinsi hingga mendapat kepastian dapat tidaknya dana dari sana”/

Informan NM melanjutkan, pada tanggal 4 September 2014, bahwa:

“Ini sepengetahuan saya, selebihnya Pak NA yang lebih paham. Awalnya ya mengajukan proposal ke Diknas terus setelah itu biasanya ya dikasih atau tidak. Namanya pengajuan ya mbak. Kalau di acc ya biasanya dapat program itu lah. Lembaga kami atau yayasan kami dapat program. Kalau dapat ya dijalankan program itu selama enam bulan. Selama enam bulan itu tutor-tutor yang bekerja gitu. Yang mengajar. Warga Belajar awalnya mencari lalu diajak belajar kalau sudah ada kita jalankan program. Karena tidak bisa mengikutkan warga belajar yang sudah selesai. Bisa tetapi dalam rentan waktu yang lama karena memang ya begitu, mereka bisa saja buta huruf kembali. Apalagi sekarang tidak semudah dulu-dulu. Kalau sekarang kan Dinas Pendidikan meminta dengan nomer induk kependudukan warga. Jadinya jelas artinya tidak ada ketumpang tindihan kalau sekarang. Setelah dijalani tutor-tutornya

mengikuti pelatihan, istilahnya pembekalan lah. Dalam satu lembaga biasanya satu dua yang mengikuti.”

Menurut informan NM tersebut dapat dijelaskan bahwa informan NA lebih memahami perihal tahapan yang dilakukan saat awal proses pelaksanaan program KF di Desa Karangpring pada tahun 2013. Karena informan NA yang juga sebagai ketua penyelenggara bertugas dalam memulai melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Oleh karena itu, tahap persiapan dimulai dari yang *pertama*, musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi. *Kedua*, mempersiapkan Warga Belajar dan tutor. *Ketiga*, pendekatan kepada warga belajar. Dan *keempat*, pengajuan proposal. Berikut penjelasan lebih detailnya:

1.) Musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi

Sesuai dengan prosedur tahapan kegiatan Keaksaraan Dasar (Bab 2 halaman 19), yakni sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Musyawarah dengan UPT Pendidikan Sukorambi merupakan tahap koordinasi bersama untuk memulai pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring. Musyawarah bersama penyelenggara program YPPI Nurul Wajid dengan dinas yang terkait yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi merupakan tahap persiapan yang penting agar program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Ketika program tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka, proses pemberdayaan berlangsung lancar sehingga tercipta tujuan meningkatkan kesejahteraan warga buta huruf di Desa Karangpring. Seperti yang telah dikemukakan oleh informan NA sebagai ketua penyelenggara program dalam sebuah wawancara pada tanggal 31 Agustus 2014 di kediamannya, ia mengemukakan bahwa:

“Dari awal kalau kemarin yang tahun 2013 kita laksanakan sebagaimana biasanya. Pertama adalah kita bermusyawarah bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah UPT Pendidikan Sukorambi bersama dengan para pengurus yayasan bahwa kita laksanakan program KF akhirnya disitu diadakan identifikasi warga belajar. Artinya siapa saja yang belum bisa membaca menulis. Termasuk identifikasi kita itu kepada tutor. Artinya siapa saja tutor yang mengajar dan siap. Setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan sebagaimana identifikasi sebelumnya soal warga belajar, tutor, juga anggarannya. Karena pendidikan ini memang harus bermusyawarah dengan warga belajar tanpa dengan WB

kita bakal kesulitan. Ya karena muridnya para orang tua, maka musyawarah dimana, waktunya kapan, jam berapa dsb..”

Pertanyaan tersebut diperkuat dengan pernyataan informan SG selaku petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi yang juga sebagai staf bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 11 September 2014:

“Setiap awal mula tiap tahunnya dilaksanakannya program Keaksaraan Fungsional baik di Desa Karangpring karena adanya sosialisasi petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi dalam hal ini adalah penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan Tenaga Lapangan Dinas (TLD)..”

Tujuan diadakan musyawarah bersama ini adalah membicarakan rencana penyelenggara program tentang program yang akan dilaksanakan dan UPT Pendidikan berperan dalam mengawasi program tersebut. Tahap ini akhirnya dari penyelenggara beserta staf UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi mengidentifikasi warga buta huruf yang akan menjadi penerima manfaat program ini dan juga penentuan tutor yang tepat untuk pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tersebut. Musyawarah bersama penyelenggara program YPPI Nurul Wajid dengan dinas yang terkait yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi merupakan tahap persiapan yang penting karena terdapat pihak yang mengawasi dan mendukung berjalannya program dari awal hingga program tersebut selesai. Maka, saat program berlangsung pada bulan Agustus hingga Desember tersebut petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi yang mengawasi dan siap menerima laporan hasil kegiatan program dari penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara juga bertugas memberi laporan dan konsultasi tentang pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring. Sehingga program berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat memberdayakan warga yang buta huruf di Desa Karangpring. Hal ini sesuai dengan komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional, yaitu dukungan yang proaktif (Bab 2, halaman 34). Bahwa bentuk musyawarah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi ini adalah bentuk adanya dukungan yang proaktif, di mana instansi lembaga yang terkait berwenang

melakukan pengawasan, monitoring, motivasi dan menerima laporan hasil berjalannya program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring.

2.) Mempersiapkan Warga Belajar dan Tutor

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan calon Warga Belajar dan Tutor. Mempersiapkan calon warga belajar terdapat ketentuan-ketentuan secara umum dalam menentukan calon warga belajar atau sasaran program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar, ketentuan tersebut menurut laporan akhir hasil pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013, berikut ketentuannya:

1. Warga masyarakat yang belum memiliki kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis dan berhitung
2. Warga masyarakat yang tidak mampu meningkatkan kemampuan fungsionalnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
3. Warga masyarakat yang tidak mampu bersosialisasi dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi karena terbatasnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Selain itu dengan mempersiapkan warga belajar dengan cara mengidentifikasi. Identifikasi tersebut bertujuan menyeleksi siapa saja masyarakat buta huruf di desa tersebut yang berhak menerima pengajaran calistung dalam Keaksaraan Dasar. Yang berhak adalah siapa saja yang masuk dalam kriteria yang sudah ada dalam ketentuan. Seperti yang dikutip peneliti dalam Tinjauan Pustaka bahwa sasaran atau penerima manfaat layanan Keaksaraan Dasar adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara parsial).

Selanjutnya dilakukan proses mendata siapa saja masyarakat buta huruf di Desa Karangpring. dalam hal ini, terdapat ketentuan yang harus diikuti penyelenggara program. Sejak tahun 2012 terdapat ketentuan atau ketetapan baru dalam menentukan warga belajar. Maka, sejak tahun 2013 dalam melaksanakan program Keaksaraan Fungsional harus mengikuti ketetapan yang baru tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 dalam latar belakang, ketetapan tersebut adalah dalam menentukan calon Warga Belajar para penyelenggara harus

menggunakan data buta huruf dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Karena masyarakat buta huruf yang masih terbilang banyak, maka mendahulukan yang buta huruf murni (parsial) dan belum pernah menjadi warga belajar dalam program Keaksaraan Fungsional. Fungsinya untuk pemerataan penerima manfaat program sehingga semua dapat belajar dan bisa calistung juga yang paling diharapkan mereka dapat memanfaatkan ilmu yang mereka peroleh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi warga belajar yang telah mengikuti program dan dinyatakan lulus telah berkurang di dalam data BPS tersebut. Oleh karena itu ketentuan baru tersebut dimunculkan sejak 2012. Hal tersebut diperkuat oleh informan SG dari Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 11 September 2014 tentang pelaksanaan program KF adalah sebagai berikut:

“Bahwa dalam pelaksanaan program KF sasaran program sejak tahun 2012 tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sasaran Warga Belajar KF menggunakan data Buta Huruf dari BPS Kabupaten Jember. Namun demikian, tidak dari semua buta huruf yang ada di data BPS tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) bahwa sasaran buta huruf itu berusia 15-59 tahun. Kemudian, klasifikasi buta huruf menurut versi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah penduduk yang buta huruf murni atau dengan kata lain bahwa bagi masyarakat atau penduduk yang tidak punya ijazah SD tetapi bisa Calistung, maka dikategorikan tidak termasuk sasaran buta huruf, walaupun usianya 15-59 tahun.”

Informan NA mengatakan hal yang sama tentang perubahan ketentuan sejak tahun 2012. Ia mengemukakan bahwa:

“Mulai tahun 2012 sebelum melaksanakan program harus sesuai data BPS terlebih dahulu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, warga belajar saya tentukan sendiri. Dengan mencari warga buta huruf di Desa Karangpring.”

Selanjutnya menentukan para calon tutor. Jumlah tutor mengikuti jumlah calon Warga Belajar. Jumlah Warga Belajar terdata 100 warga, maka penyelenggara menentukan 10 tutor karena dalam masing-masing kelompok minimal berjumlah 10 Warga Belajar. Berikut daftar calon tutor Tahun 2013 dalam sebuah lampiran pada proposal pengajuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi:

Tabel 4.4 Daftar Calon Tutor Program KF Di Desa Karangpring Tahun 2013

NO	NAMA TUTOR	Jenis Kelamin		Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Ijazah Terakhir	KET
		L	P				
1	NA	L		Jember	9/13/1971	S2	
2	NM	L		Jember	1/15/1985	S1	
3	TF	L		Jember	2/10/1986	S1	
4	SK		P	Jember	6/10/1986	SMA	
5	ZL	L		Jember	3/2/1989	SMA	
6	AK	L		Jember	6/14/1989	SMA	
7	AA	L		Jember	6/3/1955	SMA	
8	KH	L		Jember	4/4/1962	SMA	
9	SY	L		Jember	30/2/1986	SMA	
10	IS	L		Jember	4/6/1977	SMA	

(Sumber Data: Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban dana bantuan program pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2013)

Dalam tabel tersebut, tertulis bahwa informan NA yang sebagai ketua penyelenggara dan juga informan NM yang sebagai bendahara juga merangkap tugas sebagai tutor. Informan NA dan NM merangkap menjadi tutor karena latar belakang mereka yang memang berprofesi sebagai guru, ahli dalam bidang mengajar. Penyelenggara informan NM dan NA yang merangkap tugas selain menjadi penyelenggara tetapi juga tutor tidak menghambat pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring. pelaksanaan program tetap berjalan hingga selesai. Sesungguhnya, informan NA yang juga sebagai tokoh masyarakat tersebut memudahkan jalannya program karena sudah dianggap orang terpercaya di Desa Karangpring. Hal ini menurut informasi dari UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi bahwa ketua penyelenggara di Desa Karangpring adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa tersebut, yakni NA. Disebut tokoh masyarakat di Desa Karangpring juga karena dia sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) "Nurul Wajid". Memilih tutor tokoh masyarakat di Desa Karangpring adalah salah satu strategi yang digunakan penyelenggara agar calon Warga Belajar bersedia belajar hingga mereka memiliki kemampuan calistung. Hal

tersebut bentuk perencanaan yang strategis oleh penyelenggara (Bab 2, halaman 31). Dan juga penyelenggara dapat melihat karakteristik warga belajar Desa Karangpring (Bab 2, halaman 32) yang memiliki kepercayaan yang tinggi pada tokoh masyarakat di Desa Karangpring. Berikut penuturan informan SG sebagai pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, ia mengemukakan bahwa:

“Ketua penyelenggara di Desa Karangpring adalah sebagai seorang yang profesional atau disebut tokoh masyarakat. Dengan memilih seorang yang profesional juga sebagai tokoh masyarakat maka akan lebih muda mengajak warga buta huruf di sana untuk mau belajar.”

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional, terdapat komponen implementasi program KF, pelatihan yang efektif (Bab 2, Halaman 31) untuk mengembangkan dan mensosialisasikan program Keaksaraan Fungsional, kiranya tidak salah jika meningkatkan dulu mutu unsur-unsur pelaksanaannya. Karena syarat pertama dalam pengembangan program membutuhkan sumber daya manusia yang selain cukup dan cakap, juga mempunyai kualitas yang memadai. Penyelenggara program KF di Desa Karangpring khususnya informan NA dan NM telah di beri pelatihan pada tahun 2010, yaitu pelatihan untuk para tutor. Namun, untuk para tutor program KF di Desa Karangpring tahun 2013 tidak diberi pelatihan terlebih dahulu. Akan lebih baik jika para tutor tersebut diberi pelatihan terdahulu agar hasil akhirnya dapat mengembangkan dan mensosialisasikan program KF di masyarakat lebih efektif. Berikut informan NA menjelaskan tentang pelatihan tutor pada tanggal 31 Agustus 2014:

“Dulu ada pelatihan untuk tutor, saya dan Pak NM yang pernah mengikuti pelatihan tersebut. Pada tahun 2010, yang mengadakan adalah dari Diknas sendiri untuk calon tutor program KF di Jember. Pelatihan tersebut calon tutor diajarkan mempelajari teknik-teknik pembelajaran dan pengelolaan kelompok belajar.”

Maka, dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggara program di Desa Karangpring dalam tahap persiapan program telah mengikuti ketentuan yang telah diberikan. Dan tercatat jumlah calon warga belajar 100 Warga Belajar yang bersedia mengikuti kegiatan belajar tersebut. Dengan total 78 Warga Belajar perempuan dan 22 Warga Belajar laki-laki. Dan jumlah

calon tutor adalah 10 tutor termasuk NA sebagai ketua penyelenggara dan NM yang merangkap sebagai tutor.

3.) Pendekatan Kepada Warga Belajar

Dalam program Keaksaraan Fungsional ini umumnya Warga Belajar adalah masyarakat dewasa. Setelah mendapatkan data para warga buta huruf dari data BPS pada tahun 2012, penyelenggara program bermusyawarah kepada tutor-tutor yang juga sebagai tokoh masyarakat di Desa Karangpring untuk mengajak juga warga belajar dengan melakukan pendekatan kepada warga belajar agar berminat dan mau belajar Keaksaraan Dasar. Namun, mengajak para warga buta huruf untuk belajar yang umumnya para orang tua atau orang dewasa tidaklah mudah, karena mereka yang sudah bekerja dan memiliki keluarga lebih memilih bekerja daripada belajar. Ini juga diungkapkan oleh salah satu tutor SJ yang mendapat kesulitan ketika melakukan pendekatan kepada warga belajar:

“Ya yang pertama itu agak repot, agak susah juga yak karena kan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya agak susah untuk mengumpulkannya. Masalahnya kan orang yang tidak pernah belajar itu malas untuk mau belajar. Jadinya saya mencari akal gimana untuk bisa mengumpulkan warga belajar. Ya caranya ya disuruh kumpul di mushola. Kebetulan saya ada jamaah di sana. Tiap malam rabu ada istigosah yang di dalamnya ada sekitar 20 orang, ya saya cari sekitar 5 orang yang benar-benar tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Akhirnya bisa terkumpul dan berjalanlah.”

Tidak hanya itu, para penyelenggara juga mempersiapkan strategi agar mereka mau datang untuk belajar selama waktu yang telah direncanakan. Strategi yang dipersiapkan oleh para penyelenggara dan tutor di Desa Karangpring adalah mencari suatu yang dibutuhkan warga pada saat itu lalu memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya membelikan paralon di salah satu Dusun karena pada saat itu warga mengalami masalah pada air di desa maka penyelenggara memenuhi kebutuhan paralon tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh informan NA pada saat diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 31 Agustus 2014, ia mengemukakan bahwa:

“Jadi begini, itu harus ada stimulusnya. Kenapa begitu? Karena memang tidak mudah mengajak mereka belajar pasti malas. Mereka mikirnya kerja. Jadi saya

belikan paralon waktu itu karena waktu itu memang lagi ada masalah air di sini. Sehingga mereka mau belajar. Kalau tidak begitu tidak mau.”

Selanjutnya informan NA menambahkan, bahwa:

“Iya, harus ada stimulusnya. Ada salah satu tutor yang di Durjo membelikan mie ketika kelas itu hehe. Ya agar mereka semangat datang dan belajar.”

Adapun informan KH menjelaskan bahwa ia mengajak warga belajar dengan memanfaatkan kegiatan rutin muslimatan untuk penentuan waktu belajar mengajar dengan warga belajar. Serta ia juga memberikan sesuatu kepada mereka, yaitu membangun sebuah gudang berisi peralatan kebutuhan warga ketika ada acara kematian dan pernikahan. Dana pembangunan gudang penyimpanan tersebut sebagian dari honor KH menjadi tutor. Berikut penjelasan informan KH pada tanggal 8 Desember 2014:

“Jadi ketika di acara rutin muslimatan, saya mengumumkan ini ada program khusus untuk menghilangkan buta huruf maka diharapkan untuk ikut. Yang pertama karena samean (ke warga) ingat ibadah. Orang cari ilmu itu satu huruf pahalanya besar. Jadi warga mau belajar. Akhirnya beberapa sudah bisa membaca.”

Selanjutnya informan KH menambahkan, bahwa:

“Ya setelah pengumuman di acara muslimatan itu. Lalu saya juga bilang kalau ada belajar membaca ini mereka bukan diberi uang tapi kita bangun RKK semacam gudang penyimpanan barang-barang seperti piring gelas dan katil (keranda mayat) untuk acara-acara di RT sini. Ya saya bilang samean (warga belajar) tidak saya beri uang langsung. Kebetulan juga tempat gudang penyimpanan di sini belum ada, waktu itu jadi langsung saya bikin. Juga dengan menyisihkan hasil mengajar jadi tutor. Jadi warga ya mau. Sama seperti Pak NA di sana warga diberikan paralon karena butuh paralon. Ya yang penting buat kebaikan. Dulu juga diberi hadiah dari Pak NA itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Diberi open buat kue (alat membuat kue). Jadi langsung masuk dalam gudang penyimpanan.”

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat harus melihat dari seluruh kondisi sasaran penerima manfaat pemberdayaan, dari melihat kebutuhannya hingga hasil yang diharapkan (*output*).

Gambar 4.2**Gudang Penyimpanan yang Bersebelahan dengan Rumah Informan Tutor KH di Dusun Gendir Desa Karangpring**

Sumber : data penulis, 2014

Warga di Desa Karangpring tersebut masih memiliki pemikiran bahwa lebih baik mementingkan kepentingan keuntungan mereka. Seperti yang tertera pada pada Bab 2 halaman 29, bahwa sasaran program KF dapat dipastikan akan lebih mengutamakan perut daripada belajar calistung (keaksaraan). Ini adalah salah satu hal yang wajar, ini adalah dampak dari warga yang dulunya berpendidikan rendah bahkan belum pernah mengenyam pendidikan. Namun disitu penyelenggara berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan strategi memberikan apa yang warga belajar butuhkan. Upaya ini salah satu pendorong keberhasilan para penyelenggara dan tutor agar warga belajar berminat untuk belajar calistung. Implementasinya, agar pengelolaan kelompok belajar Keaksaraan Fungsional, dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, paling tidak ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, salah satunya karakteristik warga belajar (Bab 2: halaman 30). Para penyelenggara dan tutor di Desa Karangpring dapat membaca karakter warga belajar di desa mereka. Membaca karakter warga belajar merupakan salah satu komponen yang mendorong program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring berjalan dengan lancar. Dapat dijelaskan dalam hal ini, penyelenggara dan tutor program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 telah memperhatikan betul agar pendekatan kepada

warga belajar yang mereka lakukan sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar.

Informan SM adalah salah satu Warga Belajar program Keaksaraan Fungsional pada tahun 2013 juga mengemukakan bahwa para penyelenggara memberikan para Warga Belajar kebutuhan Warga Belajar seperti, peralatan memasak dan juga berupa uang. SM menjelaskan bahwa peralatan masak tersebut digunakan saat pelaksanaan kegiatan keterampilan (praktek). Berikut penjelasan informan saat wawancara pada tanggal 7 September 2014:

“Iya, mengajaknya kalau ingin bisa menulis dan membaca mari sekolah dengan saya, ikut sekolah tributa gitu kata NA. Ya ada diberi barang-barang bahan praktek. Kayak kompor, pengukus, dandang saat praktek. Kadang diberi uang juga.”

Namun demikian, tak semua warga belajar di Desa Karangpring memiliki minat dan keinginan untuk belajar karena diberi sesuatu oleh penyelenggara, akan tetapi ada juga warga belajar yang memang ingin belajar agar dapat membaca, menulis dan berhitung. Mereka memiliki kemauan dan semangat untuk belajar. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa Warga Belajar saat wawancara, yaitu informan AR dan SM saat diberi pertanyaan tentang alasan mengapa bersedia belajar dan menjadi Warga Belajar. Mereka menjawab karena keinginan mereka sendiri untuk belajar calistung. Berikut jawaban dari informan SM :

“Yaa karena saya pingin membaca menulis itu. Ingin tahu baca tulis, bukan karena uang bukan karena keadaan perabotan itu. Karena saya memang ingin baca tulis itu. Ingin menambah ilmu”

Berikut jawaban dari informan AR :

“Karena belum bisa membaca. Ya karena dulu tak bisa sekolah hehe. Seneng terus bisa belajar”

Kedua informan tersebut memiliki kemauan mereka sendiri untuk belajar agar dapat membaca, menulis dan berhitung melalui program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring. adanya warga belajar seperti SM dan AR. Maka total Warga Belajar program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar pada Tahun 2013 adalah berjumlah 100 Warga Belajar, 80 Warga Belajar perempuan dan 20

Warga Belajar laki-laki. Hasil lebih lengkap terkait dengan data Warga Belajar pada Tahun 2013 dapat dilihat dalam *Lampiran (5)*.

4.) Pengajuan Proposal

Tahap terakhir dari persiapan program KF tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring adalah menyusun sebuah proposal untuk pengajuan dana hibah Keaksaraan Dasar kepada Gubernur Jawa Timur. Tahapan ini adalah penentuan dilaksanakannya program KF di Desa Karangpring karena menunggu kepastian diberi atau tidaknya oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Proposal tersebut diajukan pada September 2012 dan kegiatan dilaksanakan setahun kemudian, yakni dari 25 Agustus 2013 hingga 15 Desember 2013. Berikut pernyataan informan NA pada 16 Agustus 2014:

“..Lalu setelah terkumpul dan di data ada berapa yang mau menjadi calon Warga Belajar, kita membuat proposal untuk pengajuan dana anggaran program ke Dinas Pendidikan provinsi. Setelah mendapatkan dana tersebut kita laksanakan program tersebut.”

Selanjutnya informan NM menguatkan pernyataan tersebut pada tanggal 4 September 2014:

“Awalnya ya mengajukan proposal ke Diknas terus setelah itu biasanya ya dikasih atau tidak. Namanya pengajuan ya mbak. Kalau di acc ya biasanya dapat program itu lah. Lembaga kami atau yayasan kami dapat program..”

Dari kalimat analisa menjelaskan bahwa proposal tersebut sebagai syarat bagi pelaksanaan kegiatan program Keaksaraan Fungsional. Diterima tidaknya proposal tersebut berdampak besar dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring karena tanpa adanya dana, suatu program tidak akan berjalan.

Dapat disimpulkan bahwa, tahap persiapan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring tahun 2013 menunjukkan tahap perencanaan yang disiapkan dengan matang dan strategis oleh para penyelenggara, YPPI Nurul Wajid. Hal tersebut dilakukan agar program berjalan sesuai harapan keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tahun 2013. Maka, ini sesuai dengan komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional yakni, perencanaan strategis. Bentuk perencanaan

strategis terlihat dari awal penyelenggara melakukan musyawarah dengan instansi lembaga terkait, yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, dilanjut dengan mempersiapkan warga belajar dan tutor. Selanjutnya dalam pendekatan pada warga belajar, penyelenggara mempersiapkan strategi agar calon warga belajar tertarik mengikuti pembelajaran. Dan terakhir pengajuan proposal kepada Gubernur Jawa Timur untuk pengajuan dana hibah.

4.3.2 Tahap Pelaksanaan

Pembelajaran Keaksaraan Dasar harus dilakukan berdasarkan konteks pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar atau SKK Dasar yaitu, setara 114 jam @60 menit (Bab 2 halaman 19). Hasil pengumpulan data menyimpulkan penyelenggara YPPI Nurul Wajid telah melaksanakan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar pada tahun 2013 dengan Standar Kompetensi Keaksaraan. Dengan menggunakan waktu pelaksanaan program minimal 114 jam dan 60 menit setiap pertemuan kelas. Seperti penuturan informan SG staf bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tentang jam belajar pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional, bahwa:

“Jam belajar mulai Tahun 2012 proses pembelajaran tidak lagi selama 6 bulan akan tetapi menggunakan jumlah jam minimal 114 jam.”

Seperti pernyataan informan NA selaku Ketua Penyelenggara dalam sebuah wawancara pada tanggal 31 Agustus 2014, bahwa:

“Kalau kemarin itu acuannya bukan selama 6 bulan tetapi 120 jam pertemuan. Sekali pertemuan itu 2 jam. Seminggu biasanya ada 4 kali atau 3 kali. Itu terhitung dari 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 harus 120 jam. Itu ketentuan sejak 2012 lalu.”

Sesuai penjelasan kedua informan tersebut, pelaksanaan program tepatnya dimulai pada tanggal 25 Agustus 2013 hingga selesai pada tanggal 15 Desember 2013. Desa Karangpring menyelenggarakan lebih lama dari standar kompetensi yang ditentukan selama 120 jam. Dalam tahap pelaksanaan program ini dibagi empat tahapan, yaitu *pertama* menentukan kelompok belajar, *kedua* penyusunan jadwal belajar, *ketiga* proses pembelajaran dan *keempat* pendidikan latihan keterampilan. Sesuai pernyataan informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Setelah mendapat dana dari pengajuan proposal itu kita jalankan programnya. Mula-mula kita tentukan kelompok belajarnya. Untuk tahun 2013 berjumlah 100 warga belajar maka kita membagi 10 orang tiap kelompok maka terdapat 10 kelompok. Itu ditentukan juga berdasarkan letak rumah warga belajar. Jadi dalam satu kelompok itu warga belajar yang terkumpul yang rumahnya paling berdekatan. Lalu dari masing-masing kelompok menentukan jadwal pembelajarannya. Warga dengan tutor bersama-sama menentukannya. Setelah itu dijalankan proses belajar mengajar membaca, menulis, berhitung.”

Menurut informasi diatas memberikan penguatan bahwa langkah awal dalam tahap pelaksanaan yang dilaksanakan melalui program Keaksaraan Fungsional adalah dengan menentukan kelompok belajar.

1.) Menentukan Kelompok Belajar

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan menentukan kelompok belajar. Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok atau administrasi belajar dengan minimal 10 peserta didik setiap kelompok, ini sesuai dengan deskripsi kegiatan Keaksaraan Dasar (Bab 2, halaman 22). Ketentuan dengan minimal 10 warga belajar agar kegiatan belajar berjalan efektif. Dengan tidak terlalu banyak warga belajar para tutor dapat dengan mudah melihat perkembangan belajar para warga belajar. Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada Tahun 2013 terbentuk 10 kelompok dari total 100 warga belajar. Maka setiap kelompok memiliki 10 peserta didik atau warga belajar. Seperti hasil wawancara dengan informan NA:

“Total 100 warga belajar dengan dibagi menjadi 10 kelompok Duku 1-10 dan 10 tutor. 1 tutor dalam tiap kelompok”

Dan informan NM :

“Tahun 2013 100 Warga Belajar. Ya kalau ada 10 kelompok berarti 100 WB. Setiap kelompok 10 warga belajar.”

Dari penyampaian informan NA dan NM total Warga Belajar pada program Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 adalah 100 Warga Belajar dan dibagi menjadi 10 kejar atau kelompok belajar. Tiap kelompok belajar memiliki nama kelompok, yaitu kelompok Duku 1 hingga Duku 10. Dan setiap kelompok berisi 10 warga belajar. Namun hal ini berbeda

dengan apa yang dikatakan salah satu tutor SK yang mengatakan bahwa warga belajar yang dia ajar terdapat lebih dari 10 warga belajar. Tetapi warga belajar yang lebih tersebut adalah warga lain yang ikut membantu atau juga ingin ikut belajar dan juga mereka dapat menambah semangat belajar para 10 warga belajar yang dia ajar.

Dengan jumlah warga belajar yang tidak terlalu banyak dapat meningkatkan mutu belajar para warga belajar karena mereka dapat lebih fokus dan berkonsentrasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan jumlah warga belajar minimal 10 warga belajar (Bab 2, halaman 22) sehingga tutor juga lebih mudah memantau perkembangan 10 warga belajar tersebut. Sebaliknya, warga lain tidak dilarang jika ingin datang hal tersebut dapat meningkatkan semangat warga belajar yang sedang belajar calistung.

2.) Penyusunan Jadwal Belajar

Setelah terbagi menjadi 10 kelompok dari total 100 warga belajar berikutnya menyusun jadwal belajar tiap-tiap kelompok warga belajar Desa Karangpring. Penyusunan jadwal untuk pembelajaran bagi warga belajar yang mayoritas orang-orang dewasa hingga lansia lebih efektif jika menyesuaikan waktu senggang yang warga belajar miliki. Karena warga belajar yang mayoritas orang-orang dewasa dan lansia yang telah memiliki kesibukan bekerja hingga mengurus keluarga masing-masing akan sulit jika tidak menyesuaikan ketersediaan dan waktu senggang para warga belajar. Dalam hal ini juga telah menjadi salah satu prinsip dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yang sudah tercantum (Bab 2, halaman 15), yakni desain lokal di mana proses pembelajaran merupakan respon minat dan kebutuhan warga belajar yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok. Waktu dan jadwal pertemuan lebih baik tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara atau tutor saja, namun harus sedapat mungkin disesuaikan dengan cara kerja dan waktu luang warga belajar. Juga sesuai dengan rencana belajar dalam komponen pengelolaan kelompok belajar yang tercantum dalam komponen-komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional, bahwa kelompok belajar berkewajiban memilih dan mengelola

pertemuan mereka sendiri melalui kesepakatan belajar secara bersama-sama (Bab 2, halaman 34). Hal ini juga telah disampaikan oleh informan NM pada tanggal 4 September 2014 dan informan SK pada tanggal 7 Desember 2014, bahwa:

“Kalau pelaksanaan awalnya menentukan kelompok lalu membuat jadwal. Ya jadwalnya rembukan dengan Warga Belajar. Karena sifatnya pendidikan orang dewasa kita tidak bisa memaksa, mana waktu luangnya WB itu kita manfaatkan. Malah di forum-forum tertentu itu juga bisa. Contohnya ada kegiatan ini itu kita masuk. Saking ingin orang-orang itu kumpul karena ya dilain waktu ya sesuai jadwal. Karena di desa ini kan ada kegiatan rutin tiap minggu. Itu dimanfaatkan” (NM)

“Yaitu, mengumpulkan warga dulu lalu menentukan bersama murid (Warga Belajar). Kesepakatannya gimana dengan menanyakan mereka satu persatu, bisanya mereka hari apa. Sama-sama menawarkan. Saling memberi usulan kapan. Kan kalau disini mayoritas mereka bekerja dulu jadi setelah selesai bekerja, saat Isya gitu. Kalau sore tidak bisa. Jadi dikembalikan lagi ke warga, kan ini harus menyesuaikan kondisi warga” (SK)

Selanjutnya informan SK menambahkan pernyataannya, bahwa:

“Dari awal setelah terkumpul ya pertama ditentukan dulu siapa ketua kelasnya. Kalau saya yang handle semua yang tidak bisa.”

Menurut informasi dari informan NM dan SK tersebut bahwa mereka lebih mengutamakan suara warga belajar dalam menentukan jadwal belajar mereka sendiri. Dan informan NM sebagai penyelenggara juga tutor memiliki upaya dalam menentukan jadwal belajar, yakni memanfaatkan waktu pada forum-forum kegiatan rutin warga belajar karena menyesuaikan situasi dan kondisi warga belajar. NM memanfaatkan waktu yang tepat dengan melakukan proses belajar mengajar dalam forum kegiatan warga yang rutin dilaksanakan di Desa Karangpring. Informan SJ pada tanggal 7 Desember 2014 dan KH pada tanggal 8 Desember 2014 yang juga sebagai tutor melakukan hal yang sama dengan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan kegiatan rutin para warga, yaitu Istigosah rutin.

“Ya saya yang menentukan, kan saya mengikutkan ketika acara istigosah itu. Ya untuk menyemangati mereka itu saya menyambung dengan acara istigosah itu. Jadi setelah acara istigosah tersebut dilaksanakan

kegiatan belajar, akhirnya kan terkumpul di sana. Yaitu, jadi disiasati dengan acara tersebut. Akhirnya setiap malam rabu sama malam jumat dilaksanakan. Jadi setelah acara istigosah. Masalahnya kalau diadakan disiang hari mereka kan kerja terus.” (SJ)

“Kalau menentukan jadwal belajar yak karena dari awal saya mengajak ketika ada acara muslimatan maka kesepakatan saat itu dengan warga ya ketika acara muslimatan dilanjut belajar bersama buta huruf.” (KH)

Informan NM, SJ dan KH memiliki cara yang sama dalam menentukan jadwal belajar warga belajar. Mereka memanfaatkan kegiatan rutin yang diadakan di daerah warga belajar. Setelah kegiatan tersebut selesai para tutor bersiap untuk mengajar warga belajar tersebut. Manfaat lainnya adalah para warga belajar lebih semangat dan senang belajar karena terdapat para warga lain yang ikut menyimak. Dan juga ini memudahkan para tutor karena informan NM, SJ dan KH yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat di Desa Karangpring. Namun, ada tutor mengatakan bahwa dia menentukan jadwal belajar warga belajar menyesuaikan jadwal tutor tersebut. Berikut penuturan informan SY:

“Ya sebelum belajar itu diinformasikan dulu. Kalau ada jadwal diinformasikan kalau malam ini harus berkumpul untuk belajar. Yang menentukan tutor. Kalau misal tutornya tidak bisa ya ditunda”

Selanjutnya informan SJ menambahkan pernyataannya, bahwa:

“Ya istilahnya mereka itu ijin Mbak kalau mereka tidak bisa hadir. Jadwalnya dulu setiap malam Selasa dan malam jumat. Jadi setiap malam, kalau siang mereka banyak kerja. Seperti petani, terus ada yang jualan.”

Dari informasi informan SJ di atas dijelaskan bahwa ia sebagai penentu jadwal belajar kelompoknya. Namun, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung rutin hingga program selesai. Program Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu perwujudan dari pemberdayaan masyarakat guna memberantas buta huruf. Pemberdayaan yang baik adalah pemberdayaan yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti (Bab 2, halaman 26). Oleh karenanya, partisipatif warga belajar tak bisa lepas dalam pemberdayaan program Keaksaraan

Fungsional. Dari seluruh informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa informan tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi warga belajar dalam penentuan jadwal belajar mereka sendiri berpengaruh besar dalam kelancaran program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar khususnya di Desa Karangpring. Pasalnya memang dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional warga belajar wajib mengutarakan, memilih dan mengelola pertemuan belajar mereka sendiri melalui pembuatan kesepakatan belajar secara bersama-sama. Warga belajar diberikan kebebasan dalam menentukan waktu jadwal belajar sesuai situasi dan kondisi warga belajar itu sendiri, namun itu semua tergantung kesepakatan belajar yang dibuat warga belajar beserta tutor agar terdapat pertemuan belajar secara rutin hingga waktu yang ditetapkan program telah usai, yakni pada tanggal 15 Desember 2013. Ini sesuai dengan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional yakni dalam perencanaan belajar harus melibatkan warga belajar itu sendiri (Bab 2, halaman 32). Serta sesuai dengan salah satu prinsip dasar program Keaksaraan Fungsional menurut Yunus dalam Isbandi (Bab 2, halaman 26) tentang adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan peran serta semua komponen entah dari lembaga atau individu terutama warga belajar dalam proses kegiatan program. Dampak yang dirasakan adalah semangat partisipasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013. Ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program yang berdasarkan kebutuhan warga belajar, ditentukan oleh warga belajar dan bersama dengan warga belajar menjadikan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring berhasil dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya jadwal dari masing-masing Duku dapat dilihat dalam tabel 4.6 tentang jadwal belajar program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2013, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jadwal Belajar KF Tingkat Dasar Desa Karangpring Tahun 2013

No	Nama Kejar	Jenis Kelamin		Jadwal			Tempat Belajar		
		L	P	Hari	Jam	Tempat	Dusun	Desa	
1	Duku 1	1	9	Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu	19.00-21.00	Mushola As Syafiq	Karangpring	Karangpring	
2	Duku 2	1	9	Minggu, Rabu, Kamis, Jumat	19.00-21.00	Mushola As Sabil	Gendir	Karangpring	
3	Duku 3	1	9	Minggu, Rabu, Kamis, Jumat	19.00-21.00	Mushola An Nur	Gendir	Karangpring	
4	Duku 4	3	7	Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu	19.00-21.00	Mushola Al Hikmah	Gendir	Karangpring	
5	Duku 5	3	7	Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	19.00-21.00	Mushola Al Amal	Gendir	Karangpring	
6	Duku 6	2	8	Minggu, Rabu, Kamis, Jumat	19.00-21.00	Mushola Al Hasan	Gendir	Karangpring	
7	Duku 7	3	7	Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu	19.00-21.00	Mushola Al Furqon	Gendir	Karangpring	
8	Duku 8	0	10	Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu	19.00-21.00	Mushola Annuriyah	Gendir	Karangpring	
9	Duku 9	4	6	Minggu, Rabu, Kamis, Juma	19.00-21.00	Mushola As Salam	Krajan	Karangpring	
10	Duku 10	2	8	Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu	19.00-21.00	Mushola Arrahman	Durjo	Karangpring	

(Sumber Data : Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban dana bantuan program pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2013)

Tahap selanjutnya adalah proses pembelajaran yang akan dikaji dalam sub bab di bawah ini:

3.) Proses Pembelajaran

Setiap kelompok dari kelompok Duku 1-10 dalam tahap ini memulai proses pembelajaran dengan masing-masing jadwal yang telah warga belajar dan tutor tentukan bersama. Proses pembelajaran program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar itu sendiri meliputi lima pembelajaran, yaitu; membaca, menulis, berhitung, diskusi dan aksi. Lima pembelajaran tersebut tidak diharuskan berurutan dilakukan. Proses pembelajaran di Desa Karangpring yang meliputi 10 kelompok belajar ini dilakukan tidak berurutan. Para tutor mengikuti keinginan warga belajar mereka masing-masing. Entah membaca terlebih dahulu atau berhitung terlebih dahulu. Juga pola tersebut dilakukan secara acak menurut kecenderungan karakteristik warga belajar atau

kebutuhan setempat seperti; dimulai dengan diskusi, adu argumen dan mencatat apa yang telah tutor tulis di papan. Seperti salah satu kelompok Duku 4 kegiatan belajar mengajar diawali dengan diskusi. Para warga belajar tiap-tiap kelompok awalnya saling berdiskusi memilih siapa ketua kelas dalam satu kelompok tersebut dan tutor juga ikut membantu didalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan SK sebagai tutor kelompok Duku 4:

“Dari awal setelah terkumpul ya pertama ditentukan dulu siapa ketua kelasnya. Kalau saya yang *handle* semua yang tidak bisa.”

Maksud informan SK dengan berdiskusi bersama memilih ketua kelas dapat mencairkan suasana dalam kelas saat pertama kali memulai belajar agar para warga belajar tidak ada yang merasa tegang ataupun malu-malu. Dengan memberi usulan siapa ketua kelas tersebut secara tidak langsung juga menimbulkan keaktifan warga belajar. Informan SK juga mengaku terbantu dengan adanya pembentukan ketua kelas yang dapat mengatur warga belajar yang lain.

Pendekatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau konsep andragogi dimana proses pembelajaran dilakukan dengan konsep pembelajaran atau pendidikan orang dewasa, seperti tentang masalah lingkungan, pengalaman pribadi hingga tentang masalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian di sekitar lingkungan warga belajar di Desa Karangpring itu semua digali dari pendapat dan diketahui oleh para warga belajar. Karena warga belajar yang mayoritas orang dewasa dan orang dewasa akan senang belajar bila aktivitas belajarnya dapat memecahkan masalahnya, menjadi bermakna bagi situasi kehidupannya. Mereka juga menginginkan hasil belajar segera dapat diterapkan (Bab 2 halaman 17). Warga belajar Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 mayoritas orang dewasa yang berumur sekitar 40 tahun keatas. Dengan diterapkannya konsep andragogi tersebut memacu semangat dan minat warga belajar Desa Karangpring karena mereka yang merasa butuh, berminat dan pembelajaran yang sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Dampaknya bagi warga belajar tersebut adalah pembelajaran yang diajarkan mudah meresap dan dipahami oleh warga belajar

karena pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman-pengalaman mereka. Ini juga agar warga belajar dapat berpartisipasi secara aktif sehingga bisa mencari jalan keluar dan memperbaiki serta mempertajam ingatan warga belajar, yang pada akhirnya dalam proses pembelajaran berjalan optimal dan berhasil. Dan sesuai dengan data yang peneliti dapat, program KF tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 menggunakan metode diskusi, ceramah, bercerita dan tanya-jawab. Pendekatan andragogi juga dipaparkan dalam bentuk bahan belajar atau buku tematik warga belajar yang di dalamnya berisi wacana-wacana tentang peristiwa dan lingkungan sekitar warga belajar.

Gambar 4.3

Buku Tematik Warga Belajar Desa Karangpring 2013



Sumber : data penulis 2014

Proses pembelajaran juga harus memenuhi komponen-komponen penting Keaksaraan Fungsional, yaitu membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara. Jadi, seluruh warga belajar selama pembelajaran harus memenuhi lima komponen tersebut untuk penilaian. Berikut penjelasan dari informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Yaa itu tadi Calistung, membaca menulis dan berhitung mudahnya seperti itu. Tetapi di dalam ketentuannya itu ada lima komponen, yaitu membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara. Jadi, misalkan warga itu diusahakan menulisnya itu seperti apa, membacanya seperti apa, berhitungnya bagaimana dan mereka saat mendengarkan kita itu bagus tidak artinya nanggap tidak terus kalau berbicaranya itu kita ajarkan dengan diusahakan mereka berbicara dengan bahasa Indonesia karena tidak semua warga itu bisa, cuma paham dan mengerti. Contohnya warga

di rumah itu saat menonton televisi seperti sinetron itu mereka mengerti tetapi tidak bisa mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Indonesia. Maka kita usahakan warga itu paham.”

Selanjutnya informan NA menambahkan pernyataannya, bahwa:

“Ya artinya dengan sendirinya mereka kalau proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan sendirinya mereka ngomong dan berbicara, artinya lima komponen itu pasti dikerjakan. Ya contohnya mereka disuruh menulis namanya sendiri, disitu mereka juga menghitung berapa huruf dalam nama mereka. Artinya cara belajarnya seperti itu lah”

Menurut penjelasan NA diatas terdapat strategi menarik yang dilakukan tutor saat proses belajar berlangsung, yaitu masing-masing dari warga belajar diminta untuk menuliskan nama dan kemudian menghitung jumlah huruf yang terdapat dalam nama mereka. Dari kegiatan ini tutor dapat memenuhi lima komponen penting dalam pembelajaran program Keaksaraan Fungsional, yaitu; membaca, menulis, berhitung, mendengar sekaligus berbicara. Selanjutnya, pelaksanaan proses pembelajaran ini tutor dan warga belajar diberikan fasilitas belajar seperti yang sudah ditentukan. Untuk tiap tutor fasilitas yang diberikan ialah papan, spidol, buku tematik untuk pedoman mengajar. Lalu untuk warga belajar ialah buku tematik, buku tulis dan peralatan tulis (pensil, pulpen, penghapus, penggaris). Seperti pernyataan informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Oh fasilitas belajar yang diberikan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan ya ada buku, ada bulpen, ada penggaris, pensil dan itu termasuk buku bacaannya atau yang disebut buku tematik jadi setiap Warga Belajar dapat. Kalau buku tulis sesuai kebutuhan, jika kurang ya kita tambah dua atau tiga buku lagi. Cuman kalau fasilitas belajar itu kalau kita biasa ditaruh di tempat belajar tidak boleh dibawa pulang ya karena kalau dibawa pulang itu Ibu-ibu itu biasanya hilang bukunya, ada yang dibuat anaknya, dibuat bungkus jajan atau makanan di rumah. Maka dari itu tetap diletakkan di tempat belajar. Disamping itu ada fasilitas belajar untuk tutor ada papan belajarnya, papan tulis untuk tutornya.”

Menurut informan NA tersebut menjelaskan bahwa terdapat sebuah aturan untuk seluruh warga belajar tiap proses belajar mengajar berlangsung. Bahwa fasilitas belajar terutama buku tulis harus diletakkan di tempat belajar (musholla) ketika proses belajar mengajar selesai dan tidak boleh dibawa

pulang. Karena mengikuti pengalaman pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring sebelumnya banyak buku warga belajar yang hilang, ada yang dipakai anak-anak mereka bahkan ada yang dibuat warga belajar untuk membungkus makanan ketika di rumah. Oleh karena itu, dibuat peraturan agar buku dan peralatan tulis diletakan di tempat belajar ketika pulang kecuali ketika warga belajar sedang diberi tugas rumah atau PR (Pekerjaan Rumah) dari tutor.

Warga di Desa Karangpring mayoritas menggunakan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari mereka. Warga belajar mayoritas menggunakan bahasa Madura pula. Rata-rata warga belajar belum bisa dan mengerti bahasa Indonesia. Banyak yang memahami namun sulit untuk berbicara bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Keaksaraan Fungsional mengupayakan agar warga belajar dapat dan mengerti berbahasa Indonesia tidak hanya bahasa daerah saja namun juga dapat berbahasa Indonesia. Seperti yang telah informan NA jelaskan:

“..Kalau berbicaranya itu kita ajarkan dengan diusahakan mereka berbicara dengan bahasa Indonesia karena tidak semua warga itu bisa, cuma paham dan mengerti. Contohnya warga di rumah itu saat menonton televisi seperti sinetron itu mereka mengerti tetapi tidak bisa mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Indonesia. Maka kita usahakan warga itu paham.”

Menurut informan NA warga belajar masih banyak yang belum dapat berbicara namun memahami bahasa Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar, warga diajarkan dan diusahakan dapat berbicara bahasa Indonesia. Di sini tutor berperan membantu warga belajar agar warga belajar mengerti dan dapat berbahasa Indonesia. Namun, informan AA yang juga sebagai tutor menjelaskan bahwa dia sebagai tutor juga mengalami kesulitan berbahasa Indonesia. Tutor AA memahami bahasa Indonesia namun kaku dalam berbicara. Informan AA adalah salah satu tutor yang dipilih untuk mengajar program Keaksaraan Fungsional pada tahun 2013 karena ia juga salah satu tokoh masyarakat tertuma di Dusun Gendir. Berikut penjelasan informan AA yang menjadi tutor pada kelompok Duku 7 pada tanggal 7 Desember 2014:

“Terus terang ya Mbak, jangankan murid tutorpun bahasa indonesianya kaku. Karena apa, tradisi kalau di pedesaan terbiasa bahasa Madura jadi sekarang bicaranya kaku mbak. Untuk cara-cara mengajar ya mungkin intinya sama, termasuk sebagian dari saya. Kalau saya jadi tutor, saya menulis di papan langsung saya suruh ayo mari-mari kerjakan harus mirip dengan yang di papan. Dan saya meskipun muridnya tua-tua harus diberi PR juga mbak. Karena bagi saya PR itu penting.”

Selanjutnya informan AA menambahkan, bahwa:

“Oh iya, seperti yang saya bilang tadi. Jangankan muridnya, tutornya pun sulit karena di desa kebiasaan berbahasa Madura semua. Kebanyakan ya memakai bahasa Madura. Tidak bisa kalau orang tua itu. Ya bisa juga sebagian diselingi bahasa Indonesia. Kalau tulisan yang saya ajarkan ya dengan bahasa Indonesia Mbak. Saya kalau nulis bahasa Indonesia. Dan dari awal saya bilang tadi, mereka saya kasih PR juga. Dan mereka harus tahu menulis nama masing-masing.”

Menurut penjelasan informan AA tersebut ia mengalami kesulitan untuk lancar berbahasa Indonesia dalam mengajarkan para warga belajar. Ia mengajarkan calistung kepada warga belajar dengan menggunakan bahasa warga Desa Karangpring sehari-hari yaitu bahasa Madura namun dia juga menyempatkan mengajar warga belajar bahasa Indonesia tertuma dalam mengajar menulis. Informan AA juga menjelaskan bahwa diberikannya PR atau Pekerjaan Rumah untuk para warga belajar adalah penting agar warga belajar tidak mudah melupakan apa yang sudah diajarkan di kelas. Hal yang sama juga dilakukan oleh informan SK sebagai tutor kelompok Duku 4 bahwa saat proses pembelajaran ia menggunakan bahasa sehari-hari yaitu Madura namun juga mengajarkan para warga belajar berbahasa Indonesia. Berikut penjelasan informan SK:

“Bahasa sini Dek hehe. Bahasa Madura dulu tapi akhirnya mereka harus belajar sedikit-sedikit. Mereka pasti sudah melihat lewat televisi pasti sudah ada mengertinya. Yaa bahasa Indonesia sehari-hari yang ada di rumah. Ya yang ada di dalam di kehidupan sehari-hari, yang di warga sekitar. Jangan jauh-jauh. Karena kan warga buta huruf”

Implementasinya adalah seluruh tutor lebih baik jika lebih mengutamakan berbahasa Indonesia ketika proses belajar mengajar agar warga belajar juga mempraktekan dan terbiasa hingga paham berbahasa Indonesia. Karena lancar

berbahasa Indonesia adalah salah satu tujuan dari program Keaksaraan Fungsional. Ini tercantum pada (Bab 2 halaman 13). Namun tidak menghilangkan bahasa sehari-hari warga belajar di Desa Karangpring. Karena bahasa sehari-hari mendekatkan dan mengakrabkan warga belajar dengan tutor. Sehingga warga belajar menikmati proses belajar calistung.

4.) Pendidikan Latihan Keterampilan

Penyelenggara program menambahkan kegiatan tambahan agar warga belajar tetap bersemangat belajar calistung dan menambah keterampilan yang warga belajar punya, yaitu kegiatan pendidikan latihan keterampilan. Kegiatan tambahan ini merupakan pembeda pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring dengan Desa lain di satu Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Hal ini yang telah disampaikan oleh informan SG dalam wawancara, ia mengatakan bahwa:

“Di Sukorambi hanya Desa Karangpring yang melakukan kegiatan keterampilan. Desa Karangpring mengawali dengan adanya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut yang mengarah kepada ekonomi masyarakat dan menyesuaikan sumber daya alam yang ada di lingkungan Karangpring.”

Pendidikan latihan keterampilan diadakan pada akhir proses pembelajaran sebagai kegiatan tambahan pendidikan keaksaraan dasar kepada warga belajar di Desa Karangpring. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember di mana pendidikan latihan keterampilan tersebut diberikan apabila warga belajar sudah bisa calistung (baca, tulis, berhitung) atau pada saat warga belajar sudah mengalami tingkat kejenuhan. Kegiatan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar para warga belajar yang mayoritas orang dewasa tersebut dan juga untuk menambah keterampilan warga belajar. Karena orang dewasa yang rentan dengan rasa bosan dan jenuh ketika disuruh belajar. Maka dari itu, kegiatan keterampilan ini adalah salah satu strategi penyelenggara agar warga belajar di Desa Karangpring tidak merasa bosan dan memiliki semangat kembali untuk belajar calistung. Berikut informasi dari informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Kalau sudah beberapa waktu kalau sudah dipertengahan jalannya program kita adakan kegiatan keterampilan. Artinya mengapa? Kalau ada kegiatan keterampilan maka Warga Belajar (WB) itu bisa lebih semangat lagi karena jenuh. Kenapa? Karena dengan keterampilan itu kita nikmati bersama. Biasanya kita membuat keterampilan bervariasi ada yang berupa makanan ada yang berupa semacam sebuah karya. Misalkan kita membuat kripik, dan lain-lain..”

Informan NM juga mengatakan hal yang sama ketika peneliti berkunjung ke kediamannya pada tanggal 4 September 2014:

“Kegiatan tambahan tersebut bertujuan mengembalikan semangat para warga belajar yang kadang mereka pasti merasa bosan saat belajar di kelas saja. Para warga membuat keterampilan seperti membuat kripik, pupuk, dan keranjang. Jadi tiap kelompok ada keterampilan masing-masing, dibagi tiap beberapa kelompok.”

Lalu pernyataan dari informan SK sebagai tutor pada tanggal 7 Desember 2014:

“Ada. Seperti keterampilan. Membuat pupuk kompos dan keranjang. Kalau perempuan masak, buat apa gitu. Mayoritas disini membuat keripik *pohong*. Peran tutor saat itu mendampingi saja mbak.”

Pelaksanaan pendidikan latihan keterampilan dilaksanakan di rumah informan NA yang sebagai ketua penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring dan tepatnya dilaksanakan hari Rabu pada tanggal 4 Desember 2013. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari karena mengikuti para warga belajar yang mayoritas bekerja sebagai petani yang aktif pada pagi hingga siang hari. Keterampilan yang dipraktikkan ada lima, yaitu membuat *grunjung* atau keranjang dan pupuk kompos bagi warga belajar yang laki-laki dan membuat keripik singkong, talas dan onde-onde bagi yang perempuan. Dan dibagi kelompok. Tiap dua kelompok mempraktekan satu keterampilan saja. Untuk yang laki-laki dibagi dua kelompok *grunjung* dan pupuk kompos. Untuk yang perempuan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, kelompok kripik singkong, kripik talas dan onde-onde.

Sebelum kegiatan dimulai para warga belajar ditugaskan untuk membaca prosedur atau langkah-langkah dari membuat masing-masing keterampilan tersebut. Tidak hanya membaca tetapi juga berhitung jumlah bahan yang

diperlukan. Dalam hal ini bertujuan agar apa yang telah warga belajar pelajari dalam kelas dituangkan kembali dalam kegiatan praktek nyata yang menyangkut kehidupan sehari-hari mereka sehingga apa yang telah dipelajari tidak mudah dilupakan dan melekat dalam pikiran para warga belajar tersebut. Dan juga agar membiasakan mereka untuk membaca sebuah langkah-langkah atau prosedur dahulu sebelum melakukan kegiatan yang baru mereka ketahui. Kegiatan keterampilan ini juga memacu semangat dan motivasi warga belajar di Desa Karangpring untuk terus belajar calistung dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut memberi manfaat pula terhadap keberhasilan pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring karena dengan adanya kegiatan keterampilan yang di dalamnya juga terdapat kegiatan calistung (membaca, menulis dan berhitung) meningkatkan kelancaran warga belajar dalam membaca, menulis dan berhitung serta menambah keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari warga belajar. Sehingga, tujuan program tersebut dapat tercapai, yakni (Bab 2 halaman 13) membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) sendiri untuk membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan keterampilan fungsional sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Lima macam keterampilan yang diberikan penyelenggara tersebut merupakan keterampilan fungsional yang juga warga belajar butuhkan agar meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dan mereka dapat memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan perekonomian warga belajar tersebut.

Gambar 4.4

Kegiatan Pendidikan Latihan Keterampilan Membuat *Grunjung* atau Keranjang dan Membuat Pupuk Kompos

Sumber : data penyelenggara program 2013

Gambar 4.4 menggambarkan kegiatan keterampilan kelompok laki-laki warga belajar Desa Karangpring dalam membuat keranjang dan pupuk kompos. Menurut informan NA hasil keterampilan pupuk kompos mereka jual dan untungnya mereka bagi bersama. Berikut penuturan informan NA pada tanggal 7 September 2014:

“Kalau kripik tidak dijual. Pupuk kompos yang dari kotoran sapi itu yang dijual. Motivasinya ya dijual tetapi karena hasil kripiknya tidak banyak jadi hasilnya dimakan bareng-bareng.”

Selanjutnya informan AR sebagai salah satu warga belajar menjelaskan tentang kegiatan keterampilan pada tanggal 22 Juli 2014:

“Anu membuat grunjung (keranjang) sama mengelolah pupuk kandang. Membuatnya bersama-sama lalu dijual bersama-sama”

Gambar 4.5
Kegiatan Pendidikan Latihan Keterampilan Membuat Onde-Onde,
Kripik Singkong dan Kripik Talas



Sumber : Data penyelenggara program 2013

Implementasinya suatu program Keaksaraan Fungsional yang baik melakukan programnya dengan menyesuaikan lingkungan dan kehidupan sehari-hari pada sasaran atau penerima manfaat dari program Keaksaraan Fungsional tersebut. Dalam hal ini penyelenggara program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada 2013 mempunyai ide yang berbeda dari desa lain dalam Kecamatan Sukorambi yaitu dengan melaksanakan kegiatan tambahan yang dapat memacu semangat dan motivasi para warga belajar untuk tetap belajar calistung. Meski program Keaksaraan Fungsional ini dibutuhkan berkali-kali dilaksanakan agar warga yang buta huruf benar-benar dapat calistung dengan lancar dan tidak buta huruf kembali. Dengan ditambah kegiatan keterampilan tersebut, penyelenggara telah mengikuti salah satu prinsip program Keaksaraan Fungsional, yakni desain lokal, partisipatif dan fungsionalisasi hasil belajar (bab 2 halaman 13-15). Dalam desain lokal, penyelenggara berhasil melakukan kegiatan belajar yang berhubungan dengan kondisi warga belajar, yaitu dengan melakukan kegiatan keterampilan sesuai dengan lingkungan pertanian warga belajar dan memanfaatkan hasil alam (singkong, tanaman talas, bambu dan kotoran hewan ternak) sebagai penambah keterampilan warga belajar sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari warga belajar, yaitu selain melancarkan cara calistung mereka juga memanfaatkan keterampilan tersebut dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dalam partisipatif ialah penyelenggara berhasil melibatkan warga belajar dalam kegiatan yang lebih

meningkatkan keaktifan warga belajar dalam bentuk praktek keterampilan. Dalam kegiatan tersebut juga membuat warga belajar bekerja sama dalam kelompok, mengambil keputusan dan membuat hasil keterampilan yang memuaskan warga belajar. Dan juga dalam prinsip fungsionalisasi hasil belajar, yang pasti adalah kegiatan tersebut menambah fungsi dari warga belajar belajar calistung, yakni sebuah keterampilan baru yang dimiliki warga belajar.

4.3.3 Tahap Penilaian Hasil Pembelajaran

Proses penilaian program Keaksaraan Fungsional tidak hanya dapat dilakukan dalam sekali penilaian untuk keberhasilan program tersebut tetapi juga harus mengetahui awal, perkembangan dan nilai akhir warga belajar. Seperti pada prosedur kegiatan pelaksanaan Keaksaraan Dasar (Bab 2 halaman 20) dalam penilaian hasil pembelajaran, warga belajar dinilai dari tiga tahapan yaitu, *pertama*, penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan. *Kedua*, penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi keaksaraan dasar yang harus diselesaikan selama mengikuti program. *Ketiga*, peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

Oleh karena itu, tahap penilaian dalam program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar pada tahun 2013 di Desa Karangpring meliputi tiga tahap penilaian hasil pembelajaran warga belajar, yaitu tahap penilaian secara periodik, penilaian akhir dan pemberian SUKMA sebagai tanda bahwa warga belajar telah lulus mengikuti pembelajaran calistung. Seperti pernyataan informan NA pada tanggal 31 Agustus 2014:

“Secara umum kalau soal penilaian ada 5 poin itu tadi, ada membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengar. Kalau bagaimana prosesnya itu tiap bulannya ada lembar penilaiannya, jadi disitu keliatan perkembangan WB tiap bulannya. Di akhir proses evaluasinya ya dilihat

warganya bagaimana membacanya, menulisnya, dsb.. Sudah bisa atau tidak. Kalau sudah dinyatakan lulus mereka mendapatkan SUKMA semacam sertifikat gitu. Surat Keterangan Melek Aksara. Begitu.”

Selanjutnya pernyataan penyelenggara NA diperkuat dengan pernyataan tutor SK pada tanggal 7 Desember 2014 dan KH pada tanggal 8 Desember 2014:

“Penilaiannya ya perwarga, perorang begitu. Diliat kemampuannya. Kan ada tesnya, lalu di kelas mereka seperti apa itu sudah dapat dinilai. Tiap bulan dinilai dan nanti akhirnya kelihatan perkembangannya Mbak. Diakhir juga ada tesnya”(SK)

“Kalau di nilainya itu mereka nerusin apa yang saya tuliskan itu. Misal ini bapak.. siapa suruh teruskan. Ya cara nilainya itu satu, dilihat tulisan mereka betul atau tidak. Sesuai dengan di papan atau tidak, kalau salah ya ditulis lagi di papan merkanya. Kalimatnya ini begini itu begini. Kadang terbalik antara D ama B. Penilaian dilakukan tiap bulan, ya dinilainya dilihat lancar tidaknya. Kalau tesnya ada itu di akhir itu di bukunya. Jadi tesnya ya mereka membaca, menulis, berhitung di isi dari bukunya. Jadi saya tulis di papan lalu mereka meneruskan di buku.”(KH)

Menurut ketiga informan tersebut menjelaskan hal yang sama. Maka dari itu, berikut penjelasan dari ketiga tahapan penilaian hasil pembelajaran dan dimulai dari penilaian secara periodik.

1.) Penilaian secara Periodik

Sesuai dengan rencana kerja kegiatan Keaksaraan Dasar (Bab 2 halaman 22) penilaian awal adalah penilaian secara periodik. Penilaian secara periodik adalah penilaian terhadap belajar calistung warga belajar tiap bulan agar mengetahui perkembangan warga belajar dari lima komponen dalam program Keaksaraan Fungsional, yaitu dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengarkan. Penilaian periodik ini bertujuan agar mengetahui perkembangan tiap bulan para warga belajar sehingga para tutor dapat mengetahui kekurangan dan kesulitan tiap warga belajar karena mereka para orang dewasa dan orang tua yang tidak mudah mengajarkan calistung sehingga kekurangan dan kesulitan tersebut dapat tutor perbaiki sampai mereka semua lancar calistung. Penilaian secara periodik tersebut berupa data tertulis dalam tabel dengan nama masing-masing warga belajar di tiap kelompok dengan penilaian dalam lima kolom yaitu

membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara. Nilai-nilai secara periodik salah satu kelompok belajar telah peneliti cantumkan dalam sebuah lampiran, yaitu pada lampiran 6. Hal ini diungkapkan oleh informan NA pada tanggal 31 Agustus 2014 dan informan SK pada tanggal 7 Desember 2014 :

“Secara umum kalau soal penilaian ada 5 poin itu tadi, ada membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengar. Kalau bagaimana prosesnya itu tiap bulannya ada lembar penilaiannya, jadi disitu kelihatan perkembangan WB tiap bulannya..” (NA)

“Penilaiannya ya perwarga, perorang begitu. Diliat kemampuannya. Kan ada tesnya, lalu di kelas mereka seperti apa itu sudah dapat dinilai. Tiap bulan dinilai dan nanti akhirnya kelihatan perkembangannya Mbak. Diakhir juga ada tesnya” (SK)

Menurut kedua informan NA dan SK memperkuat bukti tertulis yang peneliti dapatkan dan juga memperkuat tahapan penilaian pada rencana kerja program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar (Bab 2 halaman 22), yakni tahapan pertama dalam penilaian warga belajar adalah dengan cara penilaian secara periodik. Berikut contoh perbandingan tabel hasil penilaian secara periodik warga belajar kelompok duku 1 pada pembelajaran bulan Agustus dan bulan Oktober 2013:

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Secara Periodik Warga Belajar Kelompok Duku 1 Bulan Agustus dan Oktober 2013

No.	Nama Warga Belajar	Umur	Kompetensi																Keterangan				
			Membaca				Menulis				Berhitung				Berbicara					Mendengarkan			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
1	SUMI	59			✓	✓				✓				✓				✓				✓	A : Sangat baik (Score 90 - 100)
2	TOYANI	40			✓					✓				✓				✓				✓	B : Baik (Score 75 - 89)
3	MANIS	59			✓					✓				✓				✓				✓	
4	JUMAATI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
5	SURANI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
6	B SUS	51			✓					✓				✓				✓				✓	
7	NITI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
8	MISNI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
9	SRATI	57			✓					✓				✓				✓				✓	
10	MUSAAN	45			✓					✓				✓				✓				✓	D : Kurang

Jember, 30 Agustus 2013

No.	Nama Warga Belajar	Umur	Kompetensi																Keterangan				
			Membaca				Menulis				Berhitung				Berbicara					Mendengarkan			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
1	SUMI	59			✓					✓				✓				✓				✓	A : Sangat baik (Score 90 - 100)
2	TOYANI	40			✓					✓				✓				✓				✓	B : Baik (Score 75 - 89)
3	MANIS	59			✓					✓				✓				✓				✓	
4	JUMAATI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
5	SURANI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
6	B SUS	51			✓					✓				✓				✓				✓	
7	NITI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
8	MISNI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
9	SRATI	57			✓					✓				✓				✓				✓	
10	MUSAAN	45			✓					✓				✓				✓				✓	D : Kurang

Jember, 30 Oktober 2013

Dua tabel di atas menjelaskan bahwa ada perkembangan nilai dari kesepuluh warga belajar pada kelompok Duku 1 di bulan Agustus dan Oktober 2013. Pada bulan Agustus rata-rata warga belajar mendapat nilai D di lima komponen penilaian tersebut lalu ketika menginjak bulan Oktober, terbaca perkembangan warga belajar. Perkembangan nilai tersebut berbeda-beda dari satu warga dengan warga yang lain. Namun, ada yang sama, ada peningkatan terutama pada penilaian membaca yakni dengan nilai C pada semua warga. Ini salah satu hasil perkembangan nilai warga belajar pada saat pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013. Hal tersebut menandakan adanya keberhasilan program dalam mewujudkan warga yang bisa calistung.

2.) Penilaian Akhir

Penilaian akhir adalah penilaian diambil dari hasil tes akhir yang diberikan kepada warga belajar. Warga belajar diakhir pembelajaran harus melakukan tes akhir tersebut. Sama halnya pendidikan formal lainnya dengan melakukan ujian akhir sehingga mengetahui hasil belajar yang sudah dipelajari dari awal. Bedanya, tes akhir ini tidak seformal pada pendidikan formal pada umumnya, warga belajar tidak harus mengerjakan tanpa tidak dibantu oleh tutor. Jika warga belajar tidak mengerti bisa bertanya pada tutor yang mengajar. Dari sana pula tutor menilai hasil akhir warga belajar dalam belajar calistung selama 120 jam pembelajaran tersebut. Dalam hal ini bahan tes akhir warga belajar mengikuti yang ada pada buku tematik. Tutor dapat menguji mereka satu persatu ataupun bersamaan tergantung tutor yang memahami karakter para warga belajar.

3.) Pemberian SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara)

Sesuai pada (Bab 2 halaman 22) tahap akhir dalam tahap penilaian hasil belajar warga belajar dalam pembelajaran calistung Keaksaraan Dasar program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013 adalah pembagian SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara). Warga belajar yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus atau selesai dan diberikanlah SUKMA. Berikut penjelasan informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Kalau sudah lulus mereka mendapat sebuah surat semacam sertifikat namanya SUKMA, jadi tiap Warga Belajar yang sudah dievaluasi diberikan SUKMA, yaitu Surat Keterangan Melek Aksara. Dan surat itu memang langsung diberikan dari Dinas Pendidikan.”

Selanjutnya informan NA menambahkan, bahwa:

“..Di akhir proses evaluasinya ya dilihat warganya bagaimana membacanya, menulisnya, dsb.. Sudah bisa atau tidak. Kalau sudah dinyatakan lulus mereka mendapatkan SUKMA semacam sertifikat gitu. Surat Keterangan Melek Aksara. Begitu. Gunanya adalah bukti bahwa mereka telah melek aksara dalam Keaksaraan Dasar. Lalu bisa lanjut pada Keaksaraan Usaha Mandiri. Namun saya belum melaksanakan KUM di Karangpring.”

Menurut informasi dari informan NA sebagai penyelenggara di Desa Karangpring bahwa fungsi dari dicetak dan diberikannya Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) untuk warga belajar yang telah memenuhi kompetensi minimal dalam Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar adalah sebagai penanda bahwa mereka telah lulus/melek aksara sehingga bisa melanjutkan pada program Keaksaraan Fungsional tingkat Usaha Mandiri. Namun, di Desa Karangpring sendiri belum melaksanakan program Keaksaraan Fungsional tingkat Usaha Mandiri tersebut, masih dalam perencanaan saja. berikut informasi dari informan NM tentang rencana melaksanakan program KF tingkat Usaha Mandiri di Desa Karangpring, wawancara pada tanggal 4 September 2014:

“Tiap tahun sih bisa dikatakan sama. Cuma yang kemarin ya berhasil lah. Ini kan yang 2014 mengajukan yang KUM, Keaksaraan Fungsional yang Keaksaraan Usaha Mandiri..”

Menurut informasi dari informan NM bahwa tahapan untuk melanjutkan program Keaksaraan Fungsional tingkat Usaha Mandiri (KUM) di Desa

Karangpring masih dalam tahap pengajuan proposal pada saat itu. Dalam hal pemberian SUKMA pada program KF di Desa Karangpring tahun 2013, peneliti mendapatkan bahwa belum ada pembagian kepada warga belajar dikarenakan ada 'kemacetan' pembagian SUKMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, maka peneliti hanya mendapat bukti SUKMA pada tahun 2012 milik salah satu warga belajar pada tahun 2012. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional untuk selanjutnya karena warga belajar tidak dapat menunjukannya untuk program KF tingkat Usaha Mandiri berikutnya. Namun, baiknya penyelenggara memiliki data siapa saja yang lulus tersebut. Bentuk contoh SUKMA ada pada *lampiran 7*.

4.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional Tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada Tahun 2013

Keberhasilan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi pendorongnya antara lain:

4.4.1 Rasa Keingintahuan Warga Belajar Desa Karangpring

Tanpa adanya kemauan dan keinginan warga belajar itu sendiri untuk belajar calistung pasti akan sulit melaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Beberapa warga belajar Desa Karangpring memiliki semangat tinggi dan rasa ingin belajar calistung hal tersebut disampaikan oleh informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Nah mungkin pertama, kalau dari Warga Belajar ada Warga Belajar yang benar-benar ingin tahu, mau belajar. Artinya itu bisa salah satu pendorong juga. Terkadang kan ada orang yang semangat dan ingin benar-benar belajar..”

Menurut informan NA, warga belajar yang memang dari dirinya ingin belajar dan memiliki semangat untuk belajar adalah faktor utama keberhasilan program Keaksaraan Fungsional karena warga belajar yang umumnya orang dewasa dan lanjut usia sulit untuk diajak belajar calistung. Sehingga, beberapa

warga yang memiliki rasa keingintahuan dan semangat untuk belajar adalah pendorong utama keberhasilan program Keaksaraan Fungsional.

Rasa kesadaran ingin belajar dan rasa ingin tahu warga belajar memperlancar kegiatan program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar tersebut. Dengan begitu juga mempermudah para penyelenggara dan tutor saat mengajak mereka untuk belajar calistung. Seperti pada bab 2 Halaman 12 bahwa program Keaksaraan Fungsional harus berpusat pada masalah, minat dan kebutuhan warga belajar. Maka, program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring berjalan lancar karena dapat meningkatkan minat para warga belajar.

4.4.2 Honor Tutor sebagai Penyemangat Tutor

Menurut informan NA sebagai ketua penyelenggara dan juga merangkap sebagai tutor, salah satu pendorong keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring adalah adanya pemberian honor atau imbalan kepada para tutor yang telah membantu mengajar para warga belajar hingga dapat membaca, menulis dan berhitung (calistung). Berikut pernyataan informan NA ada tanggal 16 Agustus 2014:

“..Kalau dari segi tutornya itu karena mereka mendapat honor meskipun tidak seberapa itu juga menjadi pendorong dan penyemangat para tutor. Karena saya yakin kalau tutornya tidak dibayar sama sekali mungkin malas juga yang mau mengajar terus-terusan selama 120 jam. Kalau dari segi penyelenggaranya itu karena memang biayanya meskipun minim itu juga ada tetapi itu juga sebagai pendorong.”

Setiap pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional, penyelenggara mencari tutor yang berkompeten dan bersedia untuk mengajar para warga buta huruf. Di Desa Karangpring mengajak para tokoh masyarakat yang dipercaya warga untuk dijadikan tutor membantu warga yang buta huruf belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung). Hal tersebut adalah salah satu strategi penyelenggara agar warga belajar bersedia dan berminat untuk belajar karena mereka diajarkan oleh orang-orang terpercaya di Desa mereka. Tak hanya sekedar membantu tetapi para tutor juga diberi imbalan berupa honor mengajar. Honor tersebut memang telah disediakan pada anggaran pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional. honor tersebut juga memberikan dampak positif buat tutor, pada akhirnya tutor tergerak

mengajar dengan semangat dan maksimal kepada warga belajar. honor tersebut sebagai pemacu semangat para tutor dan para tutor yang semangat tersebut menularkan semangat pula keada warga belajar di Desa Karangpring.

4.4.3 Kegiatan Tambahan Pendidikan Keterampilan

Penyelenggara program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring ingin warga belajarnya tetap semangat belajar membaca, menulis dan berhitung karena banyak manfaat yang akan diraih jika mereka dapat membaca, menulis dan berhitung. Maka, penyelenggara berinisiatif melaksanakan kegiatan tambahan agar warga belajar tetap semangat belajar dan juga mempraktekan hasil belajar dengan kegiatan nyata yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari warga belajar. oleh karena itu, penyelenggara melaksanakan kegiatan berupa keterampilan. Berikut penjelasan informan NA pada tanggal 16 Agustus 2014:

“Kegiatan keterampilan ya termasuk juga ya. Karena dengan begitu Warga Belajar secara tidak langsung bisa belajar membaca menulis berhitung itu dengan keterampilan. Kenapa saya mengatakan begitu karena saat warga membuat kripik singkong, itu otomatis warga menulis sendiri kata singkong. Dan juga saat berhitung itu mereka mencatat berapa singkong? Misal singkong dua pohon atau dua apa. Artinya secara tidak langsung mereka langsung belajar dengan keterampilan itu.”

Kegiatan keterampilan dilaksanakan sehari saja dengan dibagi beberapa kelompok. Para perempuan dan laki-laki dibedakan bentuk keterampilannya. Jenis keterampilan yang dilaksanakan adalah keterampilan yang menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari warga belajar dan memberikan manfaat bagi warga belajar, khususnya manfaat segi ekonomi. Agar warga belajar memanfaatkan keterampilan yang diajarkan untuk mendongkrak perekonomian mereka dengan menjual hasil keterampilan tersebut. jenis keterampilannya, yaitu membuat kripik singkong, talas, kue onde-onde, membuat keranjang dan pupuk kompos. Oleh karena itu, kegiatan tambahan keterampilan adalah salah satu pendorong keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada pelaksanaan tahun 2013.

4.4.4 Tempat Belajar yang Dekat dengan Rumah Warga Belajar dan Waktu Belajar yang Menyesuaikan Kondisi Warga Belajar

Dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional semangat belajar dan kemauan warga belajar untuk maju yang diutamakan, maka dari segi tempat, waktu, jadwal hingga pembelajarannya harus sesuai dengan kenyamanan, kebutuhan dan yang berkaitan memecahkan masalah warga belajar. Di sini, penyelenggara mengupayakan tempat belajar yang strategis dan mudah dijangkau oleh warga belajar. Begitu juga dengan waktunya, menyesuaikan waktu luang warga belajar. berikut penjelasan informan NM pada tanggal 4 September 2014 terkait dengan salah satu faktor pendorong keberhasilan program KF di Desa Karangpring:

“Faktornya bisa berhasil gitu ya? Mungkin kalau yang kemarin itu kebetulan warga belajar tempatnya tidak terlalu jauh. Jadi dari tingkat kehadirannya tinggi jadi bisa maksimal. Karena kalau jauh itu yang jadi kendala. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita masuki. Seperti yang saya katakan tadi banyak kegiatan muslimatan yang berbarengan dengan jadwal kita masukin. Malah banyak yang sudah bisa baca ikut juga membantu haha.”

Menurut informan NM di atas, selain tempat yang strategis dan mudah dijangkau warga belajar, waktu juga memanfaatkan kegiatan muslimatan warga belajar sehingga dengan begitu memudahkan warga belajar dan tutor untuk belajar. Oleh karena itu, penentuan waktu dan tempat salah satu hal penting dalam mencapai keberhasilan program Keaksaraan Fungsional. ini juga salah satu yang mendorong keberhasilan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tahun 2013.

4.5 Kendala YPPI Nurul Wajid dalam Program Keaksaraan Fungsional (KF) dan Upaya Mengatasinya

Menurut data yang peneliti dapat ketika turun lapang, kendala paling dominan adalah rasa malas atau perasaan tidak butuh dari warga belajar Desa Karangpring saat pembelajaran berlangsung. seperti pada (Bab 2, halaman 16), Warga Belajar yang mayoritas orang dewasa mempunyai konsep diri yang kuat dan mempunyai kebutuhan untuk mengatur dirinya, oleh karena itu mereka cenderung menolak apabila dibawa ke dalam situasi yang digurui atau

diperlakukan seperti anak-anak. Maka kadang muncul rasa malas dalam diri mereka. Berikut pernyataan dari informan NM pada tanggal 4 September 2014, NA pada tanggal 16 Agustus 2014 dan SJ pada tanggal 7 Desember 2014:

“Kendala ya.. Dari WB itu juga ada yang males kadang-kadang. Bukan males, cuman kadang WB tidak merasa butuh saja. Kalau tidak merasa butuh kan berarti disemangati lagi..” NM

“..Nah kalau hambatannya atau kendalanya itu ya memang memberikan pelajaran kepada orang dewasa itu tidak mudah. Karena apa, kalau orang dewasa itu misalkan tidak hadir satu dua kali itu kita tidak bisa menegur karena memang orang dewasa beda dengan anak-anak. Lalu, ada yang tidak bisa-bisa membaca menulis. Kok tidak bisa-bisa itu memang suatu tantangan tersendiri artinya memang tidak mudah dan lebih sulit. Iya seperti itu. Terus berhubungan dengan kegiatan masyarakat itu sendiri artinya pas kalau musim bekerja banyak Warga Belajar yang tidak bisa hadir maka proses belajarnya mereka tidak terus” NA

“Ya yang pertama itu agak repot, agak susah juga ya karena kan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya agak susah untuk mengumpulkannya. Masalahnya kan orang yang tidak pernah belajar itu malas untuk mau belajar..” SJ

Jadi, kendala utama dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring adalah rasa malas dari warga belajar. Menurut ketiga informan tersebut, rasa malas yang timbul dari warga belajar karena warga belajar itu sendiri yang rata-rata sudah dewasa sehingga tidak mudah untuk memberikan pelajaran kepada orang dewasa. Dan juga karena warga belajar tersebut yang dulunya belum pernah mengenyam pendidikan maka tidak mudah mengajak untuk belajar lalu timbul rasa malas dari mereka. Hal tersebut wajar karena orang dewasa memiliki sifat dan pemikiran yang berbeda dengan anak-anak, mereka lebih banyak memiliki pengalaman daripada anak-anak maka tidak mudah untuk mengubah sikap orang dewasa (Bab 2, halaman 16). Intinya bahwa faktor warga belajar yang mayoritas orang dewasa dan tidak mudah untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Berikut pernyataan dari informan SK dan AA menguatkan bahwa warga belajar yang rata-rata sudah tua atau dewasa tidak mudah untuk diberikan pengajaran:

“Tidak ada. Ya cuma kendalanya mungkin karena mereka sudah tua, kadang mereka sulit dalam mempelajari. Ya Alhamdulillah kalau sekarang mereka sudah bisa.” SK

“Cuma yaitu, cara menangkap murid-murid itu sulitlah karena keadaan mereka yang sudah tua-tua Mbak. Ya ada setengah dari murid-murid. Kalau mereka tidak mengerti terus saya ulang-ulang mengajarnya sampai mereka bisa.” AA

Oleh karena itu, para penyelenggara dan tutor, terutama tutor yang paling berperan saat proses belajar warga belajar melakukan beberapa upaya untuk menghilangkan rasa malas dan tidak butuh dari warga belajar di Desa Karangpring. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, upaya-upaya tersebut seperti pada penuturan informan AA, SY, SJ, SK dan NM, yaitu:

“Cuma yaitu, cara menangkap murid-murid itu sulitlah karena keadaan mereka yang sudah tua-tua Mbak. Ya ada setengah dari murid-murid. Kalau mereka tidak mengerti terus saya ulang-ulang mengajarnya sampai mereka bisa.” AA

“Ya dengan telaten begitu. Diajarkan lagi dengan diulang-ulang sampai mereka bisa.” SY

“..Triknnya ya menjelaskan kepada mereka bahwa bisa membaca, menulis, berhitung itu penting. Menjelaskan agar kita ini tahu karena ini suatu kebutuhan dan agar tidak ketinggalan dari yang lain. Tapi menjelaskannya menyesuaikan kemampuan mereka masing-masing. Ya awalnya ada yang masih ragu. Lalu dari mulut kemulut mereka semakin banyak yang datang.” SK

“..Kalau tidak merasa butuh kan berarti disemangati lagi. Maka dari itu informan NA memilih tutor itu yang pertama bisa mengajar, yang kedua itu orang yang sedikit berpengaruh. Maksudnya berpengaruh itu kalau mengajak warga datang itu tidak sampai lebih dari dua kali menyuruh datang. Karena seperti pak kyai pak ustad di daerah itu guru-guru anaknya ngaji itu. Kalau bisa ngajar meskipun lulus SD tapi kegiatannya sehari-hari sering menulis itu kan tidak apa-apa..” NM

“Jadinya saya mencari akal gimana untuk bisa mengumpulkan warga belajar. Ya caranya ya disuruh kumpul di mushola. Kebetulan saya ada jamaah di sana. Tiap malam rabu ada istigosah yang di dalamnya ada sekitar 20 orang, ya saya cari sekitar 5 orang yang benar-benar tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Akhirnya bisa terkumpul dan berjalanlah.. Ya untuk menyemangati mereka itu saya menyambungkan dengan acara istigosah itu. Jadi setelah acara istigosah tersebut dilaksanakan kegiatan belajar, akhirnya

kan terkumpul di sana. Yaitu, jadi disiasati dengan acara tersebut. Akhirnya setiap malam rabu sama malam jumat dilaksanakan. Jadi setelah acara istigosah. Masalahnya kalau diadakan disiang hari mereka kan kerja terus.”
SJ

Dari kelima informan di atas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan pertama adalah kesabaran dan ketelatenan para tutor dalam memberi pelajaran kepada warga belajar, upaya tersebut disampaikan oleh informan SK dan AA. Adanya kesabaran dan ketelatenan dari tutor adalah salah satu modal utama untuk memberikan semangat kepada warga belajar, sehingga para warga belajar termotivasi untuk mengikuti proses belajar mengajar. Upaya lainnya adalah penyelenggara utama yakni informan NA menentukan para tutor yang bisa dikatakan adalah tokoh masyarakat di Desa Karangpring. Hal tersebut membuat warga belajar percaya dan bersedia untuk belajar bersama orang-orang yang mereka percayai di Desa Karangpring. Dan juga para tutor sering membawa makanan dan minuman sebagai penambah semangat dan penghilang kebosanan warga belajar saat proses belajar mengajar berlangsung. Serta, upaya terakhir adalah memanfaatkan kegiatan rutin warga belajar di desa, yaitu istigosah dan acara muslimatan lainnya. Hal tersebut berhasil membuat warga belajar bersedia belajar.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yang merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat buta huruf di Desa Karangpring telah berlangsung dengan baik walaupun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Penerima manfaat program adalah masyarakat Desa Karangpring yang berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah atau masih buta aksara latin (melek aksara parsial).

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (KF) tingkat Dasar di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2013 telah mengikuti acuan Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK Dasar) dengan pelaksanaan minimal 114 jam masa pembelajaran. Maka dapat disimpulkan program Keaksaraan Fungsional yang terlaksana pada tanggal 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman program Keaksaraan Fungsional tingkat Keaksaraan Dasar. Keberhasilan dilihat dari unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan system pembelajaran Keaksaraan Fungsional, seperti; tujuan, kelompok sasaran, bahan belajar, sarana belajar, kegiatan, waktu dan tempat pembelajaran dirancang sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi lokal dimana warga belajar di Desa Karangpring yang mayoritas bekerja sebagai petani. Keberhasilan juga dilihat dengan adanya tingkat pencapaian hasil pembelajaran warga belajar dalam kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara, sehingga mereka dapat dikatakan melek aksara serta memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh warga belajar. Sesuai dengan data hasil Rekap Hasil Evaluasi dan Perkembangan Warga Belajar Desa Karangpring 2013 yang menunjukkan bahwa 80% warga belajar telah mampu membaca, menulis, berhitung, mendengarkan dan berbicara. Secara lebih

mendalam implementasi program Keaksaraan Fungsional dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Implementasi program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring pada tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa dimulai dari tahap persiapan hingga penilaian hasil pembelajaran telah sesuai dengan komponen-komponen implementasi program KF yang ada. Berikut penjelasannya:
 - a. Tahap Persiapan
Sesuai dengan komponen implementasi program Keaksaraan Fungsional yakni, perencanaan strategis. Bentuk perencanaan strategis terlihat dari awal penyelenggara melakukan musyawarah dengan instansi lembaga terkait, yaitu UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi, dilanjut dengan mempersiapkan warga belajar dan tutor. Kurangnya adalah pelatihan yang efektif untuk para tutor. Selanjutnya dalam pendekatan pada warga belajar, penyelenggara mempersiapkan strategi agar calon warga belajar tertarik mengikuti pembelajaran. Dan terakhir pengajuan proposal kepada Gubernur Jawa Timur untuk pengajuan dana hibah.
 - b. Tahap Pelaksanaan
Sesuai dengan apa yang diharapkan, pengelolaan kelompok belajar dari melihat karakteristik warga belajar; jadwal pertemuan; kegiatan belajar; bahan belajar dan kelangsungan kelompok, program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tahun 2013 meliputi dimulai dengan kegiatan menentukan kelompok belajar, penyusunan jadwal belajar, proses pembelajaran dan pendidikan latihan keterampilan sebagai kegiatan tambahan pembeda dari desa lain. Serta adanya dukungan dari para penyelenggara dengan tutor juga rasa minat belajar warga belajar merupakan bentuk dukungan birokrasi dan masyarakat
 - c. Tahap Penilaian Hasil pembelajaran
Bentuk penilaian yang komprehensif pada program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring tahun 2013 yaitu, pertama, penilaian

proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap warga belajar secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan. *Kedua*, penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi warga belajar terhadap standar kompetensi keaksaraan dasar yang harus diselesaikan selama mengikuti program. *Ketiga*, warga belajar yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Namun hingga sekarang belum terbaginya SUKMA tersebut ke tangan warga belajar karena terdapat kendala dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

2. Faktor pendorong keberhasilan YPPI Nurul Wajid dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat Dasar di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tahun 2013 adalah rasa keingintahuan warga belajar Desa Karangpring yang dari dirinya sendiri, adanya honor tutor sebagai bentuk penyemangat tutor di sepuluh kelompok di Desa Karangpring, dilaksanakannya kegiatan tambahan pendidikan keterampilan untuk warga belajar dan penentuan tempat belajar yang strategis dan mudah dijangkau warga belajar serta waktu yang menyesuaikan waktu luang dan memanfaatkan kegiatan rutin muslimatan warga belajar.
3. Kendala yang dihadapi penyelenggara Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) Nurul Wajid dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional tingkat dasar tahun 2013 adalah rasa malas atau perasaan tidak butuh dari warga belajar saat pembelajaran berlangsung. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara beserta tutor saat itu, yaitu tetap sabar dan telaten dalam memberikan pembelajaran kepada warga belajar, menentukan tutor seorang tokoh masyarakat di Desa Karangpring,

membawa makanan dan minuman sebagai penambah semangat dan penghilang kebosanan warga belajar saat pembelajaran berlangsung, dan memanfaatkan kegiatan rutin warga belajar di desa, yaitu istigosah dan acara muslimatan lainnya.

5.2 Saran

Masyarakat yang buta huruf setelah belajar dan lancar membaca, menulis dan berhitung jika tidak terus berlatih dan mempraktekan pastinya akan rawan buta huruf kembali, maka perlu adanya keberlanjutan dari program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring untuk kedepannya agar warga buta huruf di Desa Karangpring berkurang hingga tidak ada lagi yang buta huruf. Perlu juga penyelenggara, yakni YPPI Nurul Wajid mengusahakan agar dibangunnya TBM (Taman Baca Masyarakat) yang merupakan salah satu pendorong masyarakat untuk gemar belajar. Lalu, kurangnya pelatihan secara efektif untuk para tutor maka untuk selanjutnya lebih baik calon tutor untuk diberi pelatihan terdahulu agar perkembangan berjalannya program Keaksaraan Fungsional lebih efektif dalam menuntaskan angka buta huruf pada masyarakat Desa Karangpring.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Adi, Isbandi R. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adi, Isbandi R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Edisi Revisi 2012)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Petunjuk Teknis Pengajaran dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2012*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kusnadi, M.Pd, dkk.2005. *Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional.
- Meleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Midgley, James.2005.*Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta:Ditperta Islam Depag RI.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Materi Pelatihan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Jember*.Jember.
- Purwanto, Edi, Iftitah Nafika, dkk. 2011. *Wajah Suram Pendidikan Kita*. Malang: Averroes Press.
- Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya. Airlangga University.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika ditama.
- Sujarwo. 2008. *Konsep Dasar Pendidikan Keaksaraan Fungsional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah.2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana renada Media Group.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Usman, Husaini dan Purnomo.2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : C A P S

Internet

- BPS. 2012. *Indikator Pendidikan , 1994-2012*, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=28.(diakses pada tanggal 22 Januari 2014).
- Laporan Pencapaian Pembangunan Milenium di Indonesia 2011*, http://www.bappenas.go.id/files/1913/5229/9628/laporan-pencapaian-tujuan-pembangunan-milenium-di-indonesia-2011_20130517105523__3790__0.pdf.(diakses pada tanggal 2 Februari 2014).
- Kementerian Sosial RI. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, <http://www.kemsos.go.id/modules>. (diakses pada tanggal 7 Februari 2014)
- _____. 2013. *Provinsi Jatim Berhasil Menekan Angka Buta Aksara*, <http://bappeda.jatimprov.go.id/2013/03/06/provinsi-jatim-berhasil-menekan-angka-buta-aksara/>.(diakses pada tanggal 24 Januari 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Pendidikan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (S.N.P)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.



Lampiran 1. Telaah Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah		
	1	2	3
Judul Penelitian	Efektivitas Program Keaksaraan Fungsional Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	Implementasi Pembelajaran Keaksaraan terhadap Pendidikan Orang Dewasa (Penelitian tentang Keaksaraan di PKBM Hidayah)	Keberhasilan Program Keaksaraan Fungsional (KF) (Kasus: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Damai Mekar, Kelurahan Sukadamai, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor)
Tahun Penelitian	2013	2012	2008
Keluaran Lembaga	Perpustakaan Universitas Jember (UNEJ)	STKIP Siliwangi Bandung	Institut Pertanian Bogor (IPB)
Pertanyaan Penelitian	Bagaimana tingkat efektivitas program Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat miskin yang berada di Desa Sukowono?	Bagaimana implementasi pembelajaran keaksaraan terhadap pendidikan orang dewasa di PKBM Hidayah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan program KF di PKBM Damai Mekar? 2. Bagaimana keberhasilan program KF di PKBM Damai Mekar? 3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan program KF tersebut? 4. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program?

Temuan	Program Keaksaraan Fungsional bagi masyarakat miskin yang berada di Desa Sukowono tidak berjalan efektif. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan terdapat beberapa kegiatan yang tidak berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku.	Dalam penelitian ini, peneliti mengimplementasi program pendidikan keaksaraan yang meneliti respon dari warga belajar di PKBM Hidayah. Dengan menggunakan perhitungan angka-angka yang dimunculkan dalam bentuk persentase. Respon warga belajar terhadap keaksaraan PKBM Hidayah ditandai dengan jumlah warga belajar seluruhnya 20 orang. Hampir seluruh warga belajar menyenangi adanya keaksaraan PKBM Hidayah (90%) yang kemudian ditindak lanjuti hampir seluruhnya segera mendaftar dan mengikutinya (80%). Dan dalam tingkat keberhasilannya, program pendidikan keaksaraan di PKBM Hidayah dapat dikatakan berhasil terlaksana dengan baik. Seperti yang dijelaskan dengan menggunakan perhitungan angka-angka yang dimunculkan bentuk angka persentase.	Peneliti dengan baik mengulas tentang keberhasilan program KF di Damai Mekar. Dari penyebab hingga dampak pada warga belajar di desa tersebut. Yang menarik ditemukannya warga belajar di sana yang memiliki motivasi tinggi untuk tetap belajar keaksaraan meski program tersebut selesai dilaksanakan. Dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi pada warga belajar di Damai Mekar yang dipengaruhi dari lingkungannya.
Metode	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
Keunggulan Penelitian	Mencakup serta data-data valid tentang seluruh pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Sukowono Kabupaten Jember	Karena menggunakan metode kuantitatif maka hasil penelitian yang didapat peneliti adalah data angka yang pasti dengan mudah ditemukan kesimpulannya.	Peneliti dengan baik mengulas tentang keberhasilan program KF di Damai Mekar. Dari penyebab

			hingga dampak pada warga belajar di desa tersebut.
Persamaan dengan penelitian ini	Sama-sama meneliti program Kaksaraan Fungsional di salah satu Desa di Kabupaten Jember	Fokus Penelitian tentang implementasi program keaksaraan	Sama-sama meneliti tentang program Keaksaraan Fungsional di suatu desa yang telah dilaksanakan dengan berjalan lancar.
Perbedaan dengan penelitian ini	Perbedaan pada fokus penelitian antara implementasi program dengan efektivitas program tersebut	Perbedaan pada program keaksaraan itu sendiri. Di penelitian ini tidak disebutkan bahwa program Keaksaraan Fungsional tetapi yang disebutkan adalah program Pendidikan Keaksaraan. Dan juga beda pada metode penelitiannya yang menggunakan metode kuantitatif. Dan berbeda lokasi penelitian.	Pada aspek penelitian, yaitu tentang keberhasilan program KF di Damai Mekar, faktor hingga dampak bagi Warga Belajar. Penyelenggara program KF di Damai Mekar adalah PKBM itu sendiri, berbeda dengan di Karangpring yang diselenggarakan oleh sebuah Pondok Pesantren YPPI. Berbeda pula metode penelitian yang digunakan.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penyelenggara Program

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)

(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Untuk Penyelenggara Program

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

Lama terlibat dalam Program :

1. Bagaimana proses persiapan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013?
3. Bagaimana proses penilaian hasil pembelajaran kegiatan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring pada tahun 2013?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013 lalu?
5. Kapan tepatnya pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring pada tahun 2013?
6. Dimana tempat pelaksanaan atau kegiatan belajar Warga Belajar program Keaksaraan Fungsional pada tahun 2013?
7. Siapa saja pelaksana program Keaksaraan Fungsional pada tahun 2013?
8. Faktor apa saja yang mendorong keberhasilan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013 lalu?
10. Bagaimana solusi penyelenggara program dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013 lalu?

11. Dampak yang dirasakan oleh warga belajar setelah mendapatkan program Keaksaraan Fungsional (Keaksaraan Dasar) di Desa Karangpring yang terlaksana pada tahun 2013 lalu?



Lampiran 2A. Pedoman Wawancara Warga Belajar (Penerima Manfaat Program)

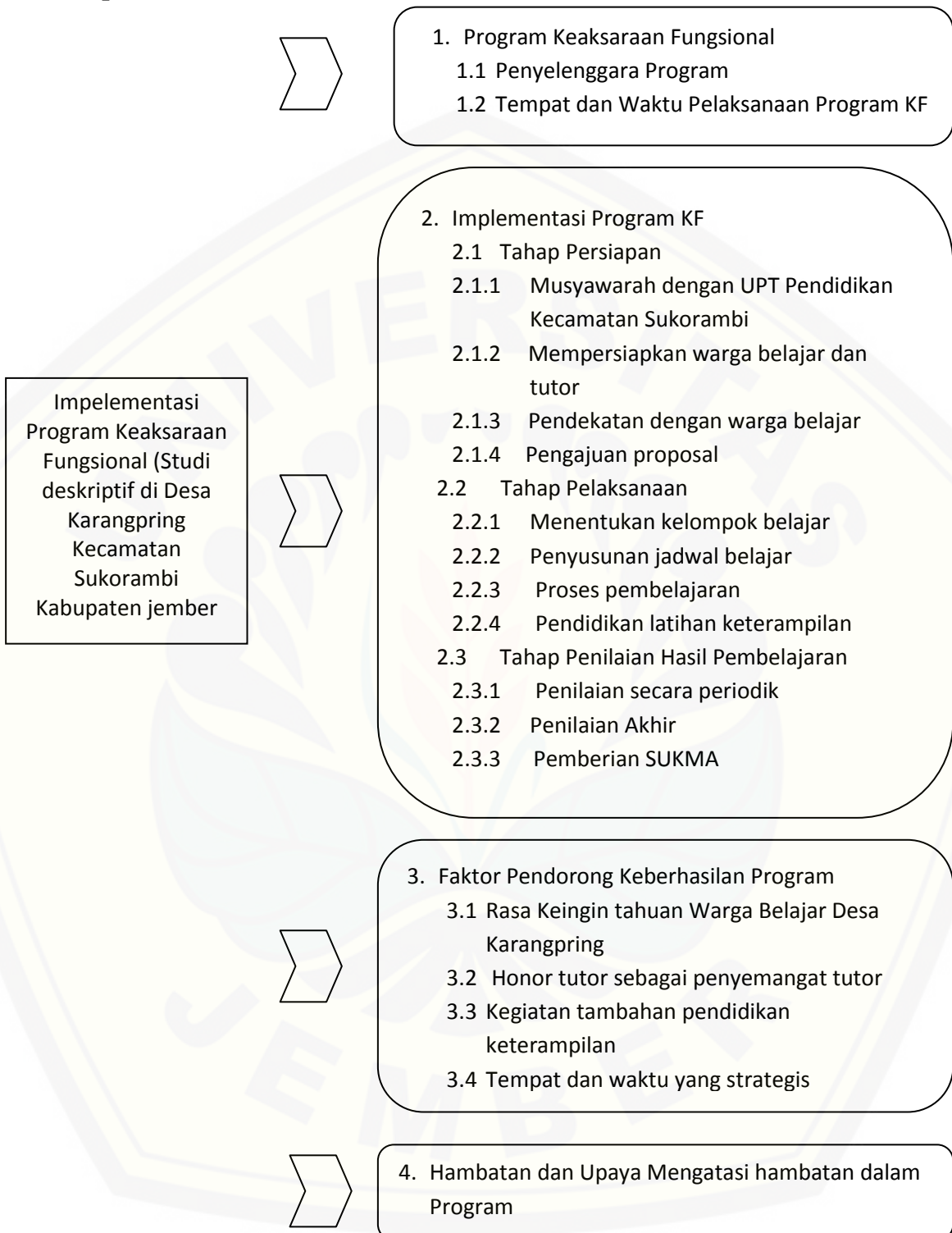
Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)

(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Untuk Penerima Manfaat Program (Warga Belajar)

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin:.....
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan :
7. Program KF:
 - a. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang program Keaksaraan Fungsional?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional?
 - c. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan program Keaksaraan Fungsional?
 - d. Dalam bentuk apa Bapak/Ibu berkontribusi dalam proses perencanaan program Keaksaraan Fungsional?
 - e. Apa alasan Bapak/Ibu akhirnya bersedia menjadi Warga Belajar program Keaksaraan Fungsional?
8. Pelaksanaan Program KF:
 - a. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu saat menjadi Warga Belajar?
 - b. Kapan dan bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berlangsung?
 - c. Apa saja kegiatannya? Apa ada kegiatan tambahan yang diberikan oleh penyelenggara program KF?
 - d. Bagaimana jadwal belajar mengajar selama program berlangsung?
 - e. Fasilitas apa saja yang diberikan penyelenggara program?
 - f. Materi apa saja yang diajarkan?
 - g. Adakah kendala yang Bapak/Ibu alami saat kegiatan belajar mengajar berlangsung?
 - h. Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam mengatasi kendala tersebut?
9. Pasca menjadi Warga Belajar program KF:
 - a. Apa saja manfaat yang didapat Bapak/Ibu setelah lulus menjadi Warga Belajar?
 - b. Apakah pasca menjadi Warga Belajar Bapak/Ibu sekarang masih dapat membaca, menulis dan berhitung dengan lancar, baik dan benar?

Lampiran 3. Taksonomi



Lampiran 5. Data Warga Belajar Desa Karangpring 2013

BUKU INDUK WARGA BELAJAR KF TINGKAT DASAR
TAHUN 2013

No.Urut BPS	Nama Calon WB	Jenis Kelamin		Umur (Th)	Alamat				Pekerjaan
		L	P		Desa	Dusun	RT	RW	
210.137	NA IM	1		50	KARANGPRING	Durjo	01	02	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
210.146	HADI	1		55	KARANGPRING	Durjo	01	02	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
210.119	NABIYA		1	50	KARANGPRING	Durjo	01	02	Pekerja keluarga
210.125	RAHMA		1	50	KARANGPRING	Durjo	01	02	Pekerja keluarga
210.144	BUNA		1	50	KARANGPRING	Durjo	01	02	Pekerja bebas
210.121	MASRIYA		1	55	KARANGPRING	Durjo	02	02	Pekerja bebas
210.124	TASMI		1	55	KARANGPRING	Durjo	02	02	Pekerja bebas
210.129	SITI		1	55	KARANGPRING	Durjo	03	02	Pekerja bebas
210.120	MINA		1	57	KARANGPRING	Durjo	03	02	Pekerja bebas
210.122	NARMI		1	59	KARANGPRING	Durjo	03	02	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.436	MAWI P MIDA	1		54	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
209.449	SUWARNI B US		1	42	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
209.448	JIBI MUTIK		1	45	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tetap
209.435	SUPIYA B SARUJI		1	46	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja keluarga
209.445	SAYATI B FAUSI		1	46	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha sendiri
209.458	SUMANI B MISTARI		1	47	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
209.443	MA'ANI B HORI		1	49	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
209.457	SUPIYA G SU		1	51	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja keluarga
209.437	HOTIJA B AHMAD		1	54	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
209.455	MASTURI B DULLA		1	54	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.461	SAFUNA		1	58	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.432	TIPA B SAERI		1	59	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Pekerja bebas
210.074	LASMINA		1	48	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja bebas
210.067	BE'ATI		1	50	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja keluarga
210.059	MU'ARA		1	51	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja bebas
210.072	NABIYA B TILLA		1	55	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja bebas
210.071	SULIHA		1	56	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja bebas
210.063	MARSITI		1	59	KARANGPRING	GENDIR	02	03	Pekerja bebas
210.507	SAFI'I	1		59	KARANGPRING	GENDIR	02	04	Pekerja bebas
210.508	SUNA'IYA		1	56	KARANGPRING	GENDIR	02	04	Pekerja bebas
209.710	SARIMAN	1		53	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha sendiri
209.711	SARIMAN P NURUL	1		54	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha sendiri
209.695	RUSDE R FATHOR	1		58	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.715	SUBAIDA		1	27	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.696	MIYA B TAUFIK		1	40	KARANGPRING	GENDIR	02	01	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
209.691	SIATI B NUR		1	45	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
209.697	TUNI B WAHYU		1	51	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Berusaha sendiri
209.717	SIYAMA B SU		1	51	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
209.699	SALMA B ASIS		1	53	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
209.712	HOSNA		1	53	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
209.708	BE'A B SITI		1	55	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas

42	209.714	IYA B AMAR		1	58	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
43	209.722	BURI B NIPA		1	58	KARANGPRING	GENDIR	03	01	Pekerja bebas
44	210.085	RAS P BULASI	1		56	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
45	210.103	ASBULLA	1		57	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha sendiri
46	210.105	SARYAN P IS	1		58	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
47	210.106	MISNAYA		1	39	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Pekerja keluarga
48	210.086	JUM		1	46	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Pekerja keluarga
49	210.092	AKMI		1	48	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Pekerja bebas
50	210.104	HONADA		1	49	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha sendiri
51	210.113	BUYAMI		1	51	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha sendiri
52	210.117	SANI		1	53	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha sendiri
53	210.096	MADRIYA		1	54	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Pekerja bebas
54	210.084	DIMA		1	55	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Pekerja keluarga
55	210.081	AKMINA		1	59	KARANGPRING	GENDIR	03	03	Berusaha sendiri
56	210.471	MUDERI	1		48	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja bebas
57	210.455	JETEM	1		52	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Berusaha sendiri
58	210.472	MUNARI		1	46	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja bebas
59	210.470	MISNA		1	47	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja keluarga
60	210.462	NIDI		1	53	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja keluarga
61	210.459	SAMI		1	57	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja keluarga
62	210.464	LIMA		1	58	KARANGPRING	GENDIR	03	04	Pekerja bebas
63	209.724	SUMAN	1		52	KARANGPRING	GENDIR	04	01	Pekerja bebas
64	209.746	SAMI		1	50	KARANGPRING	GENDIR	04	01	Pekerja bebas
65	209.733	SITINA		1	58	KARANGPRING	GENDIR	04	01	Pekerja bebas
66	210.482	JUNUS	1		51	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja bebas
67	210.475	TOGIN	1		59	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja bebas
68	210.476	SIYE		1	44	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja bebas
69	210.483	SUPIANI		1	48	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja bebas
70	210.481	MASRINA		1	51	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja bebas
71	210.477	ARBE'IYA		1	57	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Pekerja keluarga
72	210.487	SARI		1	59	KARANGPRING	GENDIR	04	04	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
73	209.762	ASMA		1	39	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Berusaha dibantu buruh tdk tetap
74	209.749	SASI		1	52	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja bebas
75	209.752	SADHI		1	53	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja bebas
76	209.751	TIJA B HAYATI		1	54	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja bebas
77	209.767	TRIYA		1	54	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja keluarga
78	209.754	TOYA		1	58	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja keluarga
79	209.756	EBBU		1	58	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja keluarga
80	209.760	BHU		1	59	KARANGPRING	GENDIR	01	02	Pekerja keluarga
81	209.592	SUMARNI		1	59	KARANGPRING	KRAJAN	04	02	Pekerja keluarga
82	209.550	ROMLI	1		56	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Berusaha sendiri
83	209.540	ASMAT	1		57	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Berusaha sendiri
84	209.546	SANIDIN	1		57	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Pekerja bebas
85	209.544	SUPARMAN	1		59	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Berusaha sendiri
86	209.537	MISNA		1	51	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Berusaha sendiri

209.527	TOYA		1	52	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Pekerja keluarga
209.541	MARLINA		1	52	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Pekerja keluarga
209.548	SITI AMINAH		1	54	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Pekerja keluarga
209.549	SURYAMA		1	57	KARANGPRING	KRAJAN	02	02	Pekerja keluarga
209.531	SUMI		1	59	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.902	TOYANI		1	40	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.914	MANIS		1	59	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.639	JUMAATI		1	50	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.643	SURANI		1	50	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.687	B SUS		1	51	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Pekerja keluarga
209.627	NITI		1	55	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Berusaha sendiri
209.636	MISNI		1	55	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Berusaha sendiri
209.628	SRATI		1	57	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Berusaha sendiri
209.685	MUSAAN	1		45	KARANGPRING	KARANGPRING	01	01	Berusaha sendiri
	Jumlah		20	80					

Jember, 2 September 2012

Ketua Penyelenggara,

NUR ALI, SP. MPd


Lampiran 6. Perkembangan Warga Belajar

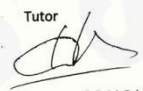
1. Duku 1

1.1 Bulan Agustus 2013

F. Perkembangan Warga Belajar

No.	Nama Warga Belajar	Umur	Kompetensi																Keterangan				
			Membaca				Menulis				Berhitung				Berbicara					Mendengarkan			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
1	SUMI	59			✓	✓				✓				✓				✓				✓	A : Sangat baik (Score 90 - 100)
2	TOYANI	40			✓					✓				✓				✓				✓	
3	MANIS	59			✓					✓				✓				✓				✓	B : Baik (Score 75 - 89)
4	JUMAATI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
5	SURANI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
6	B SUS	51			✓					✓				✓				✓				✓	C : Cukup (Score 60 - 74)
7	NITI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
8	MISNI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
9	SRATI	57			✓					✓				✓				✓				✓	
10	MUSAAN	45			✓					✓				✓				✓				✓	D : Kurang


Mengetahui :

 NURUL WAJID, S.P.M.Pd

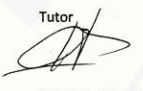
Jember, 30 Agustus 2013
 Tutor

 NUR ALI, S.P.M.Pd

1.2 Bulan September 2013

F. Perkembangan Warga Belajar

No.	Nama Warga Belajar	Umur	Kompetensi																Keterangan				
			Membaca				Menulis				Berhitung				Berbicara					Mendengarkan			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
1	SUMI	59			✓	✓				✓				✓				✓				✓	A : Sangat baik (Score 90 - 100)
2	TOYANI	40			✓					✓				✓				✓				✓	
3	MANIS	59			✓					✓				✓				✓				✓	B : Baik (Score 75 - 89)
4	JUMAATI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
5	SURANI	50			✓					✓				✓				✓				✓	
6	B SUS	51			✓					✓				✓				✓				✓	C : Cukup (Score 60 - 74)
7	NITI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
8	MISNI	55			✓					✓				✓				✓				✓	
9	SRATI	57			✓					✓				✓				✓				✓	
10	MUSAAN	45			✓					✓				✓				✓				✓	D : Kurang

Mengetahui :

 NURUL WAJID, S.P.M.Pd

Jember, 30 September 2013
 Tutor

 NUR ALI, S.P.M.Pd

Lampiran 7. Contoh SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara)

- Tampak depan

NO.SERI: 05.33.2011.10271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
SURAT KETERANGAN MELEK AKSARA (SUKMA)
PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN**

Dinas Pendidikan Kabupaten/KotaJEMBER..... ProvinsiJAWA TIMUR.....
 menerangkan bahwa :
 nama : P. SO
 tempat, tanggal lahir : JEMBER, 41 TAHUN
 jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
 alamat : DUSUN DURJO
 DESA KARANGPRING.....

telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh YPMI.NURUL WAHID.....
 pada tanggal 5 JANUARI s.d 5 JULI tahun 2012.. di RT02. RW 02. Desa/Kelurahan KARANGPRING
 Kecamatan ..SUKORAMBI..... Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
 Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor. 258 / E / MS tanggal 3 Juni tahun 2009, yang bersangkutan dinyatakan telah
 mencapai kompetensi Keaksaraan Dasar. JEMBER, 10 JULI 2012




Asst. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
 Dinas Pendidikan Kabupaten/KotaJEMBER.....
 u.b. Kepala Bidang PNFI

..... Drs. SUDIYONO, MM
 NIP ... 19610509 199003 1 005

- Tampak belakang

Hasil Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan

NO	Kompetensi	Nilai	Predikat
1	Mendengarkan	A	SANGAT BAIK
2	Berbicara	C	CUKUP
3	Membaca	B	BAIK
4	Menulis	B	BAIK
5	Berhitung	B	BAIK


JEMBER, 10 JULI 2012
 Ketua Penyelenggara

 NUR. ALI, S.P.,M.Pd.....

Lampiran 8. Dokumentasi

a. Kegiatan Pembelajaran



Gambar : Kegiatan pembelajaran warga belajar kelompok Duku 1-6



Gambar : Kegiatan Pembelajaran warga belajar kelompok Duku 7-10

b. Kegiatan Tambahan Pendidikan Keterampilan



Gambar : Kegiatan Keterampilan Membuat *Grunjung* atau Keranjang



Gambar: Kegiatan Keterampilan Membuat Pupuk Kompos



Gambar : Kegiatan Keterampilan Membuat Kripik Talas



Gambar : Kegiatan Keterampilan Membuat Kripik Singkong



Gambar : Kegiatan Keterampilan Membuat Onde-onde

c. Wawancara Peneliti



Gambar : Wawancara dengan informan NA



Gambar : Wawancara dengan informan NM



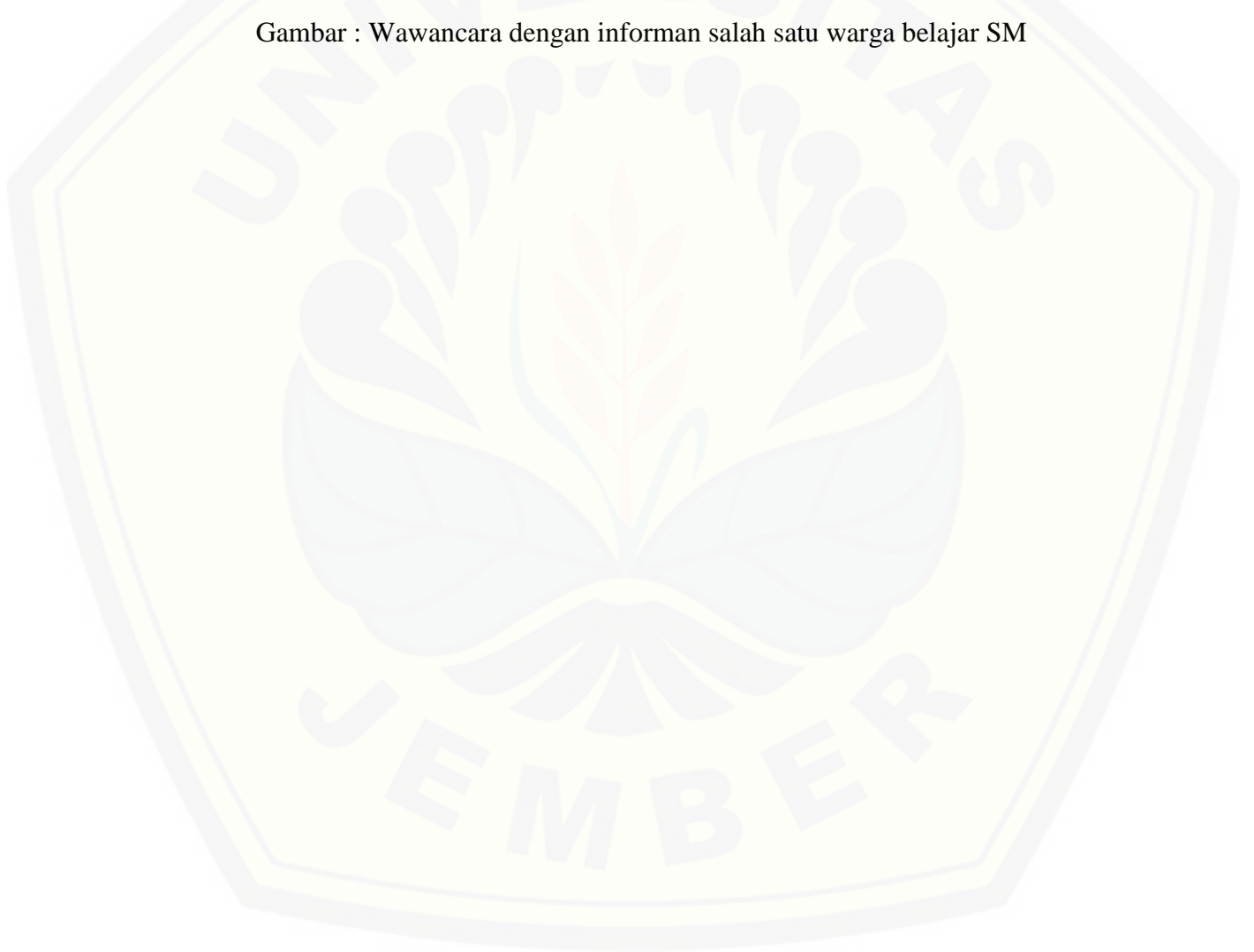
Gambar : Wawancara dengan informan warga belajar SM, SH, TR, AR



Gambar : Wawancara dengan informan tutor SK, SJ, SY, AA



Gambar : Wawancara dengan informan salah satu warga belajar SM



Lampiran 9. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1177 /UN25.3.1/LT/2014
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

14 Juli 2014

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2643/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 07 Juli 2014, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Laorien Naivalent Masbut/100910301045
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Dr. Sutomo V/111 Jember/Hp. 085746507115
Judul Penelitian : Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (Studi-Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua bulan (14 Juli 2014 – 14 September 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP.196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

b. Surat Ijin Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember



Kepada
Yth. Sdr. : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember
2. Ketua YPPI "Nurul Wajid"
Di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1555/314/2014

Tentang

IJIN PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat dari ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 1177/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / No. Induk : Laorien Naivalent Masbut 100910301045
Instansi / Fak : FISIP Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember
Keperluan : Melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)
Lokasi : Dinas Pendidikan dan Desa Karangpring Kec. Sukorambi
Tanggal : 17-07-2014 s/d 17-09-2014

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 17-07-2014

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
2. Arsip

Drs. MOH. HASYIM, M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 195902131982111001

- d. Surat selesai penelitian dari Yayasan Pondok Pesantren Islam (YPPI) Nurul Wajid



**YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM
" NURUL WAJID "**

Akta Notaris No. 11 Tahun 2003

Jl. Pakel 99 Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Jember Telp. (0331) 7767116

Jember, 10 Desember 2014

Nomor : 42/YPPI.NW/XII/2014
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Selesai Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Jember
Di -

JEMBER

Mendasar pada Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember tertanggal 17 Juli 2014 perihal Ijin penelitian maka dengan ini kami beritahukan bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Laorien Naivalent Masbut
NIM : 100910301045
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNEJ

Telah melakukan penelitian tentang "Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) " Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dengan waktu pelaksanaan tanggal 17 Juli 2014 s/d 17 September 2014.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapatnya diketahui dan terima kasih.

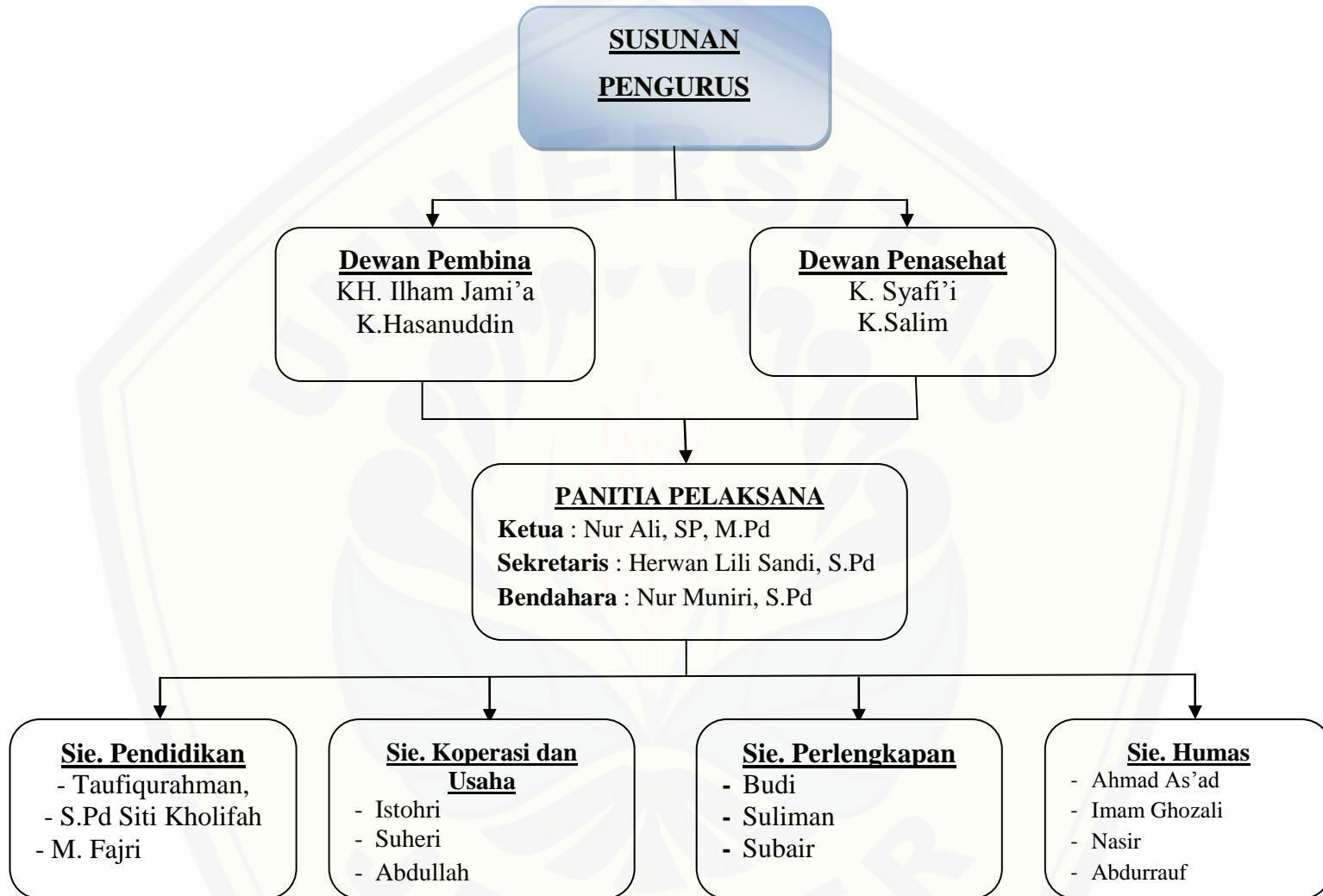
Jember, 10 Desember 2014

Ketua YPPI Nurul Wajid



NUR ALI, S.P, M.Pd

Digital Repository Universitas Jember



TRANSKIP REDUKSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)

(Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) (Studi Deskriptif di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)		Transkrip Reduksi
Program Keaksaraan Fungsional		<ul style="list-style-type: none">• “Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Desa Karangpring sudah sejak tahun 2006 dilaksanakan. Setiap tahunnya saya mengajukan sebuah proposal kepada Bapak Gubernur Jawa Timur untuk permohonan dana hibah agar dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Dasar di Desa Karangpring. Namun tidak setiap tahun Desa Karangpring mendapat dana tersebut. Karena bergantian dengan Desa lainnya. Seperti di Desa Dukuhmencek dengan masih satu Kecamatan Sukorambi.” (Informan NA)• “..penyelenggara NA program Keaksaraan Fungsional di

			<p>Desa Karangpring setiap tahunnya selalu rajin mengajukan proposal pengajuan dana kepada Dinas Pendidikan Pusat Jawa Timur. Ya karena juga masyarakat buta huruf rawan buta huruf kembali jika tidak berlanjut” (Informan SG, 11 September 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Iya, di Desa Karangpring dilaksanakan program Keaksaraan Fungsional. Bapak NA yang memberi pengaruhnya. Tiap tahun mengakses program KF. Karena masyarakat buta huruf murni rawan buta huruf kembali.” (SG, 11 April 2014)
	<p>Penyelenggara Program</p>		<ul style="list-style-type: none"> • “Dulu saya dan adik saya Pak Nur Muniri juga Pak Herwan yang sekarang di Jakarta mengikuti pelatihan tutor KF. Itu dilaksanakan di rembulan tahun 2009 kalau tidak salah. Ya di arahkan bagaimana mengatasi warga belajar yang mayoritas orang dewasa, karena pendidikan orang dewasa yang berbeda dengan anak-anak. Saya juga pernah menerima penghargaan di Malang sebagai tutor terbaik. Waktu itu memang masih sedikit tutor-tutor maka dari itu saya jadi keterima mungkin hehe.” (Informan NA, 31 Agustus 2014) • “Ya saya ini sebagai ketua juga tutor. Terus adik saya Pak Nur Muniri sebagai bendahara dalam yayasan, tutor juga. Ada Herwan Lili sekretaris tetapi sekarang sudah pindah kerja di Jakarta, makanya untuk program

			<p>kedepannya saya tidak memakai Pak Herwan lagi. Terus yang lain ada Bu Kholifah, Pak Taufik, dsb.. Jadi penyelenggara adalah pengurus yayasan Nurul Wajid ” (Informan NA, 31 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Penyelenggara di Desa Karangpring adalah yayasan pondok pesantren Nurul Wajid. Karena bapak NA ia ketua penyelenggara adalah seseorang yang professional atau sebagai tokoh masyarakat di Desa tersebut. Ia mengetuai sebuah yayasan pondok pesantren, Nurul Wajid.” (Informan SG, 11 September 2014) • “Pak NA dan saya penyelenggara dan juga merangkap jadi tutor Dek. Lebih jelasnya penyelenggara yayasan ponpes Islam Nurul Wajid. Yang diketuai oleh kakak saya Pak NA” (NM, 4 September 2014)
	<p style="text-align: center;">Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program</p>		<ul style="list-style-type: none"> • “Kalau kemarin itu acuannya bukan selama 6 bulan tetapi 120 jam pertemuan. Sekali pertemuan itu 2 jam. Seminggu biasanya ada 4 kali atau 3 kali. Itu terhitung dari 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 harus 120 jam. Itu ketentuan sejak 2012 lalu.” (NA, 31 Agustus 2014) • “Tanggalnya berapa ya. Yang jelas kemarin itu bulan Agustus sampai Desember 2013” (NM, 4 September 2014) • “Tempatnya kalau tahun 2013 kemarin ada di 10 tempat. Yang pertama di Mushola As-Syafiq ini kebetulan di mushola saya ini, terus ada mushola As-Sabil, ada mushola An-Nur, dsb.. Ada 10 mushola dan 10 tutor. Dan tiap kelompok berbeda tempatnya. Ya

			<p>sesuai kebutuhan warga belajar di mana yang paling tengah, paling dekat dan paling enak bagi warga belajar itu. Rata-rata kita ada di mushola.” (NA, 31 agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Berhubung ada sepuluh kelompok itu rata-rata di mushola semua. Kan kalau di sini itu kebanyakan dari dulu di mushola. Kebetulan kalau di desa itu di setiap halaman rumah itu ada mushola. Di sini aja itu di sebelah ada mushola karena itu juga sebagai tempat untuk kegiatan hataman, yasinan, kalau ada orang meninggal juga tahlilan. Kalau di jalan sebelah barat ini kira-kira 1 km jalan itu sudah ada sepuluh mushola hehe. Ada satu apa dua kelompok itu di masjid karena dekat masjid, di emperan masjidnya itu.” (NM, 4 september 2014) • “Ya dulu, setahun yang lalu. Di mushola sana deket rumah.” (SM, 7 September 2014) • “Iya sekolah di mushola sini. Di mushola baik dan nyaman. Sudah tempat biasa kumpul jadi nyaman” (SH, 22 Juli 2014)
<p style="text-align: center;">Implementasi Program Keaksaraan Fungsional (KF)</p>	<p style="text-align: center;">Tahap Persiapan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • “Yang pertama dilakukan mengumpulkan Warga Belajar itu dengan mengajak siapa saja warga yang masih buta huruf. Lalu setelah terkumpul dan di data ada berapa yang mau menjadi calon Warga Belajar, kita membuat proposal untuk pengajuan dana anggaran program ke Dinas Pendidikan provinsi. Setelah mendapatkan dana tersebut kita laksanakan program tersebut.” (NA, 16 Agustus 2014)

			<ul style="list-style-type: none">• “Dari awal kalau kemarin yang tahun 2013 kita laksanakan sebagaimana biasanya. Pertama adalah kita bermusyawarah bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah UPT Pendidikan Sukorambi bersama dengan para pengurus Yayasan bahwa kita laksanakan program KF akhirnya disitu diadakan identifikasi warga belajar. Artinya siapa saja yang belum bisa membaca menulis. Termasuk identifikasi kita itu kepada tutor. Artinya siapa saja tutor yang mengajar dan siap. Setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan sebagaimana identifikasi sebelumnya soal warga belajar, tutor, juga anggarannya. Karena pendidikan ini memang harus bermusyawarah dengan warga belajar tanpa dengan WB kita bakal kesulitan. Ya karena muridnya para orang tua, maka musyawarah dimana, waktunya kapan, jam berapa dsb. Dan selanjutnya mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Pusat hingga mendapat kepastian dapat tidaknya dana dari pusat ” (NA, 31 Agustus 2014)• “Ini sepengetahuan saya, selebihnya Pak NA yang lebih paham. Awalnya ya mengajukan proposal ke Diknas terus setelah itu biasanya ya dikasih atau tidak. Namanya pengajuan ya mbak. Kalau di acc ya biasanya dapat program itu lah. Lembaga kami atau yayasan kami dapat program. Kalau dapat ya dijalankan program itu selama enam bulan. Selama enam bulan itu tutor-tutor yang bekerja gitu. Yang mengajar. Warga Belajar awalnya mencari lalu diajak belajar kalau sudah ada kita
--	--	--	---

			<p>jalankan program. Karena tidak bisa mengikuti warga belajar yang sudah selesai. Bisa tetapi dalam rentan waktu yang lama karena memang ya begitu, mereka bisa saja buta huruf kembali. Apalagi sekarang tidak semudah dulu-dulu. Kalau sekarang kan Dinas Pendidikan meminta dengan nomer induk kependudukan warga. Jadinya jelas artinya tidak ada ketumpang tindihan kalau sekarang. Setelah dijalani tutor-tutornya mengikuti pelatihan, istilahnya pembekalan lah. Dalam satu lembaga biasanya satu dua yang mengikuti.” (NM, 4 September 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Awal mula pelaksanaan program Keaksaraan Fungsional di Desa Karangpring karena adanya sosialisasi petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi dalam hal ini adalah penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan Tenaga Lapangan Dinas (TLD). Program yang disosialisasikan antara lain program Keaksaraan Fungsional, program pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C), pendirian PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan program TBM (Taman Baca Masyarakat). Dari sosialisasi tersebut mengingat banyaknya buta huruf yang ada di wilayah Desa Karangpring maka YPPI Nurul Wajid yang dalam hal ini ketuanya adalah Bapak Nur Ali menindak lanjuti sosialisasi tersebut kepada UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi untuk memberi laporan dan konsultasi tentang pelaksanaan program KF dari situlah maka dengan segala persyaratan yang telah dipenuhi lembaga
--	--	--	--

			<p>tersebut maka sejak tahun 2006 yayasan melaksanakan program KF tersebut.” (SG, 11 September 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Program KF atau Keaksaraan Fungsional itu kita Yayasan Nurul Wajid melaksanakan sejak tahun 2006 berawal dari orang UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorambi untuk melaksanakan program ini, akhirnya dari desa lalu desa menunjuk ke yayasan ini. Artinya bukan menunjuk tapi cuma memberi tahu bahwa di situ ada yayasan pondok pesantren. Lalu akhirnya bertemulah dengan saya. Setelah ketemu bahwa saya disuruh membuat proposal diajukan kepada dinas pendidikan kabupaten. Akhirnya kami hampir setiap tahun diberi amanah atau tugas untuk melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintahan terkait. Entah dari pemerintah desa maupun UPT Pendidikan Sukorambi. Dan itu saya tidak sendirian tapi ada empat penyelenggara di Kecamatan Sukorambi, penyelenggara yang pertama yaitu Yayasan Nurul Wajid, yang kedua Yayasan Wali Songo Desa Dukumencek terus yang ketiga Yayasan Nurul Jadid Desa Klungkung, keempat Yayasan Al-Multakam di Desa Klungkung juga. Tapi mulai tahun 2013 kemarin bertambah lagi penyelenggaranya yaitu, Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukorambi yang diketuai langsung oleh Bu Camat. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang jelas kami yang awalnya tidak tahu lalu kami diberi tahu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari tingkat Kabupaten sampai provinsi bahkan pusat.
--	--	--	---

			<p>Kita selalu diikuti, bahkan lebih dari itu kami juga diberi bagian melaksanakan program yang lain. Contohnya, Kesetaraan. Kesetaraan itu mulai paket A, paket B, paket C kita bisa melaksanakan itu semua. Dan Alhamdulillah selama ini sudah meluluskan beberapa orang siswa untuk di Yayasan Nurul Wajid. Ya begitu ceritanya.”</p>
		<p>Musyawaharah dengan UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Dari awal kalau kemarin yang tahun 2013 kita laksanakan sebagaimana biasanya. Pertama adalah kita bermusyawaharah bersama dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah UPT Pendidikan Sukorambi bersama dengan para pengurus yayasan bahwa kita laksanakan program KF akhirnya disitu diadakan identifikasi warga belajar. Artinya siapa saja yang belum bisa membaca menulis. Termasuk identifikasi kita itu kepada tutor. Artinya siapa saja tutor yang mengajar dan siap. Setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan sebagaimana identifikasi sebelumnya soal warga belajar, tutor, juga anggarannya. Karena pendidikan ini memang harus bermusyawaharah dengan warga belajar tanpa dengan WB kita bakal kesulitan. Ya karena muridnya para orang tua, maka musyawaharah dimana, waktunya kapan, jam berapa dsb..” • “Setiap awal mula tiap tahunnya dilaksanakannya program Keaksaraan Fungsional baik di Desa Karangpring karena adanya sosialisasi petugas UPT Pendidikan Kecamatan Sukorambi dalam hal ini adalah

			penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) dan Tenaga Lapangan Dinas (TLD)..”
		Mempersiapkan Warga Belajar dan Tutor	<ul style="list-style-type: none"> • “Bahwa dalam pelaksanaan program KF sasaran program sejak tahun 2012 tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 sasaran Warga Belajar KF menggunakan data Buta Huruf dari BPS Kabupaten Jember. Namun demikian, tidak dari semua buta huruf yang ada di data BPS tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) bahwa sasaran buat huruf itu berusia 15-59 tahun. Kemudian, klasifikasi buta huruf menurut versi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah penduduk yang buta huruf murni atau dengan kata lain bahwa bagi masyarakat atau penduduk yang tidak punya ijazah SD tetapi bisa Calistung, maka dikategorikan tidak termasuk sasaran buta huruf, walaupun usianya 15-59 tahun.” (SG, 11 September 2014) • “Mulai tahun 2012 sebelum melaksanakan program harus sesuai data BPS terlebih dahulu. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, warga belajar saya tentukan sendiri. Dengan mencari warga buta huruf di Desa Karangpring.” (NA, 31 Agustus 2014) • “Ketua penyelenggara di Desa Karangpring adalah sebagai seorang yang profesional atau disebut tokoh masyarakat. Dengan memilih seorang yang professional juga sebagai tokoh masyarakat maka akan lebih muda

			<p>mengajak warga buta huruf di sana untuk mau belajar.” (SG, 11 September 2014)</p>
		<p>Pengajuan Proposal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “..Lalu setelah terkumpul dan di data ada berapa yang mau menjadi calon Warga Belajar, kita membuat proposal untuk pengajuan dana anggaran program ke Dinas Pendidikan provinsi. Setelah mendapatkan dana tersebut kita laksanakan program tersebut.” (NA, 16 Agustus 2014) • “Awalnya ya mengajukan proposal ke Diknas terus setelah itu biasanya ya dikasih atau tidak. Namanya pengajuan ya mbak. Kalau di acc ya biasanya dapat program itu lah. Lembaga kami atau yayasan kami dapat program..” (NM, 4 September 2014)
		<p>Pendekatan dengan Warga Belajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Ya yang pertama itu agak repot, agak susah juga yak karena kan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya agak susah untuk mengumpulkannya. Masalahnya kan orang yang tidak pernah belajar itu malas untuk mau belajar. Jadinya saya mencari akal gimana untuk bisa mengumpulkan warga belajar. Ya caranya ya disuruh kumpul di mushola. Kebetulan saya ada jamaah di sana. Tiap malam rabu ada istigosah yang di dalamnya ada sekitar 20 orang, ya saya cari sekitar 5 orang yang benar-benar tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Akhirnya bisa terkumpul dan berjalanlah.” (SJ, 7 Desember 2014) • “Jadi begini, itu harus ada stimulusnya. Kenapa begitu?”

			<p>Karena memang tidak mudah mengajak mereka belajar pasti malas. Mereka pikirnya kerja. Jadi saya belikan paralon waktu itu karena waktu itu memang lagi ada masalah air di sini. Sehingga mereka mau belajar hehe. Kalau tidak begitu tidak mau.” (NA, 31 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Iya, harus ada stimulusnya. Ada salah satu tutor yang di Durjo membelikan mie ketika kelas itu hehe. Ya agar mereka semangat datang dan belajar.” (NA, 31 Agustus 2014)• “Iya, mengajaknya kalau ingin bisa menulis dan membaca mari sekolah dengan saya, ikut sekolah tributa gitu kata NA. Ya ada diberi barang-barang bahan praktek. Kayak kompor, pengukus, dandang saat praktek. Kadang diberi uang juga.” (SM, 7 September 2014)• “Yaa karena saya pingin membaca menulis itu. Ingin tahu baca tulis, bukan karena uang bukan karena keadaan perabotan itu. Karena saya memang ingin baca tulis itu. Ingin menambah ilmu” (SM, 7 September 2014)• “Karena belum bisa membaca. Ya karena dulu tak bisa sekolah hehe. Seneng terus bisa belajar” (AR, 22 Juli 2014)• “Jadi ketika di acara rutin muslimatan, saya mengumumkan ini ada program khusus untuk menghilangkan buta huruf maka diharapkan untuk ikut. Yang pertama karena samean (ke warga) ingat ibadah. Orang cari ilmu itu satu huruf pahalanya besar. Jadi
--	--	--	---

			<p>warga mau belajar. Akhirnya beberapa sudah bisa membaca.” (KH, 8 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Ya setelah pengumuman di acara muslimatan itu. Lalu saya juga bilang kalau ada belajar membaca ini mereka bukan diberi uang tapi kita bangun RKK semacam gudang penyimpanan barang-barang seperti piring gelas dan katil (keranda mayat) untuk acara-acara di RT sini. Ya saya bilang samean (warga belajar) tidak saya beri uang langsung. Kebetulan juga tempat RKK di sini belum ada waktu itu jadi langsung saya bikin. Juga dengan menyisihkan hasil mengajar jadi tutor. Jadi warga ya mau. Sama seperti Pak NA di sana warga diberikan paralon karena butuh paralon. Ya yang penting buat kebaikan. Dulu juga diberi hadiah dari Pak NA itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Diberi open buat kue (alat membuat kue). Jadi langsung masuk dalam RKK.” (KH, 8 Desember 2014)
	<p>Tahap Pelaksanaan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • “Jam belajar mulai Tahun 2012 proses pembelajaran tidak lagi selama 6 bulan akan tetapi menggunakan jumlah jam minimal 114 jam.” (SG, 11 April 2014) • “Kalau kemarin itu acuannya bukan selama 6 bulan tetapi 120 jam pertemuan. Sekali pertemuan itu 2 jam. Seminggu biasanya ada 4 kali atau 3 kali. Itu terhitung dari 25 Agustus hingga 15 Desember 2013 harus 120 jam. Itu ketentuan sejak 2012 lalu.” (NA, 31 Agustus 2014)

			<ul style="list-style-type: none"> • “Setelah mendapat dana dari pengajuan proposal itu kita jalankan programnya. Mula-mula kita tentukan kelompok belajarnya. Untuk tahun 2013 berjumlah 100 warga belajar maka kita membagi 10 orang tiap kelompok maka terdapat 10 kelompok. Itu ditentukan juga berdasarkan letak rumah warga belajar. Jadi dalam satu kelompok itu warga belajar yang terkumpul yang rumahnya paling berdekatan. Lalu dari masing-masing kelompok menentukan jadwal pembelajarannya. Warga dengan tutor bersama-sama menentukannya. Setelah itu dijalankan proses belajar mengajar membaca, menulis, berhitung.” (NA, 16 Agustus 2014)
		Menentukan Kelompok Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • “Tahun 2013 100 Warga Belajar. Ya kalau ada 10 kelompok berarti 100 WB. Setiap kelompok 10 warga belajar.” (NM, 4 September 2014) • “Total 100 warga belajar dengan dibagi menjadi 10 kelompok Duku 1-10 dan 10 tutor. 1 tutor dalam tiap kelompok” (NA, 31 Agustus 2014) • “Warga Belajarnya lebih dari 10 warga. Kadang ya kalau pas masuk semua ya segitu. Ada semua.” (SK, 7 Desember 2014)
		Penyusunan Jadwal Belajar	<ul style="list-style-type: none"> • “Kalau pelaksanaan awalnya menentukan kelompok lalu membuat jadwal. Ya jadwalnya rembukan dengan Warga Belajar. Karena sifatnya pendidikan orang dewasa kita tidak bisa memaksa, mana waktu luangnya WB itu kita manfaatkan. Malah di forum-forum tertentu itu juga bisa. Contohnya ada kegiatan ini itu kita masuk. Saking ingin orang-orang itu kumpul karena ya dilain waktu ya sesuai

			<p>jadwal. Karena di desa ini kan ada kegiatan rutin tiap minggu. Itu dimanfaatkan” (NM, 4 September 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Yaitu, mengumpulkan warga dulu lalu menentukan bersama murid (Warga Belajar). Kesepakatannya gimana dengan menanyakan mereka satu persatu, bisanya mereka hari apa. Sama-sama menawarkan. Saling memberi usulan kapan. Kan kalau disini mayoritas mereka bekerja dulu jadi setelah selesai bekerja, saat Isya gitu. Kalau sore tidak bisa. Jadi dikembalikan lagi ke warga, kan ini harus menyesuaikan kondisi warga” (SK, 7 Desember 2014)• “Dari awal setelah terkumpul ya pertama ditentukan dulu siapa ketua kelasnya. Kalau saya yang handle semua yang tidak bisa.” (SK, 7 Desember 2014)• “Kalau menentukan jadwal belajar yak karena dari awal saya mengajak ketika ada acara muslimatan maka kesepakatan saat itu dengan warga ya ketika acara muslimatan dilanjut belajar bersama buta huruf.” (KH, 8 Desember 2014)• “Ya sebelum belajar itu diinformasikan dulu. Kalau ada jadwal diinformasikan kalau malam ini harus berkumpul untuk belajar. Yang menentukan tutor. Kalau misal tutornya tidak bisa ya ditunda” (SY, 7 Desember 2014)• “Ya istilahnya mereka itu ijin Mbak kalau mereka tidak bisa hadir. Jadwalnya dulu setiap malam selasa dan malam jumat. Jadi setiap malam, kalau siang mereka banyak kerja. Seperti petani, terus ada yang jualan.” (SY, 7 Desember 2014)
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• “Ya saya yang menentukan, kan saya mengikuti ketika acara istigosah itu. Setiap malam jumat ada yasinan. Ya untuk menyemangati mereka itu saya menyambungkan dengan acara istigosah itu. Jadi setelah acara istigosah tersebut dilaksanakan kegiatan belajar, akhirnya kan terkumpul di sana. Yaitu, jadi diasiasi dengan acara tersebut. Akhirnya setiap malam rabu sama malam jumat dilaksanakan. Jadi setelah acara istigosah. Masalahnya kalau diadakan disiang hari mereka kan kerja terus.” (SJ, 7 Desember 2014)
		Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• “Oh fasilitas belajar yang diberikan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan ya ada buku, ada bulpen, ada penggaris, pensil dan itu termasuk buku bacaannya atau yang disebut buku tematik jadi setiap Warga Belajar dapat. Kalau buku tulis sesuai kebutuhan, jika kurang ya kita tambahi dua atau tiga buku lagi. Cuman kalau fasilitas belajar itu kalau kita biasa ditaruh di tempat belajar tidak boleh dibawa pulang ya karena kalau dibawa pulang itu Ibu-ibu itu biasanya hilang bukunya, ada yang dibuat anaknya, dibuat bungkus jajan atau makanan di rumah. Maka dari itu tetap diletakkan di tempat belajar. Disamping itu ada fasilitas belajar untuk tutor ada papan belajarnya, papan tulis untuk tutornya.” (NA, 16 Agustus 2014)• “Yaa itu tadi Calistung, membaca menulis dan berhitung mudahnya seperti itu. Tetapi di dalam ketentuannya itu ada lima komponen, yaitu membaca, menulis, berhitung, mendengar dan berbicara. Jadi, misalkan warga itu

			<p>diusahakan menulisnya itu seperti apa, membacanya seperti apa, berhitungnya bagaimana dan mereka saat mendengarkan kita itu bagus tidak artinya nanggap tidak terus kalau berbicaranya itu kita ajarkan dengan diusahakan mereka berbicara dengan bahasa Indonesia karena tidak semua warga itu bisa, cuma paham dan mengerti. Contohnya warga di rumah itu saat menonton televisi seperti sinetron itu mereka mengerti tetapi tidak bisa mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Indonesia. Maka kita usahakan warga itu paham.” (NA, 16 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Ya artinya dengan sendirinya mereka kalau proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan sendirinya mereka ngomong dan berbicara, artinya lima komponen itu pasti dikerjakan. Ya contohnya mereka disuruh menulis namanya sendiri, disitu mereka juga menghitung berapa huruf dalam nama mereka. Artinya cara belajarnya seperti itu lah” (NA, 16 Agustus 2014)• “Kalau tidak salah itu empat kali dalam seminggu. Kalau empat kali dalam seminggu itu dua jam kalau tiga kali kadang tiga jam. Kadang empat kali itu sulit. Ya sulit kadang ngumpulnya. Ya sulit memang seakan-akan yang butuh tutornya. Kadang jadinya tiga kali” (NM, 4 September 2014)• “Ya proses belajar mengajarnya dimulai. Mereka selalu dikasih PR juga. Ya harus itu. Agar mereka tidak mudah lupa dengan yang sudah dipelajari.” (SK, 7 Desember 2014)
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">• “Bahasa sini Dek hehe. Bahasa Madura dulu tapi akhirnya mereka harus belajar sedikit-sedikit. Mereka pasti sudah melihat lewat televisi pasti sudah ada mengertinya.” (SK, 7 Desember 2014)• “Iyaa diajarkan. Yaa bahasa Indonesia sehari-hari yang ada di rumah. Ya yang ada di dalam dikehidupan sehari-hari, yang di warga sekitar. Jangan jauh-jauh. Karena kan warga buta huruf.” (SK, 7 Desember 2014)• “Materinya ya sesuai yang ada di buku Dek. Tentang masak, tentang kehidupan sehari-hari.” (SK, 7 Desember 2014)• “Kalau aktifnya mereka semua aktif tetapi untuk kekekatannya dalam belajar itu agak sulit. Proses keingatannya itu karena faktor sudah lanjut usia ya. Saya juga tanyain mereka satu-persatu. Kalau ada yang tidak bisa saya arahkan. Setiap pertemuan saya selalu tanyakan lagi satu persatu. Apa yang sudah ditulis di depan (Papan) lalu ditanyakan dan mereka saya suruh baca sendiri. Kalau menulis contohnya kayak saya suruh menulis desa karangpring, disuruh buat namanya sendiri.” (SJ, 7 Desember 2014)• “Terus terang ya Mbak, jangankan murid tutorpun bahasa indonesianya kaku. Karena apa, tradisi kalau di pedesaan terbiasa bahasa Madura jadi sekarang bicaranya kaku mbak. Untuk cara-cara mengajar ya mungkin intinya sama, termasuk sebagian dari saya. Kalau saya jadi tutor, saya menulis di papan langsung saya suruh ayo mari-mari garap harus mirip dengan yang
--	--	--	--

			<p>di papan. Dan saya meskipun muridnya tua-tua harus diberi PR juga mbak. Karena bagi saya PR itu penting.” (AA, 7 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Oh iya, seperti yang saya bilang tadi. Jangankan muridnya, tutornya pun sulit karena di desa kebiasaan berbahasa Madura semua. Kebanyakan ya memakai bahasa Madura. Tidak bisa kalau orang tua itu. Ya bisa juga sebagian saya selingkan bahasa Indonesia. Kalau tulisan yang saya ajarkan ya dengan bahasa Indonesia Mbak. Saya kalau nulis bahasa Indonesia. Dan dari awal saya bilang tadi, mereka saya kasih PR juga. Dan mereka harus tahu menulis nama masing-masing.” (AA, 7 Desember 2014)
		<p>Pendidikan Latihan Keterampilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Di Sukorambi hanya Desa Karangpring yang melakukan kegiatan keterampilan. Desa Karangpring mengawali dengan adanya kegiatan tersebut. kegiatan tersebut yang mengarah kepada ekonomi masyarakat dan menyesuaikan sumber daya alam yang ada di lingkungan Karangpring.” (SG, 11 September 2014) • “Oh iya. Kalau sudah beberapa waktu kalau sudah dipertengahan jalannya program kita adakan kegiatan keterampilan. Artinya mengapa? Kalau ada kegiatan keterampilan maka Warga Belajar (WB) itu bisa lebih semangat lagi karena jenuh. Kenapa? Karena dengan keterampilan itu kita nikmati bersama. Biasanya kita

			<p>membuat keterampilan bervariasi ada yang berupa makanan ada yang berupa semacam sebuah karya. Misalkan kita membuat kripik, dan lain-lain..” (NA, 16 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Kalau yang kemarin kita membuat kripik terus membuat pupuk kompos. Iya buat itu. Kripiknya dari <i>pohong</i> dan talas. Sama membuat keranjang. Kalau katanya orang Madura itu <i>grujung</i> dibuat untuk tempatnya buah itu seperti rambutan kalau mau dibawa ke pasar.” (NA, 16 Agustus 2014)• “Ada kegiatan keterampilan. Para warga membuat keterampilan seperti membuat kripik, pupuk, dll. Jadi tiap kelompok ada keterampilan masing-masing, dibagi tiap beberapa kelompok.” (NM, 4 September 2014)• “Kegiatan tambahan tersebut bertujuan mengembalikan semangat para warga belajar yang kadang mereka pasti merasa bosan saat belajar di kelas saja.” (NM, 4 September 2014)• “Ada. Seperti keterampilan. Kalau perempuan biasanya masak, buat apa gitu. Mayoritas disini membuat kripik <i>pohong</i>. Peran tutor saat itu mendampingi saja mbak” (SK, 7 Desember 2014)• “Ya praktek membuat kripik, ya kripik singkong, kripik talas. Ada juga belajar buat onde-onde. Yaa membaca resep lalu membuat. Tapi ya namanya orang tua kalau sekarang disuruh ya lupa kalau tidak baca bukunya, harus baca resep dulu. Yaa kalau ada bukunya pasti bisa, kalau tidak membaca tak bisa. Bikinnya bareng-bareng
--	--	--	--

		<p>teman-teman.” (SM, 7 September 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Kalau kripik tidak dijual. Pupuk kompos yang dari kotoran sapi itu yang dijual. Motivasinya ya dijual tetapi karena hasil kripiknya tidak banyak jadi hasilnya dimakan bareng-bareng.” (NA, 7 September 2014) • “Anu membuat grunjung (keranjang) sama mengelolah pupuk kandang. Membuatnya bersama-sama lalu dijual bersama-sama” (AR, 22 Juli 2014)
	<p>Tahap Penilaian Hasil Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Secara umum kalau soal penilaian ada 5 poin itu tadi, ada membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengar. Kalau bagaimana prosesnya itu tiap bulannya ada lembar penilaiannya, jadi disitu keliatan perkembangan WB tiap bulannya. Di akhir proses evaluasinya ya dilihat warganya bagaimana membacanya, menulisnya, dsb.. Sudah bisa atau tidak. Kalau sudah dinyatakan lulus mereka mendapatkan SUKMA semacam sertifikat gitu. Surat Keterangan Melek Aksara. Begitu.” (NA, 31 Agustus 2014) • “Penilaiannya ya perwarga, perorang begitu. Diliat kemampuannya. Kan ada tesnya, lalu di kelas mereka seperti apa itu sudah dapat dinilai. Tiap bulan dinilai dan nanti akhirnya kelihatan perkembangannya Mbak. Diakhir juga ada tesnya” (SK, 7 Desember 2014) • “Kalau di nilainya itu mereka nerusin apa yang saya tuliskan itu. Misal ini bapak.. siapa suruh teruskan. Ya cara menilainya itu satu, dilihat tulisan mereka betul atau tidak. Sesuai dengan di papan atau tidak, kalau salah ya ditulis lagi di papan merekanya. Kalimatnya ini begini

		<p>itu begini. Kadang terbalik antara D ama B. Penilaian dilakukan tiap bulan, ya dinilainya dilihat lancar tidaknya. Kalau tesnya ada itu di akhir itu di bukunya. Jadi tesnya ya mereka membaca, menulis, berhitung di isi dari bukunya. Jadi saya tulis di papan lalu mereka meneruskan di buku.” (KH, 8 Desember 2014)</p>
	<p>Penilaian Secara Periodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Penilaiannya ya perwarga, perorang begitu. Diliat kemampuannya. Kan ada tesnya, lalu di kelas mereka seperti apa itu sudah dapat dinilai. Tiap bulan dinilai dan nanti akhirnya kelihatan perkembangannya Mbak. Diakhir juga ada tesnya” (SK, 7 Desember 2014) • “Secara umum kalau soal penilaian ada 5 poin itu tadi, ada membaca, menulis, berhitung, berbicara dan mendengar. Kalau bagaimana prosesnya itu tiap bulannya ada lembar penilaiannya, jadi disitu keliatan perkembangan WB tiap bulannya..” (NA, 31 Agustus 2014)
	<p>Pemberian SUKMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • “Kalau sudah lulus mereka mendapat sebuah surat semacam sertifikat namanya SUKMA, jadi tiap Warga Belajar yang sudah dievaluasi diberikan SUKMA, yaitu Surat Keterangan Melek Aksara. Dan surat itu memang langsung diberikan dari Dinas Pendidikan.” (NA, 16 Agustus 2014) • “..Di akhir proses evaluasinya ya dilihat warganya

			<p>bagaimana membacanya, menulisnya, dsb.. Sudah bisa atau tidak. Kalau sudah dinyatakan lulus mereka mendapatkan SUKMA semacam sertifikat gitu. Surat Keterangan Melek Aksara. Begitu. Gunanya adalah bukti bahwa mereka telah melek aksara dalam Keaksaraan Dasar. Lalu bisa lanjut pada Keaksaraan Usaha Mandiri. Namun saya belum melaksanakan KUM di Karangpring.” (NA, 31 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Tiap tahun sih bisa dikatakan sama. Cuma yang kemarin ya berhasil lah. Ini kan yang 2014 mengajukan yang KUM, Keaksaraan Fungsional yang Keaksaraan Usaha Mandiri..” (NM, 4 September 2014)
<p style="text-align: center;">Faktor Pendorong Keberhasilan Program</p>			<ul style="list-style-type: none"> • “Nah mungkin pertama, kalau dari Warga Belajar ada Warga Belajar yang benar-benar ingin tahu, mau belajar. Artinya itu bisa salah satu pendorong juga. Terkadang kan ada orang yang semangat dan ingin benar-benar belajar. Kalau dari segi tutornya itu karena mereka mendapat honor meskipun tidak seberapa itu juga menjadi pendorong dan penyemangat para tutor. Karena saya yakin kalau tutornya tidak dibayar sama sekali mungkin malas juga yang mau mengajar terus-terusan selama 120 jam. Kalau dari segi penyelenggaranya itu karena memang biayanya meskipun minim itu juga ada tetapi itu juga sebagai pendorong.” (NA, 16 Agustus 2014) • “Kegiatan keterampilan ya termasuk juga ya. Karena dengan begitu Warga Belajar secara tidak langsung bisa belajar membaca menulis berhitung itu dengan

			<p>keterampilan. Kenapa saya mengatakan begitu karena saat warga membuat kripik singkong, itu otomatis warga menulis sendiri kata singkong. Dan juga saat berhitung itu mereka mencatat berapa singkong? Misal singkong dua pohon atau dua apa. Artinya secara tidak langsung mereka langsung belajar dengan keterampilan itu.” (NA, 16 Agustus 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Faktornya bisa berhasil gitu ya? Mungkin kalau yang kemarin itu kebetulan warga belajar tempatnya tidak terlalu jauh. Jadi dari tingkat kehadirannya tinggi jadi bisa maksimal. Karena kalau jauh itu yang jadi kendala. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita masuki. Seperti yang saya katakan tadi banyak kegiatan muslimatan yang berbarengan dengan jadwal kita masukin. Malah banyak yang sudah bisa baca ikut juga membantu haha.” (NM, 4 September 2014)
<p>Kendala YPPI Nurul Wajid dalam Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional dan Upaya Mengatasinya</p>			<ul style="list-style-type: none"> • “..Nah kalau hambatannya atau kendalanya itu ya memang memberikan pelajaran kepada orang dewasa itu tidak mudah. Karena apa, kalau orang dewasa itu misalkan tidak hadir satu dua kali itu kita tidak bisa menegur karena memang orang dewasa beda dengan anak-anak. Lalu, ada yang tidak bisa-bisa membaca menulis. Kok tidak bisa-bisa itu memang suatu tantangan tersendiri artinya memang tidak mudah dan lebih sulit. Iya seperti itu. Terus berhubungan dengan kegiatan masyarakat itu sendiri artinya pas kalau musim bekerja banyak Warga Belajar yang tidak bisa hadir maka proses belajarnya mereka tidak terus” (NA, 16 Agustus 2014)

			<ul style="list-style-type: none">• “Kendala ya.. dari WB itu juga ada yang males kadang-kadang. Bukan males, cuman kadang WB tidak merasa butuh saja. Kalau tidak merasa butuh kan berarti disemangati lagi. Maka dari itu informan NA memilih tutor itu yang pertama bisa mengajar, yang kedua itu orang yang sedikit berpengaruh. Maksudnya berpengaruh itu kalau mengajak warga datang itu tidak sampai lebih dari dua kali menyuruh datang. Karena seperti pak kyai pak ustad di daerah itu guru-guru anaknya ngaji itu. Kalau bisa ngajar meskipun lulus SD tapi kegiatannya sehari-hari sering menulis itu kan tidak apa-apa. Sebetulnya ya dari tahun ketahun ya sama, kendalanya ya disitu. Ya pernah Pak NA bukan tahun 2013 itu pernah ada tutor yang jarang masuk. Karena memang Pak NA tidak selalu dapat memantau, kadang satu bulan itu kalau 3kali dalam seminggu itu kadang Pak NA memantaunya berapa kali seminggu gitu. Ya karena juga sebagai penyelenggara juga merangkap sebagai tutor.” (NM, 4 September 2014)• “Ya tidak ada seperti itu. Ya kendalanya hanya itu ada yang awalnya tidak mau diajak belajar. Mereka kan tidak paham untuk apa. Ya harus ada triknya itu Dek. Triknya ya menjelaskan kepada mereka bahwa bisa membaca, menulis, berhitung itu penting. Menjelaskan agar kita ini tahu karena ini suatu kebutuhan dan agar tidak ketinggalan dari yang lain. Tapi menjelaskannya menyesuaikan kemampuan mereka masing-masing. Ya awalnya ada yang masih ragu. Lalu dari mulut kemulut
--	--	--	--

			<p>mereka semakin banyak yang datang.” (SK, 7 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Tidak ada. Ya cuma kendalanya mungkin karena mereka sudah tua, kadang mereka sulit dalam mempelajari. Ya Alhamdulillah kalau sekarang mereka sudah bisa.” (SY, 7 Desember 2014)• “Ya dengan telaten begitu. Diajarkan lagi dengan diulang-ulang sampai mereka bisa.” (SY, 7 Desember 2014)• “Ya yang pertama itu agak repot, agak susah juga yak karena kan orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan ya agak susah untuk mengumpulkannya. Masalahnya kan orang yang tidak pernah belajar itu malas untuk mau belajar. Jadinya saya mencari akal gimana untuk bisa mengumpulkan warga belajar. Ya caranya ya disuruh kumpul di mushola. Kebetulan saya ada jamaah di sana. Tiap malam rabu ada istigosah yang di dalamnya ada sekitar 20 orang, ya saya cari sekitar 5 orang yang benar-benar tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Akhirnya bisa terkumpul dan berjalanlah.” (SJ, 7 Desember 2014)• “Ya untuk menyemangati mereka itu saya menyambungkan dengan acara istigosah itu. Jadi setelah acara istigosah tersebut dilaksanakan kegiatan belajar, akhirnya kan terkumpul di sana. Yaitu, jadi disiasati dengan acara tersebut. Akhirnya setiap malam rabu sama malam jumat dilaksanakan. Jadi setelah acara istigosah. Masalahnya kalau diadakan disiang hari mereka kan
--	--	--	--

			<p>kerja terus.” (SJ, 7 Desember 2014)</p> <ul style="list-style-type: none">• “Cuma yaitu, cara menangkap murid-murid itu sulitlah karena keadaan mereka yang sudah tua-tua Mbak. Ya ada setengah dari murid-murid. Kalau mereka tidak mengerti terus saya ulang-ulang mengajarnya sampai mereka bisa.” (AA, 7 Desember 2014)• “Hambatannya ya hujan itu. Kalau hujan yang ngajar keburu-buru. Apalagi ketika padam listrik.” (KH, 8 Desember 2014)
--	--	--	---

